



KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

INDONESIA

ISSN 1693-0231



WIRA  
MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN



# KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020 - 2024

EDISI II 2021

[www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)



Kementerian Pertahanan  
Republik Indonesia



kemhanri



@Kemhan\_RI



Kemhan RI



## **DEWAN REDAKSI**

### **Pelindung/Penasihat:**

Sekjen Kemhan  
Marsdyo TNI Donny Ermawan T., M.D.S.

### **Pemimpin Umum:**

Karo Humas Setjen Kemhan  
Marsma TNI Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc.

### **Pemimpin Redaksi/Koordinator Redaksi :**

Kol Laut (P) Hadi Prayitno  
Kol Arm Joko Riyanto, S.Sos, M.M

### **Redaksi Naskah/Redaksi Visual:**

M. Adi Wibowo, S.Sos, M.Si.,  
Letkol Inf Arif Nursaid, S.Sos, M.Sc  
Letkol Inf Ir. Susanto, M.Si,  
Mayor Laut (KH) Bondy Mulyatmo, S.Sos, M.M

### **Reporter:**

Budiono, S.Si

### **Desain Grafis :**

Imam Rosyadi / Adi Setiawan

### **Fotografer:**

Acep Sutawijaya / Sasi Indah P

### **Distribusi dan Sirkulasi :**

Kapten Cku Lindu Baliano  
Mandiri Triadi, S.Sos, M.M

### **Diterbitkan oleh:**

Biro Humas Setjen Kemhan - Jl. Merdeka Barat  
No. 13-14, Jakarta -Telp. 021-3829151, Fax.  
3452457

Para pembaca WIRA yang budiman,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya-lah di Tahun 2021 ini Majalah WIRA Kemhan kembali menyapa para pembaca WIRA di edisi I Tahun 2021. Pada edisi ini redaksi akan menyajikan beberapa informasi dan artikel yang layak untuk disimak oleh pembaca WIRA.

Adapun, informasi yang kami berikan adalah terkait dengan kegiatan pimpinan Kementerian Pertahanan yang terangkum dalam rubrik Fokus.

Selain itu, beberapa artikel menarik juga kami sajikan yakni, Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, Kebijakan Pertahanan Tahun 2021, Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Amanat PP No.3 Tahun 2021 dan UU No 23 Tahun 2019 Tentang PSDN, Pemerintah Terbitkan PP Nomor 3 Tahun 2021 Sejarah Dalam Upaya Pembangunan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, dan Modernisasi Alutsista Besar-Besaran di Tiga Matra.

Sedangkan pada kolom Fokus Lensa, redaksi menampilkan foto-foto kegiatan pimpinan dan foto kegiatan Satker Kemhan.

Dengan segala kerendahan hati, semoga informasi dan artikel yang kami sajikan dalam Majalah WIRA Kemhan edisi kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta manfaat bagi para pembaca setia WIRA dimanapun berada dan bertugas.

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA Kemhan ini, kami juga senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). Majalah WIRA Kemhan juga dapat diakses dalam jaringan online di laman [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

Selamat membaca....!!!

Kepala Biro Humas,

Marsma TNI Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc.



# Daftar Isi

## Fokus Utama>>

- # Menhan Sampaikan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021,  
Diantaranya Melanjutkan Penanganan Covid-19

6-9



Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2021 sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan kedepan. Kebijakan pokok pertahanan negara tahun 2021 diantaranya melanjutkan penanganan pandemi covid 19. Kebijakan Pokok Pertahanan Negara Tahun 2021 tersebut disampaikan Menhan pada pelaksanaan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) hari ke-2 yang dilaksanakan di kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (13/1).

- # Kemandirian Pertahanan dan Keamanan Yang Kuat Mewujudkan  
Indonesia Tangguh

10-15

## Fokus Pimpinan>>

16-35

- # Kerjasama Pertahanan Negara Kawasan Samudera Hindia Sangat Penting untuk Hadapi Tantangan Masa Depan
- # Wamenhan Kunjungan Kerja ke Kasal
- # Rapim UO Kemhan Tahun 2021 Sebagai Forum Evaluasi dan Penyampaian Kebijakan Pimpinan
- # Sekjen Kemhan Melaksanakan Kunjungan Kerja Ke Pusrehab Kemhan Dan RS dr. Suyoto
- # Sekjen Kemhan Kunjungan ke RSUD Cengkareng Untuk Studi Banding Pengembangan Rumah Sakit dr. Suyoto
- # Menhan RI Pimpin Entry Meeting Pemeriksaan Pelaporan Keuangan Kemhan/TNI TA 2020
- # Penandatanganan Perjanjian Kinerja Itjen Kemhan TA. 2021
- # Unhan beserta Kedubes Inggris Laksanakan *Short Course on Managing Defense in a Wider Security Context (MDWSC)*
- # Jabatan Kepala Biro Humas Setjen Kemhan diserahterimakan



## **Artikel>>**

**36-41**

### **# Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024**

(Penulis : Kolonel Adm Agung Karyanto, S.Sos., M.Si.)



Secara garis besar Jakum Hanneg terdiri atas dua bagian utama, yakni bagian batang tubuh terdiri atas 7 pasal dan bagian isi kebijakan berupa lampiran yang mendeskripsikan pokok kebijakan pertahanan negara tahun 2020-2024.

**42-55**

### **# Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021**

**56-63**

### **# Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Amanat PP No.3 Tahun 2021 dan UU No 23 Tahun 2019 Tentang PSDN**

(Penulis : Kolonel Adm Agus Setyo Hartono, S.A.P)

**64-73**

### **# Pemerintah Terbitkan PP Nomor 3 Tahun 2021, Sejarah dalam upaya Pembangunan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta**

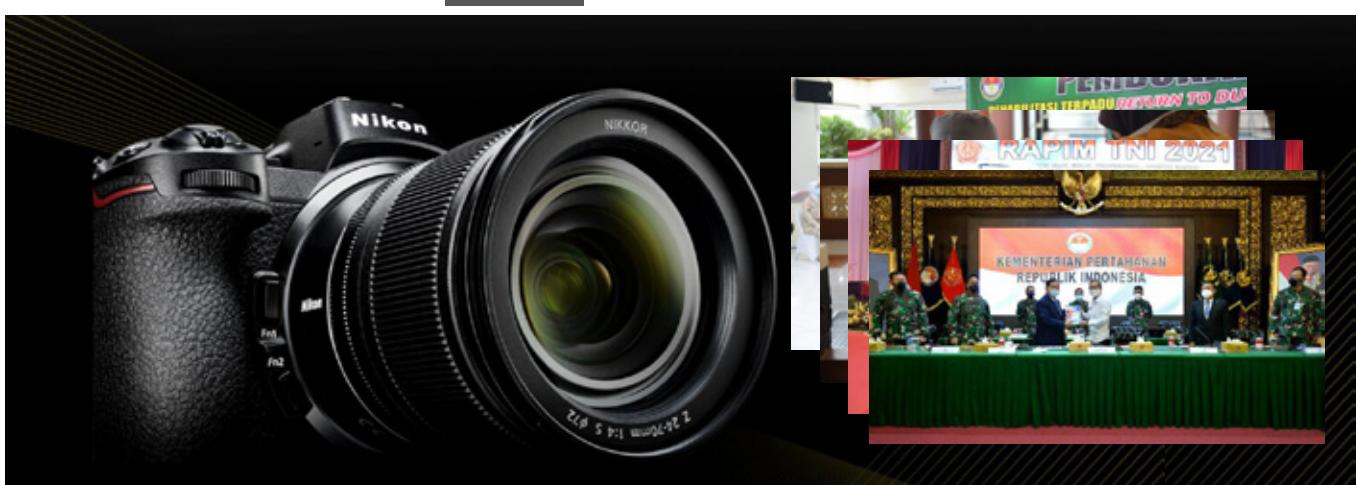
(Penulis : Budiono)

**74-81**

### **# Modernisasi Alutsista Besar-Besaran di Tiga Matra (Penulis : Erik Purnama Putra)**

## **Fokus Lensa>>**

**82-84**



Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2021 sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan kedepan.



# MENHAN SAMPAIKAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2021, DIANTARANYA MELANJUTKAN PENANGANAN COVID-19



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2021 sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan kedepan. Kebijakan pokok pertahanan negara tahun 2021 diantaranya melanjutkan penanganan pandemi covid 19.

Kebijakan Pokok Pertahanan Negara Tahun 2021 tersebut disampaikan Menhan pada pelaksanaan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) hari ke-2 yang dilaksanakan di kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (13/1).

Rapim dihadiri oleh Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa yang sekaligus mewakili Panglima TNI, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Sekjen Kemhan Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto, serta beberapa pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI.

Menhan mengungkapkan bahwa, pada Alokasi Anggaran Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2021 diantaranya selain untuk mendukung proyek prioritas nasional, pemeliharaan dan pengadaan Alutsista TNI



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Tahun Anggaran 2021 dan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS, juga dialokasikan untuk mengantisipasi masih berlanjutnya penanganan pandemi Covid-19.

Lebih lanjut disampaikan Menhan, bahwa dinamika perkembangan lingkungan strategis telah menciptakan spektur ancaman, tantangan dan resiko yang kompleks. Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman dan tantangan terhadap pertahanan negara.

“Kompleksitas ancaman perlu dipahami dan dimengerti oleh segenap unsur pertahanan

negara. Untuk itu, Kementerian Pertahanan terus mengembangkan strategi dan kebijakan pertahanan negara serta implementasinya”, tutur Menhan.

Kemhan terus melakukan perumusan kebijakan pertahanan negara prediksi ancaman, doktrin pertahanan negara, kondisi geografis negara Indonesia serta kebijakan negara dalam mendukung kepentingan nasional.

Atas dasar keempat dasar aspek tersebut, beberapa kebijakan pokok pertahanan negara Tahun 2021 meliputi; Pertama, Melanjutkan penanganan pandemi Covid-19, melalui peningkatan kapasitas pertahanan

berupa sarana prasarana serta layanan kesehatan Rumah Sakit Kemhan dan TNI. Kedua, Penyiapan Sumber Daya Manusia Pertahanan Negara melalui pembentukan program Sarjana S1 Unhan.

Ketiga, Penguatan fungsi pembinaan sumber daya pertahanan dan pembangunan cadangan logistik nasional. Keempat, Melanjutkan pembangunan postur TNI untuk pemenuhan kekuatan pokok melalui modernisasi Alutsista matra darat laut dan udara, serta pengembangan personel dengan menerapkan prinsip kebijakan *right sizing* dan *proportional grows* disesuaikan dengan pengembangan satuan TNI.

Kelima, Pembentukan komponen cadangan matra darat, matra laut serta matra udara yang disesuaikan dengan kebutuhan matra untuk memperkuat komponen utama. Keenam, Penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan khususnya dengan negara-negara ASEAN dan kawasan Pasifik Selatan.

Ketujuh, Penguatan pertahanan di wilayah - wilayah selat strategis dengan memperkuat *coastal missile defence system* dan *coastal surveillance system*. Kedelapan, Pengembangan industri pertahanan nasional melalui peningkatan promosi kerjasama dan mengimplementasikan kebijakan imbal dagang, kandungan lokal dan offset untuk meningkatkan kemampuan industri.

Dan terakhir Kesembilan, Pembangunan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri, dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi dan sarana prasarana nasional lainnya guna mewujudkan pusat pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI I.E. Djoko Purwanto menjelaskan, pelaksanaan Rapim Kemhan Tahun 2021 dilaksanakan secara sederhana dan undangan terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Agenda Rapim Kemhan Tahun 2021 hari ke-2 antara lain

menghadirkan sejumlah nara sumber secara langsung maupun virtual antara lain Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/ Ka Bappenas, Ketua BPK dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan Rapim Kemhan diakhiri dengan penyerahan dokumen pedoman - pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara kedepan oleh Menhan kepada masing - masing Unit Organisasasi dalam hal ini diterima oleh Panglima TNI yang diwakili Kasad, Kepala Staf Angkatan dan Sekjen Kemhan.

Pedoman - pedoman penyelenggaraan pertahanan negara tersebut meliputi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2020 - 2024, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021 dan Amanat Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Karo Humas Setjen Kemhan lebih lanjut menjelaskan, melalui pelaksanaan Rapim Kemhan Tahun 2021 ini diharapkan akan terwujud sinergitas dan koordinasi yang lebih erat segenap unsur pertahanan negara demi kelancaran dan suksesnya tugas-tugas kedepan. Rapim Kemhan Tahun 2021 mengambil tema "Kemandirian Pertahanan dan Keamanan Yang Kuat, Mewujudkan Indonesia Tangguh".

Tema tersebut mengandung makna bahwa seluruh komponen bangsa harus bersatu untuk tetap menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di masa depan. Dengan tetap bersatu, pertahanan dan keamanan tentunya akan semakin kuat dan Indonesia semakin tangguh.\*\*\*

# “Kemandirian Pertahanan Mewujudkan

**S**ebagai bentuk kesiapan dalam menjalankan tugas di tahun 2021, Kementerian Pertahanan menggelar Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) Tahun 2021 bertempat di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Penyelenggaraan Rapim Kemhan ini memiliki makna penting sebagai forum untuk menyampaikan kebijakan pertahanan negara yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2021. Melalui Rapim ini, juga diharapkan akan terwujud sinergitas dan koordinasi yang lebih erat segenap unsur pertahanan negara demi kelancaran dan suksesnya tugas-tugas kedepan.

Karena masih dalam suasana pandemi Covid-19, Rapim Kemhan Tahun 2021 dilaksanakan secara sederhana dan undangan terbatas dengan metode tatap muka dan virtual, serta tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan berpedoman pada kebijakan pemerintah tentang pembatasan kegiatan masyarakat atau pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Tema Rapim Kemhan Tahun 2021 yakni “Kemandirian Pertahanan dan Keamanan Yang Kuat, Mewujudkan Indonesia Tangguh”. Rapim secara resmi dibuka oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan digelar selama dua hari, yakni pada tanggal 11 Januari 2021 dan tanggal 13 Januari 2021. Beberapa penekanan dan atensi disampaikan Menhan pada Rapim Kemhan 2021 kepada seluruh jajaran Kemhan pada kesempatan tersebut

antara lain; untuk meningkatkan kerjasama, kolaborasi, koordinasi dan sinergi guna memastikan terlaksananya program kerja tahun 2021 secara baik dan efektif, melaksanakan evaluasi dan perbaikan di seluruh jajaran satuan kerja Kemhan.

Agenda hari ke-1 pada Rapim Kemhan Tahun 2021 meliputi, penyampaian capaian dan kerja yang telah dilaksanakan oleh Kemhan sebagai refleksi satu tahun kinerja di bidang penyelenggaraan kebijakan pertahanan negara pada Kabinet Indonesia Maju.

Paparan Refleksi/Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Seluruh Satuan Kerja Kemhan Tahun Anggaran 2020 disampaikan oleh Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana S.I.P.,M.M., dan Paparan Pelaksanaan Pembangunan Pertahanan pada aspek Sumber Daya Manusia dan Teknologi oleh Rektor Universitas Pertahanan Laksdya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR. Selanjutnya, penyampaian paparan mengenai proyeksi dan kebijakan pertahanan negara Tahun 2021 oleh Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Dr. rer. pol. Rodon Pedrason, M.A.

Sedangkan Agenda Rapim Kemhan Tahun 2021 hari ke-2 menghadirkan sejumlah nara sumber baik secara langsung maupun virtual antara lain Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Ka Bappenas, Ketua BPK dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan hari kedua tersebut dihadiri oleh Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa yang sekaligus mewakili Panglima TNI, Kasal, Laksamana TNI Yudo

# dan Keamanan Yang Kuat, Indonesia Tangguh”



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Margono, Kasau, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Sekjen Kemhan, Marsdyia TNI Donny Ermawan Taufanto, serta beberapa pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI.

Agenda Rapim Kemhan Tahun 2021 diakhiri dengan penyerahan dokumen pedoman – pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara kedepan oleh Menhan kepada masing – masing Unit Organiasasi dalam hal ini diterima oleh Panglima TNI yang diwakili Kasad, Kepala Staf Angkatan dan Sekjen Kemhan.

Pedoman – pedoman penyelenggaraan pertahanan negara tersebut meliputi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2020 – 2024, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3

tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Pegara, Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021 dan Amanat Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Menteri Pertahanan saat menyampaikan sambutan pembukaannya mengungkapkan bahwa tugas Kemhan yakni menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, semua usaha penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan.

Sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan rakyat semestinya yang mengandalkan semua kekuatan komponen sumber daya yang dimiliki untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sejalan dengan itu, tema yang diambil pada Rapim Kemhan Tahun 2021 yakni "Kemandirian Pertahanan dan Keamanan Yang Kuat, Mewujudkan Indonesia Tangguh", yang mengandung makna bahwa seluruh komponen bangsa harus bersatu untuk tetap menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di masa depan.

Dengan tetap bersatu, pertahanan dan keamanan tentunya akan semakin kuat dan Indonesia semakin tangguh", ungkap Menhan.

Lebih lanjut Menhan mengungkapkan, bahwa dinamika perkembangan lingkungan strategis telah menciptakan spektrum ancaman, tantangan dan resiko yang kompleks. Perkembangan lingkungan strategis juga senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman dan tantangan terhadap pertahanan negara. Kompleksitas ancaman tersebut perlu dipahami dan dimengerti oleh segenap unsur pertahanan negara.

Untuk itu, Kemhan terus mengembangkan strategi dan kebijakan pertahanan negara serta implementasinya. Kemhan terus melakukan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

perumusan kebijakan pertahanan negara sesuai prediksi ancaman, doktrin pertahanan negara, kondisi geografis negara Indonesia serta kebijakan negara dalam mendukung kepentingan nasional.

Atas dasar keempat aspek tersebut, beberapa kebijakan pokok pertahanan negara tahun 2021 meliputi Melanjutkan penanganan pandemi Covid-19, Penyiapan Sumber Daya Manusia Pertahanan Negara, Penguatan fungsi pembinaan sumber daya pertahanan dan pembangunan cadangan logistik nasional, Melanjutkan pembangunan postur TNI untuk pemenuhan kekuatan pokok, Pembentukan komponen cadangan, Penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan, Penguatan pertahanan di wilayah - wilayah selat strategis, Pengembangan industri pertahanan nasional dan Pembangunan wilayah pertahanan.

Sedangkan untuk program prioritas Kemhan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024

meliputi, revolusi mental ideologi Pancasila, pembangunan wilayah Kalimantan serta menjaga stabilitas keamanan nasional.

Untuk mewujudkan program prioritas tersebut,diantaranya dengan mengupayakan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Hal ini bertujuan mentransformasikan sumber daya nasional melalui bela negara, pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung.

#### Kemhan Lanjutkan Penanganan Covid-19

Dari sembilan kebijakan pokok pertahanan negara Tahun 2021 yang telah disampaikan Menhan pada Rapim Kemhan 2021, salah satu yang pertama adalah Melanjutkan penanganan pandemi Covid-19.

Kebijakan Kemhan dalam melanjutkan penanganan Covid-19 ini sejalan dengan kebijakan Presiden RI, dimana disampaikan pemerintah akan

melanjutkan program-program yang telah terlaksana dengan baik pada 2020 untuk dilakukan pada 2021. Jokowi menekankan program penanganan pandemi Covid-19 dan pemberian bantuan sosial ( bansos) akan berlanjut.

Seperti diketahui, pada tahun 2020 seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami masa pandemi virus corona (Covid-19). Tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, pandemi juga menyebabkan krisis ekonomi. Memasuki awal 2021 sepertinya bisa dibilang pandemi belum akan selesai. Oleh karena itu, Kemhan perlu upaya pengendalian kasus Covid-19.

"Selain untuk mendukung proyek prioritas nasional, pemeliharaan dan pengadaan Alutsista TNI Tahun Anggaran 2021 dan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS pada Alokasi Anggaran Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2021 diantaranya juga dialokasikan untuk mengantisipasi masih berlanjutnya penanganan pandemi Covid-19", ungkap Menhan.

Menhan lebih lanjut mengungkapkan, upaya Kemhan dalam turut serta penanganan Covid-19 yakni melalui peningkatan kapasitas pertahanan berupa sarana prasarana serta layanan kesehatan Rumah Sakit Kemhan dan TNI.\*\*\*



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., mengikuti video conference Indian Ocean Region (IOR) Defence Minister Conclave.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Kamis (4/2) mewakili Menhan RI menjadi pembicara kunci dalam *Indian Ocean Region (IOR) Defence Minister Conclave* yang diikuti oleh 26 negara sahabat, secara video conference di Kemhan, Jakarta.

Menhan RI dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wamenhan RI menekankan, bahwa pertemuan ini amat penting sebagai upaya meningkatkan kerjasama dalam menjaga perdamaian

dan keamanan di antara negara-negara di kawasan Samudera Hindia, demi kepentingan bersama terutama karena peningkatan kompleksitas tantangan dan ancaman yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik saat ini dan di masa depan.

"Menjalin kerjasama yang erat dan saling memberikan kontribusi positif bagi stabilitas keamanan kawasan melalui kerjasama pertahanan dan keamanan, adalah hal yang sangat penting, dan forum *IOR Defence Minister Conclave* ini merupakan forum yang strategis untuk membicarakan kerjasama pertahanan kawasan tersebut", kata Menhan.

# KERJASAMA PERTAHANAN NEGARA KAWASAN SAMUDERA HINDIA SANGAT PENTING UNTUK HADAPI TANTANGAN MASA DEPAN

Samudera Hindia merupakan samudera terbesar ketiga dan termasuk diantara jalur komunikasi laut terpenting di dunia, serta menjadi jalur penting bagi perdagangan dan transportasi internasional.

Selain itu, negara-negara di Kawasan Samudera Hindia adalah rumah bagi sekitar 2,7 miliar orang atau sekitar 35% dari populasi dunia dengan keanekaragaman budaya, sumber daya alam yang melimpah dan potensi ekonomi serta signifikansi geopolitik.

Hal lainnya yang disampaikan Menhan RI adalah mengenai pandemi covid-19 yang menggoyahkan kemampuan ekonomi negara-negara di kawasan ini dan harus dihadapi bersama-sama.

Karenanya, peningkatan kesejahteraan negara-negara di kawasan, sangat tergantung pada perdamaian dan keamanan kawasan. Forum yang berlangsung secara virtual tersebut, dihadiri Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Dr. rer. pol. Rodon Pedrason, M.A., serta Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI J. Binsar Parluhutan, S.\*\*\*

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M.



# WAMENHAN KUNJUNGAN KERJA KE KASAL



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., melaksanakan kunjungan kerja ke Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., Senin (8/2) di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur.

Kunjungan kerja ini merupakan silaturahmi serta perkenalan sebagai Wamenhan, setelah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo pada Bulan Desember 2020 lalu. Melalui kunjungan kerja ini, Wamenhan berharap dapat semakin mempererat kerjasama antar intansi, mempermudah komunikasi serta menyatukan visi dan persepsi.

Menyambut kunjungan kerja tersebut, Kasal menyampaikan ucapan selamat kepada Muhammad Herindra, M.A., atas pelantikannya sebagai Wamenhan.

Turut hadir mendampingi Wamenhan dalam kunjungan kerja ke Mabesal, Dirjen Renhan Kemhan Mayjen TNI Budi Priyono dan Dirjen Kuathan Kemhan Marsda TNI N. Ponang Djawoto.

Sementara itu, Kasal didampingi Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono, S.E., M.M., dan Asrena Kasal Laksda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M.

# RAPIM UO KEMHAN TAHUN FORUM EVALUASI DAN

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S membuka Rapim UO Kemhan tahun 2021



# 2021 SEBAGAI PENYAMPAIAN KEBIJAKAN PIMPINAN



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melaksanakan Rapat Pimpinan Unit Organisasi Kemhan tahun 2021 yang dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto M.D.S didampingi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana S.I.P., M.M., dan Rektor Universitas Pertahanan Laksdya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR, Rabu (27/1) di Ruang Rapat Urip S. Kemhan, Jakarta.

Dalam sambutan pembukaannya, Sekjen Kemhan menjelaskan bahwa Rapim UO Kemhan tahun 2021 ini, diharapkan dapat menjadi forum penyampaian evaluasi program dan anggaran UO Kemhan Tahun 2020 serta penyampaian kebijakan pimpinan Tahun 2021.

Tema Rapim UO Kemhan tahun ini "Membangun Kinerja Yang Berkarakter Guna Mendukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan Yang Kuat", dimaksudkan untuk mengajak seluruh pejabat pengambil keputusan di lingkungan Kemhan untuk turut serta dalam membangun kinerja organisasi maupun pegawai agar terus profesional dan berkarakter dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pertahanan negara.

Sekjen Kemhan juga menjelaskan bahwa Kemhan terus meningkatkan program pembangunan SDM pertahanan negara kepada seluruh pegawai dan prajurit TNI guna menciptakan budaya kerja dan meningkatkan profesionalisme serta disiplin kerja, sehingga kinerja Kemhan akan semakin baik.

Beberapa penekanan Sekjen Kemhan kepada para pimpinan satker Kemhan antara lain; menghindari pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan anggaran yang akan berakibat timbulnya pemborosan anggaran,

dan perlunya terobosan sebagai upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal, dihadapkan pada Pandemi Covid-19 yang sampai dengan saat ini belum memberikan indikasi segera berakhir. Selanjutnya, Sekjen juga menekankan mengenai upaya menuntaskan berbagai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai dampak dari kebijakan refocusing dan realokasi anggaran.

Sekjen juga mengharapkan pada tahun 2021 seluruh kegiatan program dan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan pelaksanaan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sesuai dengan ketentuan sehingga pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang akan datang menjadi lebih baik.

Dalam Rapim UO Kemhan ini disampaikan pula atensi terhadap kinerja UO Kemhan Tahun 2020 oleh Irjen Kemhan, penyampaian program kerja dan anggaran UO Kemhan Tahun 2021 oleh Karorenku Setjen Kemhan Brigjen TNI Amad Sugiyono, S.E.,M.M., serta penyampaian tentang peningkatan kinerja dan tata kelola manajemen di Kemhan oleh Karo Ortala Setjen Kemhan Brigjen TNI Antonius Bambang Budi

Wibowo. Dirkes Ditjen Kuathan Laksma TNI Dr. Arie Zakaria, Sp.OT, Sp.KL juga memberikan paparan mengenai situasi terkini pandemi Covid-19 dan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Pertahanan.

Narasumber yang menjadi pembicara dalam Rapim UO Kemhan kali ini adalah dari Dirjen Anggaran bidang Polhukam dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan Dr Dwi Pujiastuti Handayani, M.Si., yang dilaksanakan secara video conference, membahas tentang implementasi 5 (lima) instruksi Presiden mengenai vaksin covid-19 100% gratis kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam Rapim UO Kemhan ini dilaksanakan penyerahan PPPA UO Kemhan Tahun 2021 dan secara berjenjang Perjanjian Kinerja (PK) dari Eselon IV ke Eselon III, Eselon III ke Eselon II, Eselon II ke Eselon I, dan Eselon I kepada Sekjen Kemhan. Penyerahan dan penerimaan PPPA serta Perjanjian Kinerja (PK) tersebut, dilaksanakan secara simbolis dari perwakilan Satker Kemhan. Hadir sebagai peserta dalam Rapim UO Kemhan ini Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan, Pejabat Mabes TNI/Angkatan, dan Pejabat KKIP. \*\*\*



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdy TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pusat Rehabilitasi Kemhan dan Rumah Sakit dr. Suyoto dan disambut langsung oleh Kapusrehab Kemhan Brigjen TNI dr. Nana Sarnadi, Sp. OG., M.M.R.S



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

# SEKJEN KEMHAN MELAKSANAKAN KUNJUNGAN KERJA KE PUSREHAB KEMHAN DAN RS DR. SUYOTO

23

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pusat Rehabilitasi Kemhan dan Rumah Sakit dr. Suyoto dan disambut langsung oleh Kapusrehab Kemhan Brigjen TNI dr. Nana Sarnadi, Sp. OG., M.M.R.S, Selasa (19/1) di Aula Pusrehab Kemhan Jakarta.

Berdasarkan Permenhan No. 14 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan, Pusat Rehabilitasi selanjutnya disebut Pusrehab berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen.

Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Brigjen TNI dr. Nana Sarnadi, Sp. OG., M.M.R.S dalam paparannya menyampaikan Program Kerja Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan sesuai Kep Menhan Nomor : Kep/365/M/IX/2019 Tanggal 11 September 2019 yaitu menyelenggarakan Rehabilitasi Medik Paripurna *Return To Combat* bagi Penyandang Disabilitas Personil TNI dan menyelenggarakan

Rehabilitas Terpadu *Return To Duty* bagi Penyandang Disabilitas Personil TNI dan PNS Kemhan.

Lebih lanjut Kapusrehab Kemhan menyampaikan bahwa Rehabilitasi Sosial merupakan upaya mengembalikan psikis dan sosial penyandang disabilitas agar dapat memulihkan kepercayaan diri dan mampu melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kapusrehab juga menyampaikan Peserta Rehabilitasi Terpadu *Return To Duty* Angkatan XLV Gelombang II Tahun TA. 2020 berjumlah 30 Orang terdiri dari TNI AD 24 Orang, TNI AL 4 Orang dan TNI AU 2 Orang sedangkan Peserta Rehabilitasi Medik Paripurna *Return To Combat* Angkatan I TA. 2020 berjumlah 10 Orang dari TNI AD.

Diakhir Kunjungan Kerja Sekjen Kemhan melaksanakan peninjauan ke beberapa tempat, seperti ruang Isolasi para pasien yang terkena Covid 19, Barak Remaja RS dr. Suyoto, kunjungan ke para siswa penyandang disabilitas dan meninjau ruang terapi yang ada di RS dr. Suyoto\*\*\*



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., melaksanakan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

# SEKJEN KEMHAN KUNJUNGAN KE RSUD CENGKARENG UNTUK STUDI BANDING PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT DR. SUYOTO

25

**S**ekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., melaksanakan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Selasa (2/2) di Jalan Kamal Raya Bumi Cengkareng Indah, Jakarta Barat.

Kunjungan ini dimaksudkan dalam rangka studi banding, saling sharing dan berbagi pengalaman dengan pihak RSUD Cengkareng terkait dengan rencana peningkatan dan pengembangan Rumah Sakit dr. Suyoto Pusrehab Kemhan.

Kunjungan Sekjen Kemhan yang juga didampingi beberapa pejabat Kemhan tersebut disambut dan diterima oleh Dirut RSUD Cengkareng drg. Bambang Suheri, MAP.

Kunjungan didahului dengan kata sambutan oleh Dirut RSUD Cengkareng yang juga menjelaskan profile Dirut RSUD Cengkareng, sambutan Sekjen Kemhan, dilanjutkan tanya jawab dan diakhiri dengan peninjauan fasilitas rumah sakit yang ada di RSUD Cengkareng.

"Maksud tujuan kami melaksanakan kunjungan ini adalah intinya kami ingin mendapatkan gambaran, pengetahuan dari bapak Direktur dan Staff terkait Rumah Sakit Cengkareng", ungkap Sekjen Kemhan dalam sambutannya saat diterima Dirut dan jajaran RSUD Cengkareng.

Sekjen Kemhan lebih lanjut menjelaskan, Kemhan berencana akan mengembangkan dan meningkatkan Rumah Sakit dr. Suyoto Pusrehab Kemhan yang berada di Bintaro, Jakarta Selatan. Selain berfungsi sebagai rumah sakit, dan juga sebagai Pusat Rehabilitasi medis, kedepan Rumah Sakit dr Suyoto diharapkan juga berfungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

"Ada informasi Rumah Sakit Cengkareng juga demikian, makanya tidak ada salahnya kalau kami meninjau sebagai referensi Kemhan dalam peningkatan Rumah Sakit dr. Suyoto. Selain itu, melalui kunjungan ini juga diharapkan akan mendapatkan informasi, pengetahuan terkait dengan penanganan Covid-19", tambah Sekjen Kemhan.

Sementara itu, menyambut kunjungan tersebut, Dirut RSUD Cengkareng menyampaikan apresiasi atas kunjungan Sekjen Kemhan dan jajarannya. Kunjungan Kemhan ini menjadi suatu kehormatan bagi seluruh jajaran RSUD Cengkareng.\*\*\*

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., melaksanakan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

# MENHAN RI PIMPIN *ENTRY MEETING* PEMERIKSAAN PELAPORAN KEUANGAN KEMHAN/TNI TA 2020

Menhan RI Prabowo Subianto memimpin pelaksanaan *Entry Meeting* pemeriksaan pelaporan keuangan Kemhan TNI 2020



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

**M**enteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Rabu (17/2), memimpin Entry Meeting (Taklimat Awal) Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2020 pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, oleh BPK RI di Kemhan, Jakarta. Dalam acara ini, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Dr. Hendra Susanto, S.T., M. Eng., M.H., CSFA., CfrA, menyerahkan Surat Tugas dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Menhan.

Dalam sambutannya, Menhan menekankan kepada Kasatker/Kasubsatker baik di lingkungan UO Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, AL dan AU, untuk menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI, sehingga Tim Pemeriksa dapat menilai bahwa institusi Kemhan/TNI telah sesuai kriteria penyusunan laporan keuangan. Menhan berharap, hasil kegiatan selama tahun 2020 yang dihadapkan dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran, dapat tersaji dalam laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI tahun 2020 serta dapat mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang telah diterima Kemhan dan TNI terhadap laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 lalu.

Sesuai amanat Undang-Undang No 15 Tahun 2006 BPK RI bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh laporan keuangan Kementerian/Lembaga termasuk diantaranya adalah Laporan Keuangan Kemhan/TNI. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat sejauh mana penyusunan laporan keuangan disusun dihadapkan pada empat kriteria yaitu, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Sistem Pengendalian Intern.

Setelah pelaksanaan entry meeting ini, Tim Pemeriksa BPK RI akan melanjutkan kegiatan

pemeriksaan sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 di setiap UO. Selain itu, Tim Pemeriksa BPK RI sebagai pengembang fungsi audit dan jajaran UO Kemhan, Mabes TNI, AD, AL, dan AU, dapat bersinergi saling bahu-membahu dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel. Karenanya, Menhan berpesan kepada para pejabat di lingkungan UO agar kooperatif dalam menyajikan data dukung maupun informasi yang dibutuhkan dan berkoordinasi serta melakukan rekonsiliasi yang ketat dari satker terkecil sampai dengan tingkat eselon, untuk meminimalisir terjadinya selisih data dan mencari solusi terbaik dalam pemecahannya.

Hadir dalam Taklimat Awal Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2020 UO Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan ini Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa, S.E., M.A., M.Sc., M.P.P., Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono S.E., M.M., dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., Wamenhan, Letjen TNI M. Herindra, Sekjen Kemhan Marsdyia TNI Donny Ermawan Taufanto., M.D.S, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana S.I.P., M.M., Rektor Unhan Laksdyia TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr. (Han), serta para pejabat Eselon I Kemhan.

Sementara itu Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Dr. Hendra Susanto, S.T., M. Eng., M.H., CSFA., CfrA, yang hadir didampingi oleh Auditor Utama KN I BPK Novy Gregory Antonius Pelenkuhi, dalam sambutannya menjelaskan, bahwa Taklimat awal atau entry meeting adalah salah satu bentuk komunikasi antara pemeriksa dan entitas, agar tercipta kesamaan persepsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan pelaporan keuangan.

"Diharapkan, Kemhan dan TNI semakin meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan

keuangan Negara. BPK berharap adanya dukungan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa, karena itu komunikasi yang aktif dan efektif antara Tim Pemeriksa dan entitas dalam berbagai pilihan media komunikasi, sangatlah penting agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan lancar,” ujar Hendra Susanto.

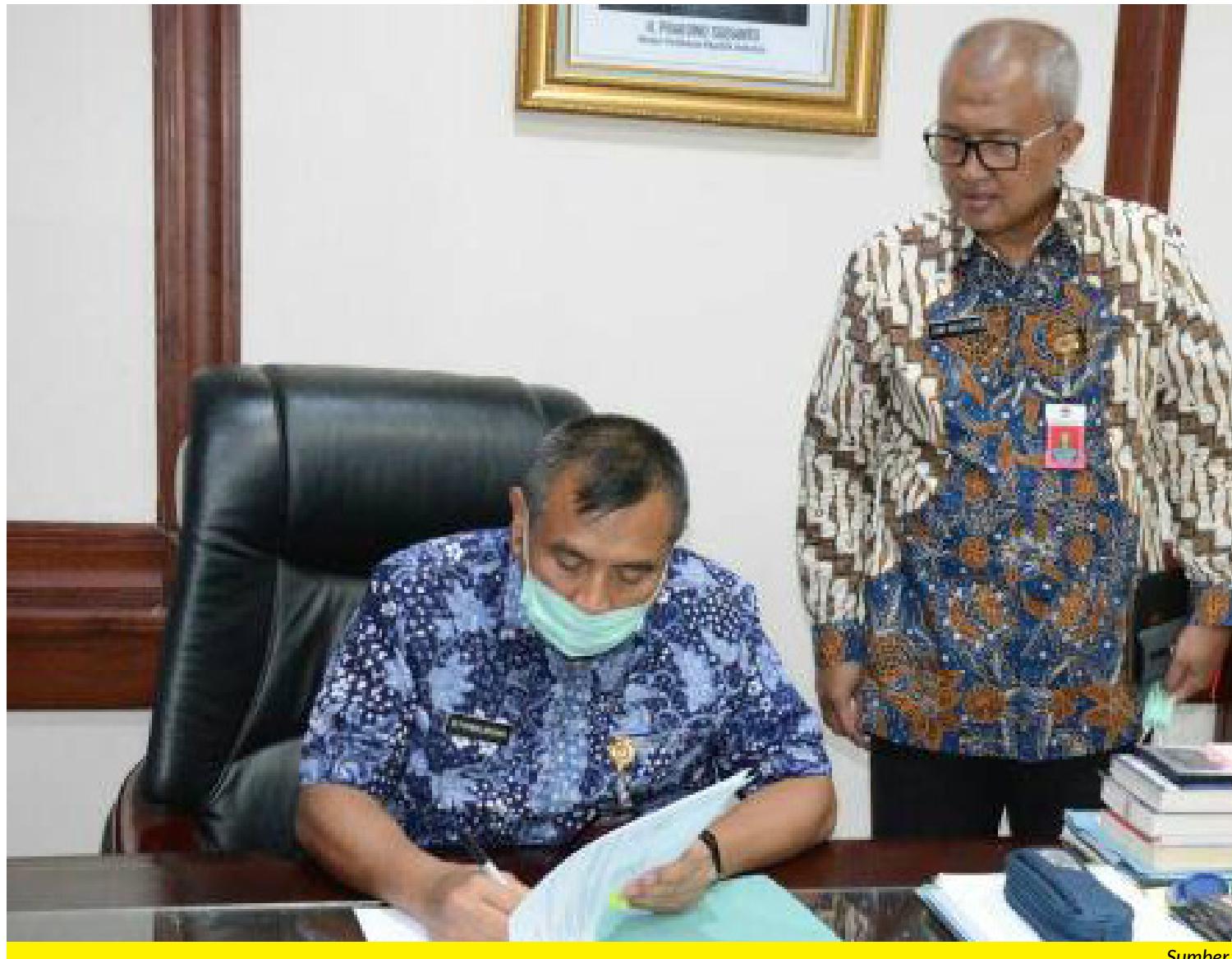
Sedangkan Ketua Tim Pemeriksa BPK, juga menekankan beberapa perhatian dalam laporan keuangan UO tahun 2020, karena Laporan Keuangan Kemhan/TNI sangat penting bagi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara keseluruhan, mengingat jumlah anggaran yang besar sehingga menjadi barometer terhadap keberhasilan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara keseluruhan. Ditekankan pula, bahwa Opini WTP yang telah diterima Kemhan/TNI dalam 3 tahun terakhir adalah manifestasi dari kerja keras Kemhan dan UO yang termasuk di dalamnya.

Sekjen Kemhan Marsdy TNI Donny Ermawan Taufanto., M.D.S, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana S.I.P., M.M., usai acara taklimat awal BPK RI.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK juga menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan telah berperan aktif mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemerintah. Dukungan tersebut diberikan dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki di antaranya 110 rumah sakit di lingkungan TNI, penggunaan KRI, pesawat, dan kendaraan darat yang dimiliki TNI. Selain itu Kementerian Pertahanan merealisasikan anggaran untuk penyiapan dan perekutan, bimbingan teknis dan penugasan 300 relawan Komponen Pendukung Pertahanan Negara (Komduk Hanneg) Bidang Kesehatan. Hal tersebut menunjukkan upaya dari Kementerian Pertahanan untuk berperan membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya) yang sangat dibutuhkan untuk penanganan Covid-19.\*\*\*



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber

**S**ekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan (Ses Itjen Kemhan) Brigjen TNI Dwi Mastono, S.E., M.M. memimpin langsung acara penandatanganan Perjanjian Kinerja Itjen Kemhan Tahun 2021 di Ruang Rapat Lantai II Gedung Gatot Subroto Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (8/1).

Kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja Itjen Kemhan Tahun 2021 ini dilaksanakan oleh pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Itjen Kemhan dengan mengambil tema "Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada Hasil".

# PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA ITJEN KEMHAN TA 2021



foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Dalam sambutannya Ses Itjen Kemhan menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada tanggal 8 Januari 2021, Itjen Kemhan melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja di lingkungan Itjen Kemhan, yang akan ditandatangani oleh pejabat struktural mulai dari pejabat eselon I sampai IV.

"Penandatanganan perjanjian kinerja ini adalah sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revisi atas laporan kinerja instansi pemerintah".

Lebih lanjut Ses Itjen mengatakan tujuan penyusunan perjanjian kinerja ini adalah pertama sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Kedua menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, ketiga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Keempat sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah dan kelima sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.\*\*\*

# Unhan beserta Kedubes Inggris

## *Managing Defense in a Wider*

**U**niversitas Pertahanan (Unhan) bekerjasama dengan Kedutaan Besar Inggris melaksanakan *Short Course on Managing Defense in a Wider Security Context (MDWSC)* TA. 2021, selama lima hari, 1 s.d 5 Februari 2021. Bertempat di Hotel Mandarin Jakarta melalui daring. Senin, (1/2). Pembukaan kursus diawali sambutan Duta besar Kerajaan Inggris Owen Jenkins, dan *Keynote Speaker* Menhan RI H. Prabowo Subianto yang diwakili Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra didampingi Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR, CIQaR., IPU serta Sekretaris Pertama Pertahanan dan Keamanan Kedutaan Kerajaan Inggris Christian Ayres.

Kursus singkat ini meghadirkan beberapa narasumber, diantaranya pada hari pertama dan kedua oleh Dr Gemma Colantes Celador dengan mengangkat topik *Conceptualising Security at the Global, Regional and National levels* dan Lt Col Darren Hughes dengan topik *The Strategic Context* dan topik *Policy Formulation, Implementation and Review (to include the political direction of defence and security)* dan topik *Strategy and strategy Development (Lecture) (part of the political direction of defence and security)*.

Memasuki hari ketiga Lt Col Darren Hughes kembali tampil untuk membahas topik *Strategic Communications* dan Dr John McCormack topik *Operationalising Strategy (to include defence management/challenges and performance measurement)*.

Sedangkan pada hari keempat Dr Gemma Collantes Celador menyampaikan topik pembahasan tentang *Governance of the Security Sector* serta Dr John McCormack dengan topik *Risk Management*. Sementara itu pada hari kelima menghadirkan narasumber Dr Gemma Collantes Celador topik *Civil-Military, Civil-Security Relations (to include relative roles)*.

Dalam *Keynote Speaker* Menhan RI yang dibacakan oleh Wakil Menhan RI menyampaikan kursus singkat *Managing Defense in a Wider Security Context (MDWSC)* sebuah program hasil kerja sama bilateral antara Kemhan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Inggris Raya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Atase Pertahanan Kerajaan Inggris Raya di Jakarta.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan baik antara kedua Kementerian Pertahanan terjalin dengan sangat erat, yang didasari prinsip saling menghormati dan saling memberi manfaat pada setiap kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama.

Tujuan *the short course on managing defence in a wider security context (MDWSC)* adalah untuk meningkatkan kapasitas perwira TNI dan aparatur terkait keamanan serta meningkatkan kerja sama antara Kementerian Pertahanan Indonesia, Kementerian Pertahanan Kerajaan Inggris Raya, Universitas Pertahanan dan Cranfield University.

Kursus singkat ini juga merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Unhan dengan Cranfield University yang diikuti oleh 50 peserta kursus diantaranya

# Laksanakan Short Course on Security Contex (MDWSC)



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

dari Kemhan, Unhan, Mabes TNI dan Angkatan, Kementerian/Lembaga antara lain Kemenpolhukam, Kemenlu, Kemendagri, Kemendikbud, Kemen KKP, BIN, BNN, BSSN, BNPT, BNPP, BNPB, Bakamla, BPPT, Wantanas, Lemhanas, Lemdiklat Polri, LIPI, Pemprov DKI, Pemprov Bogor dan KPK.

Pejabat Unhan yang hadir pada saat pembukaan adalah Warek I Unhan Mayjen TNI Dr. Jonni Mahroza,

S.I.P., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR, Warek III Unhan Laksda TNI Benny Rijanto Rudy S., M.B.A., Dekan FMP Unhan Laksma TNI Dr. Kasih Prihantoro, S.E., M.M., M.Tr.(Han), Wadek FKN Unhan Laksma TNI Dr. Endro Legowo, S.E., M.A.P dan Wadek FMP Marsma TNI Anton Iman Santosa, S.E., MMgtStud., M.Si (Han)., CIQaR sekaligus merangkap sebagai ketua panitia.\*\*\*



Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., menandatangani buku Berita Acara sah terima jabatan Karo Humas Stjen Kemhan

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

## JABATAN KEPALA BIRO HUMAS SETJEN KEMHAN DI SERAHTERIMAKAN

Jabatan Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Karo Humas Setjen Kemhan), Jumat (5/3), di Kantor Kemhan, Jakarta secara resmi diserahterimakan dari Brigjen TNI I.E. Djoko Purwanto, S.E., M.M., kepada Marsma TNI Penny Radjendra, S.T., M. Sc., M.Sc. Acara serah terima dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdyo TNI Donny Ermawan, T, M.D.S..

Pejabat baru Karo Humas Setjen Kemhan Marsma TNI Penny Radjendra, S.T., M. Sc., M.Sc., sebelumnya menjabat sebagai Kapusinfostrahan Bainstrahan Kemhan. Sementara itu, Brigjen TNI I.E. Djoko

Purwanto, S.E., M.M., menggembangkan tugas jabatan barunya sebagai Kapusinfostrahan Bainstrahan Kemhan.

Pada waktu yang bersamaan, juga dilaksanakan Pelantikan dan Sertijab Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan (Karo Turdang) Setjen Kemhan. Brigjen TNI Jamaruba Silaban sebagai pejabat Karo Turdang Setjen Kemhan yang lama diangkat menjadi Dosen Tetap Unhan. Sedangkan penggantinya adalah Kolonel Sus Muhammad Idri, yang sebelumnya menjabat Kabag Perancangan dan Harmonisasi I Roturdang Setjen Kemhan kemudian dilantik menjadi Karo Turdang Setjen Kemhan.

Sertijab yang digelar secara sederhana di Ruang Kerja Sekjen Kemhan, ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima yang dihadiri oleh Karo peg Setjen Kemhan dan Karo um Setjen Kemhan. Selain itu Kegiatan Sertijab tersebut juga tetap memperhatikan ketentuan Protokol Kesehatan ditengah pandemi Covid-19.

Kegiatan serah terima jabatan ini mengandung makna penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kemhan. Kegiatan ini disamping bagian dan rangkaian pembinaan personel di lingkungan Kemhan juga dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pertahanan negara.

Dari aspek pembinaan personel, pergeseran jabatan memberikan pelajaran dan pengalaman penugasan yang beragam serta berjenjang sebagai bekal menyukseskan pelaksanaan kebijakan dan tugas pokok Kemhan.

#### Pisah Sambut Karo Humas Setjen Kemhan

Usai mengikuti serah terima jabatan di hadapan Sekjen Kemhan, Marsma TNI Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc., sebagai Karohumas yang baru dengan didampingi, Brigjen TNI I.E. Djoko Purwanto, S.E., M.M., melaksanakan acara pisah sambut dengan warga Biro Humas Setjen Kemhan.

Dengan dibalut suasana kekeluargaan yang hangat, kedua pejabat saling menyampaikan kesan dan pesan ataupun sambutan kepada warga Biro Humas Setjen Kemhan.

Dalam kesempatan pisah sambut tersebut, Brigjen TNI I.E. Djoko Purwanto, S.E., M.M., mengucapkan terimakasih atas segala bentuk kerjasama dari seluruh anggota

Birohumas yang telah dilaksanakan selama beliau menjabat Karohumas Setjen Kemhan.

Sementara itu sebagai Karohumas yang baru, Marsma TNI Penny Radjendra, S.T., M. Sc., M.Sc., mengharapkan dukungan, partisipasi dan kerjasamanya dari pejabat eselon III dan eselon IV hingga seluruh warga Biro Humas dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedepannya.\*\*\*



*Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan*



# KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020 - 2024

36

Oleh: Kolonel Adm Agung Karyanto, S.Sos., M.Si.

Kasubdit Penyusunan Kebijakan Dasar Pertahanan Negara Ditjakstra Ditjen Strahan Kemhan

Presiden telah menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) Tahun 2020-2024 melalui Perpres Nomor 8 Tahun 2021. Kebijakan ini sudah lama dinantikan khususnya oleh Kementerian/Lembaga selaku pemangku kepentingan bidang pertahanan. Meskipun terkesan terlambat, oleh karena baru disahkan pada awal tahun 2021, namun dengan hadirnya Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 memberikan angin segar bagi kepastian hukum keberlanjutan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Beberapa kebijakan sebagai turunan dari kebijakan umum pertahanan negara sempat tertunda dengan belum ditetapkannya Jakum Hanneg, diantaranya kebijakan penyelenggaraan negara dan kebijakan dalam perencanaan strategis pertahanan negara. Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut dijadikan rujukan, khususnya bagi Kementerian Pertahanan dan TNI dalam merumuskan program kebijakan pada pertahanan militer dan kementerian/lembaga lainnya dalam merumuskan kebijakan pertahanan nirmiliter.

Secara garis besar Jakum Hanneg terdiri atas dua bagian utama, yakni bagian batang tubuh terdiri atas 7 pasal dan bagian isi kebijakan berupa lampiran yang mendeskripsikan pokok kebijakan pertahanan negara tahun 2020-2024. Pembahasan pada lampiran terdiri atas: analisis perkembangan lingkungan strategis yang menghasilkan prediksi ancaman untuk masa lima tahun mendatang, landasan Jakum Haneg terdiri atas landasan historis, yuridis, dan landasan konseptual, dan diakhiri dengan pembahasan inti berupa pokok kebijakan pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter.

Dari aspek sub pembahasan landasan Jakum Hanneg 2020-2024 menyiratkan bahwa Jakum Hanneg 2020-2024 dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu : prediksi ancaman pertahanan negara yang akan dihadapi; kondisi geografis negara Indonesia yang ditunjukkan dengan penuangan geopolitik dan geostrategi sebagai salah satu landasan; doktrin pertahanan negara melalui landasan historis; serta arah dan

kebijakan politik negara berupa tujuan nasional dan kepentingan nasional.

Aspek perkembangan lingkungan strategis dijelaskan mulai dari perkembangan lingkungan global, regional, dan nasional. Analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis memunculkan tantangan prediksi ancaman yang terbagi menjadi dua bentuk ancaman, yakni ancaman aktual dan potensial. Ancaman aktual dimaknai sebagai ancaman yang sedang berkembang saat ini dan kemungkinan akan terus terjadi untuk masa mendatang. Sementara itu ancaman potensial diartikan sebagai ancaman yang belum terjadi namun sewaktu-waktu dapat terjadi dan dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual.

Beberapa ancaman aktual untuk lima tahun mendatang diantaranya: pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan dan penyanderaan warga negara Indonesia, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologikal, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan, pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta dampak lahirnya revolusi Industri 4.0. Adapun ancaman yang dinilai potensial berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), ancaman senjata nuklir, krisis ekonomi, ancaman pandemi, dan imigran asing.

Dari beberapa ancaman yang diprediksi akan terjadi di masa mendatang memberikan gambaran bahwa ancaman nirmiliter menjadi ancaman yang secara aktual mendominasi. Meskipun demikian, ancaman militer berupa konflik terbuka (invasi asing) yang dikategorikan ancaman potensial menjadi penekanan tersendiri oleh karena dampak ancaman yang signifikan terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.

Beberapa landasan yang digunakan dalam Jakum Hanneg terdiri atas landasan historis, yuridis, dan konsepsional. Landasan historis

terkait dengan sejarah perjuangan bangsa dalam melawan imperialisme dan kolonialisme. Dalam perjuangan tersebut menemukan titik kulminasi yang disimbulkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Titik keberhasilan perjuangan diawali sejak munculnya kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa serta mengikutsertakan seluruh rakyat dalam perjuangan. Historisitas inilah yang melandasai doktrin pertahanan negara, Sishankamrata.

Dua peraturan hukum yang dijadikan landasan yuridis Jakum Hanneg, yakni UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keduanya mempertegas dari aspek hukum terkait Sishankamrata. Sedangkan landasan konseptual terdiri dari: penyelenggaraan pertahanan negara; geopolitik dan geostrategi; tujuan nasional; dan kepentingan nasional. Keempat landasan konseptual ini memberikan gambaran bahwa aspek geografis dan arah kebijakan politik negara berupa tujuan dan kepentingan nasional menjadi perhatian dan arah yang akan dicapai dalam Jakum Hanneg.

Satu hal yang secara signifikan membedakan Jakum Hanneg 2020-2024 dibandingkan dengan Jakum Hanneg sebelumnya, yaitu disamping materi kebijakan, terletak pada desain dalam pembahasan pokok kebijakan umum pertahanan negara. Desain Jakum Hanneg pada tahun-tahun sebelumnya, pokok kebijakan umum pertahanan negara dituliskan dalam satu sub pembahasan. Sedangkan pada Jakum Hanneg 2020-2024, pokok kebijakan pertahanan negara terbagi menjadi dua, yaitu pokok kebijakan umum pertahanan militer dan pokok kebijakan umum pertahanan nirmiliter.

Desain ini dirancang untuk menjawab permasalahan implementasi pada Jakum Hanneg sebelumnya. Merujuk hasil strategic defence review terhadap Jakum Hanneg 2015-2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, diantaranya menyimpulkan bahwa permasalahan utama implementasi Jakum Hanneg 2015-2019 terletak pada ketidakjelasan pelaksanaan program kebijakan, khususnya bagi Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan dalam menyelenggarakan pertahanan nirmiliter. Oleh karena itu secara tegas

penyelenggaraan pertahanan nirmiliter menjadi sub bab tersendiri dalam isi Jakum Hanneg 2020-2024.

Secara umum pokok kebijakan pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter terbagi ke dalam enam kebijakan, terdiri atas: kebijakan pembangunan, pembinaan kemampuan, pengerahan, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk kebijakan pertahanan nirmiliter ditambahkan satu kebijakan terkait dengan kebijakan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter. Kebijakan pertahanan militer yang meliputi Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung diarahkan pada terbangunnya pertahanan negara yang modern, TNI profesional, terlaksananya adopsi dan inovasi teknologi alat utama sistem senjata (alutsista), meningkatnya kemandirian industri pertahanan, serta mendorong penganggaran dan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Sedangkan kebijakan pertahanan nirmiliter diarahkan pada pemanfaatan sumber daya nasional untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nirmiliter.

Kebijakan pembangunan pertahanan pada pertahanan militer ditekankan pada bidang pembangunan karakter bangsa, postur, kelembagaan, wilayah pertahanan, teknologi dan industri pertahanan, serta kerjasama internasional. Beberapa hal yang menarik untuk dicermati terhadap kebijakan pembangunan pertahanan militer, diantaranya pembangunan postur. Salah satu kebijakan pembangunan postur pertahanan militer dilaksanakan melalui pemenuhan kekuatan pokok TNI dan modernisasi alat utama sistem senjata TNI guna memperkuat persenjataan strategis dan taktis untuk ketiga matra, baik matra darat, laut maupun matra udara.

Hal ini menjadi tantangan pembangunan pertahanan, khususnya dihadapkan pada ketersediaan anggaran. Demikian pula dengan kebijakan pembangunan industri pertahanan guna mewujudkan industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing. Beberapa penelitian telah dilakukan terhadap kebijakan industri pertahanan, diantaranya kewajiban untuk menggunakan alat pertahanan dari dalam negeri dan melibatkan industri pertahanan



Sumber foto : *Biro Humas Setjen Kemhan*

dalam setiap pembelian alat pertahanan dari luar negeri. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan industri pertahanan kurang terimplementasi dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut.

Untuk kebijakan pembangunan pertahanan nirmiliter, seperti halnya kebijakan pembangunan pertahanan militer terdiri atas kebijakan pembangunan karakter bangsa, postur, kelembagaan, kerjasama, dan industri pertahanan.

Beberapa kebijakan pembangunan pertahanan nirmiliter yang berbeda dengan pembangunan pertahanan militer, diantaranya pembangunan teknologi pertahanan dan wilayah pertahanan, keduanya tidak diatur dalam pertahanan nirmiliter. Disamping itu pada pembangunan kerjasama pertahanan nirmiliter diarahkan untuk kerjasama antar kementerian/lembaga dalam menyelenggarakan pertahanan nirmiliter, sementara itu pembangunan kerjasama pertahanan militer ditujukan untuk membangun kerjasama dengan negara-negara di dunia.

Kebijakan pembinaan kemampuan pertahanan militer dan nirmiliter ditujukan guna menjamin terselenggaranya sistem pertahanan negara, baik dalam rangka membina kemampuan TNI, komponen cadangan, dan komponen pendukung maupun kementerian/lembaga dalam mendayagunakan segala sumber daya nasional.

Satu hal yang perlu dicermati dalam kebijakan pembinaan kemampuan, yakni munculnya kebijakan pembinaan kemampuan bagi komponen cadangan dan komponen pendukung. Hal ini merupakan tantangan di bidang pertahanan, oleh karena sampai saat ini komponen cadangan dan komponen pendukung belum terwujud, meskipun UU dan Peraturan Pemerintah yang mengatur pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung sudah diterbitkan. Kebijakan penggerahan dan penggunaan pertahanan militer dalam hal ini TNI sebagai komponen utama ditujukan untuk menghadapi ancaman militer, nonmiliter, hibrida, mendukung perdamaian dunia, dan upaya menyelamatkan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, serta dalam membantu negara sahabat yang mendukung kepentingan nasional.

Satu kebijakan yang menarik pada kebijakan pengerahan dan penggunaan TNI ini adalah, dicantumkannya pengerahan dan penggunaan TNI untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Hal ini merupakan terobosan kebijakanguna menaungi tugas-tugas TNI yang selama ini telah dilaksanakan namun belum ada ketentuan yang mengaturnya. Kebijakan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya nasional pada pertahanan nirmiliter ditujukan pada pemanfaatan sumber daya nasional yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

Sesuai kebijakan Presiden di bidang hukum, kebijakan pertahanan negara pada kebijakan regulasi, baik pertahanan militer maupun nirmiliter ditekankan pada upaya mewujudkan semangat deregulasi dan debirokratisasi pada seluruh kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Adapun kebijakan bidang anggaran, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pengelolaan pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun nirmiliter secara efektif dan efisien. Hal ini sebagai jawaban atas kondisi negara yang masih memiliki keterbatasan kemampuan didalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Fenomena penyalahgunaan anggaran yang masih menjadi momok dalam pembangunan bangsa termasuk pembangunan pertahanan negara menjadi acuan dalam mengarahkan kebijakan bidang pengawasan. Beberapa kebijakan bidang pengawasan pertahanan militer dan nirmiliter, diantaranya menekankan pada upaya guna menjamin transparansi, akuntabilitas pengelolaan anggaran, penguatan reformasi birokrasi, dan realisasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan penyalahgunaan anggaran dan sebagai tantangan tersendiri bagi pemangku kepentingan pertahanan untuk menjadi motor penggerak dalam membebaskan korupsi di negeri ini.

Disamping pokok kebijakan pertahanan negara yang telah diuraikan diatas, terdapat satu kebijakan terkait penyelenggaraan pertahanan nirmiliter.



Kebijakan ini merupakan terobosan baru dan cukup fenomenal guna mengoptimalkan sinergitas diantara kementerian dan lembaga dalam merencanakan dan menyelenggarakan kebijakan pertahanan nirmiliter. Kebijakan penyelenggaraan dan pengendalian inilah menjadi kunci atas jawaban permasalahan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter selama ini seperti hasil temuan dalam strategic defence review terhadap implementasi Jakum Hanneg 2015-2019 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan nirmiliter belum berjalan secara optimal dikarenakan belum adanya kejelasan kementerian/lembaga yang bertindak sebagai unsur utama dan unsur pendukung dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

Kebijakan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter mengatur dan menunjuk sekaligus memberikan deskripsi terkait tugas dan fungsi kementerian/lembaga sebagai unsur utama dan unsur pendukung



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

sesuai dimensi dan jenis ancaman nonmiliter. Dengan demikian tidak ada lagi tumpang tindih dan saling tunjuk diantara kementerian/lembaga dalam menghadapi dan menangani ancaman nonmiliter. Adapun dimensi dan jenis ancaman nonmiliter secara tegas telah dinyatakan dalam kebijakan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter.

Salah satu contoh implementasi kebijakan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter yang saat ini sedang berlangsung dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yaitu dalam menghadapi ancaman pandemi covid-19. Jakum Hanneg 2020-2024 menyebutkan bahwa ancaman pandemi/wabah penyakit menular merupakan salah satu jenis ancaman nonmiliter yang berdimensi keselamatan umum. Dalam menghadapi ancaman ini menempatkan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai unsur utama, didukung beberapa kementerian,

diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, dan beberapa Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.

Seluruh isi kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 yang telah diuraikan diatas menjadi tantangan sekaligus harapan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pertahanan negara. Merujuk teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa kegagalan implementasi disebabkan oleh dua variabel, yaitu variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan (Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, 1980). Terkait dengan teori tersebut, Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 yang isinya telah diuraikan diatas tidak akan terimplementasi dengan baik tanpa dukungan variabel lingkungan, diantaranya berupa kepatuhan dan respon dari para pelaksana kebijakan.\*\*\*



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

## KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2021

**K**ebijakan pertahanan negara tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari kebijakan pertahanan negara tahun 2020 yang menjadi satu visi dan misi dalam penjabaran kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2020 - 2024.

Visi dan misi pertahanan negara tahun 2020 - 2024 diwujudkan dengan menetapkan tujuan strategis dan sasaran strategis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mencapai sasaran strategis lima tahunan, ditetapkan kebijakan pertahanan negara berupa sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan tiap tahunnya berdasarkan evaluasi dan arah kebijakan pertahanan negara 2020.

### Sasaran Kebijakan

- a. Terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut, dan udara, termasuk di daerah perbatasan
  - 1) Melanjutkan percepatan dalam mewujudkan penetapan batas wilayah darat, batas wilayah laut, serta *Air Defence Identification Zone (ADIZ)* dan *Air Defence Identification System (ADIS)* untuk melindungi kedaulatan dan hak berdaulat udara Indonesia melalui sinergitas kerja sama dan koordinasi dengan K/L terkait.
  - 2) Optimalisasi interoperabilitas dan peningkatan sarana prasarana berupa wahana pemantauan dan pengindraan jarak jauh berbasis satelit di wilayah pertahanan, khususnya wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Pemantauan dan pengindraan menggunakan radar dan *PTTA/drone* untuk mendapatkan data dan informasi secara *real time* serta terkoneksi dengan pusat pengendali

sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan peringatan dini.

- 3) Perkuatan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional sesuai dengan konsep sentralitas ASEAN, peningkatan kerjasama pertahanan dengan memprioritaskan pada negara tetangga yang berbatasan langsung, negara di kawasan Association of South East Asian Nations (ASEAN) dan kawasan Indo-Pasifik serta negara yang memiliki kerjasama pertahanan dengan Indonesia guna kepentingan nasional. Penguatan kerja sama keamanan maritim melalui latihan bersama dan patroli terkoordinasi secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat arsitektur keamanan wilayah regional, khususnya di Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, dan di Perairan Sulu, Selat Malaka, Samudera Hindia, serta Samudra Pasifik.
  - 4) Penyusunan kembali *Flight Information Region (FIR)* di atas wilayah Batam, Tanjung Pinang, dan Natuna.
- b. Terlindunginya keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman secara langsung maupun tidak langsung, baik dari dalam maupun luar negeri.
    - 1) Membangun kewaspadaan dini dalam mengantisipasi, mencegah, menangkal, dan menindak segala bentuk ancaman.
    - 2) Meningkatkan kerjasama diantara lembaga intelijen untuk pertahanan negara.

c. Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

- 1) Peningkatan kesiapan dan profesionalitas TNI untuk penanganan terorisme, radikalisme, separatisme, bahaya laten komunis, bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan tugas misi perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya, termasuk ancaman *Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRN-E)*.
- 2) Penanganan pandemi Covid-19 dan ancaman biologi lainnya melalui

peningkatan kapasitas pertahanan berupa sarana prasarana serta layanan kesehatan RS Kemhan dan TNI meliputi: pemenuhan alat dan material kesehatan 111 RS Kemhan dan TNI, penyiapan komponen pendukung bidang kesehatan, dan penyiapan rumah sakit lapangan, serta pembangunan sarana komputasi tinggi berbasis riset teknologi, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan data science, pembangunan *platform early warning system monitoring*, termasuk ancaman biologi, sarana prasarana lembaga farmasi di jajaran TNI sebagai pusat riset obat-obatan.

Kemhan memberikan pelayanan rutin rapid test rutin kepada para Veteran RI



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

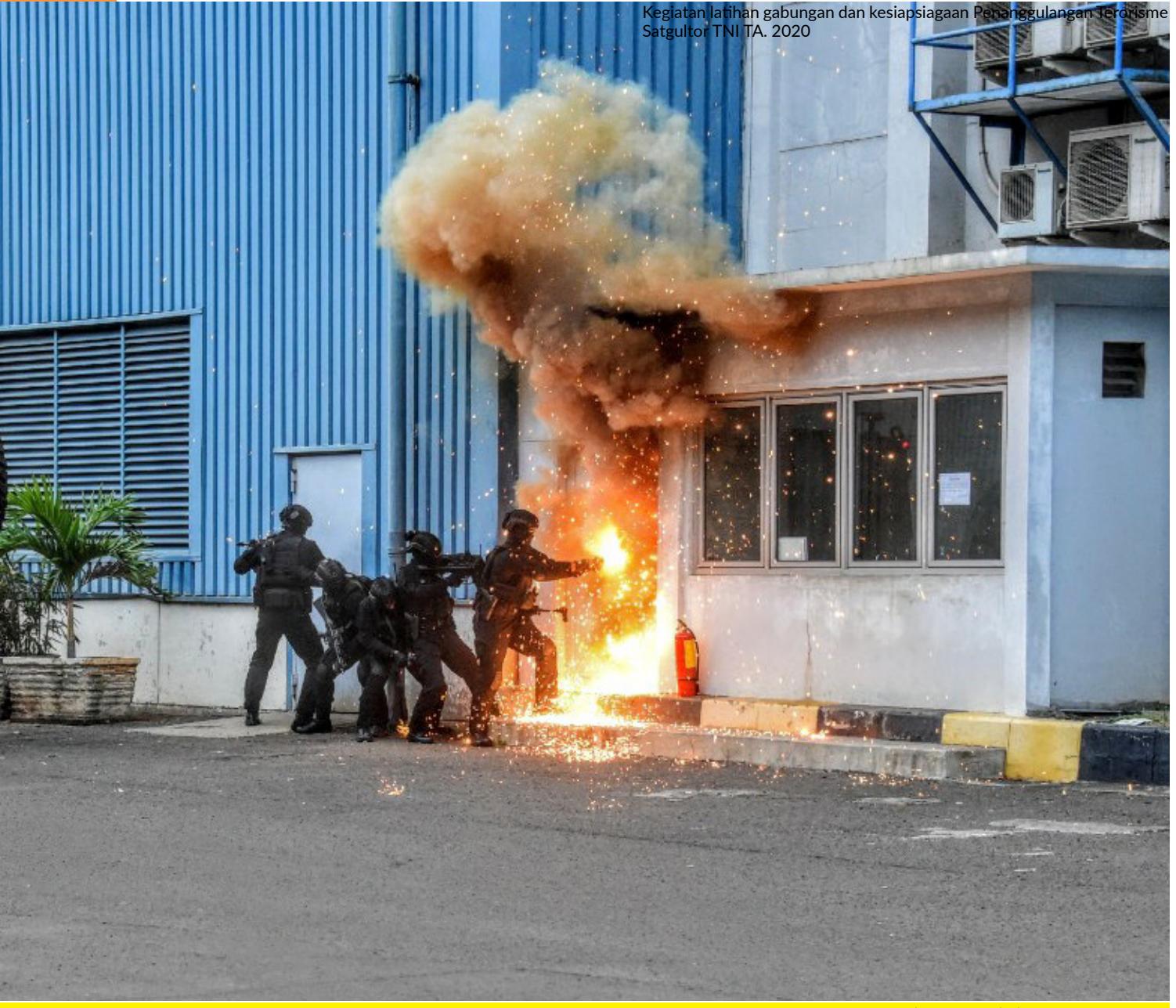
- 3) Penyiapan sumber daya manusia (SDM) pertahanan negara melalui pembentukan program sarjana S1 Fakultas Kedokteran Militer, Farmasi Militer, MIPA Militer, dan Teknik Militer, penguatan sistem pendidikan S-2 dan S-3, serta penguatan Sistem Akademi Informasi (*Akademic Information System*) dan Infrastruktur Kampus Pintar (*Smart Campus Infrastructure*).
- 4) Penguatan fungsi pembinaan sumber daya pertahanan dan pembangunan cadangan logistik nasional untuk membantu penanganan dampak ekonomi, pandemi Covid-19, dan ancaman *Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRN-E)* melalui sistem kewaspadaan dini, serta sistem pengamanan dan keamanan.
- d. Meningkatnya hubungan Diplomasi Pertahanan melalui kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan.
- 1) Penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara ASEAN dan negara lainnya dalam rangka menciptakan saling percaya, membangun kemampuan pertahanan dan profesionalisasi TNI, memperkuat industri pertahanan, serta kebijakan luar negeri menunjang diplomasi dan
  - 2) Memperkuat kerjasama pertahanan di kawasan Pasifik Selatan dan negara lain yang terkait dalam rangka membangun dukungan terhadap integritas Papua sebagai bagian integral dari NKRI.
  - 3) Melanjutkan pengiriman pasukan perdamaian dunia yang profesional didukung dengan perlengkapan serta sarana prasarana yang memadai sehingga mampu mengirim 1 Brigade pasukan perdamaian setiap tahun ke wilayah misi PBB, serta mempertahankan posisi Indonesia sebagai sepuluh besar negara pengirim pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.
- e. Terintegrasinya Pertahanan Militer dan Nirmiliter dalam Sistem Pertahanan Negara yang bersifat Semesta.
- 1) Membangun sinergitas pertahanan militer dan nirmiliter untuk mendukung terwujudnya Sishankamrata.
  - 2) Terwujudnya penataan dan pengelolaan sistem pertahanan militer terpadu di wilayah Kalimantan Timur yang akan menjadi lokasi ibu kota negara baru, dengan memprediksi kemungkinan ancaman yang cepat berubah.
  - 3) Peningkatan kapabilitas teknologi siber sebagai elemen fundamental seiring dengan peningkatan dan perkembangan ancaman siber, dengan mengedepankan integrasi antara kekuatan siber militer dan kapabilitas siber nirmiliter.
- f. Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman.
- 1) Melanjutkan pembangunan postur TNI sesuai dengan penahapan, melalui pemenuhan kekuatan pokok sehingga terbentuk kekuatan penangkal yang efektif. Pengembangan personel TNI menerapkan prinsip kebijakan right sizing dan proportional growth disesuaikan dengan pengembangan satuan TNI.

- 2) Penguatan Satuan TNI Terintegrasi (STT) pulau-pulau terluar di Natuna, Yamdena/Selaru, dan Merauke yang dilengkapi sensor terintegrasi ke Puskodalops TNI dan Angkatan.
- 3) Penguatan kapasitas lembaga intelijen untuk pertahanan negara, dalam rangka peningkatan kemampuan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini melalui kerjasama dan keterpaduan antar kementerian dan lembaga guna mencegah berbagai ancaman yang berdampak pada kepentingan dan keamanan nasional.
- 4) Peningkatan kekuatan dan kemampuan Kogabwilhan I, II, dan III yang difokuskan mampu melakukan kendali efektif dan pendudukan efektif sebagai wujud kehadiran di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) TNI yang bertugas memelihara dan meningkatkan keamanan maritim melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi bersama di bidang pengumpulan, penyediaan, dan pertukaran informasi, baik antarpusat operasi maupun pusat informasi maritim nasional dan internasional.
- 5) Peningkatan kekuatan dan kemampuan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI yang bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI.



- 6) Penguatan latihan gabungan TNI untuk meningkatkan kemampuan interoperability yang didukung satu sistem *network centric warfare* dengan memanfaatkan teknologi satelit untuk menghadapi perang modern.

Kegiatan latihan gabungan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Terorisme  
Satgultor TNI TA. 2020



Sumber foto : kabar21news.com

- 7) Peningkatan profesional prajurit melalui peningkatan 10 (sepuluh) komponen pendidikan di setiap Lemdik Kemhan dan TNI serta intensitas dan kualitas latihan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan berfokus pada konsep operasi gabungan.
- 8) Peningkatan kesejahteraan prajurit meliputi: peningkatan penghasilan, perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan prajurit dan anggota keluarganya serta jaminan hari tua.

- 9) Pembentukan kelembagaan *Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRN-E)* sebagai Balakpus di tingkat Mabes TNI.
- 10) Pembangunan kekuatan matra darat dilaksanakan melalui:
- Penambahan satuan komando kewilayahan, batalyon tempur, baik infanteri, kavaleri, artilleri medan, artilleri pertahanan udara, zeni tempur, maupun satuan Penerbad beserta unsur pendukungnya yang disesuaikan dengan luas wilayah NKRI dan bertumpu pada pertahanan pulau-pulau besar.
  - Modernisasi persenjataan batalyon infanteri, kavaleri, artilleri medan, artilleri pertahanan udara, dan Penerbad serta pembaruan senjata perseorangan sehingga senjata lama dapat dipergunakan untuk komponen cadangan pada masa aktif.
  - Rematerialisasi senjata kelompok yang terdiri atas Senapan Otomatis (SO), Senapan Mesin Ringan (SMR), Senapan Mesin Sedang (SMS) maupun Senapan Mesin Berat (SMB) dan mortir, serta pemenuhan bekal pokok Munisi Kaliber Kecil (MKK) dan Munisi Kaliber Besar (MKB).
  - Penempatan peluru kendali pertahanan udara di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa
- 11) Pembangunan kekuatan matra laut dilaksanakan melalui:
- Melanjutkan program peningkatan kapal perang TNI AL berupa: kapal frigate, kapal korvet, kapal cepat rudal dan kapal patroli yang dipersenjatai dengan peluru kendali minimal jarak 150 km berupa: rudal antikapal permukaan (*surface to surface missile/SSM*), rudal antiudara atau *surface to air missile (SAM)* jarak jauh dan jarak menengah sebagai senjata satuan (*force weapon*) dan SAM jarak dekat sebagai pertahanan diri (*self defense*) sesuai dengan kebutuhan bekal pokok dan Kapal Selam yang dipersenjatai dengan rudal dan torpedo.
  - Melaksanakan program pemenuhan dan peningkatan kemampuan, *Mid Life Modernization (MLM)* alutsista terpilih melalui asesmen (*cost and benefit analysis*) untuk menghasilkan alutsista dengan kesiapan operasional dan kemampuan tempur yang tinggi.
  - Meningkatkan kemampuan peperangan antikapal selam (AKS) melalui pengadaan Pesawat udara AKS disertai pengembangan konsep dan doktrin taktis kerja sama pesawat udara dan kapal permukaan dalam aksi AKS;
  - Meningkatkan kemampuan peperangan elektronika dan peperangan ranjau dengan pengadaan peralatan Pernika

- di kapal, pesawat udara, dan pangkalan serta pengadaan kapal pemburu ranjau (*mine counter measure*) serta peralatan peperangan ranjau modern yang mampu memperkuat strategi pengendalian choke points strategis.
- e) Membangun kemampuan pengamatan dan pengintaian (*ISR*) maritim meliputi domain, udara, permukaan, dan bawah air dengan modernisasi sistem pengamatan tetap (*persistent*) dan bergerak (*mobile*) termasuk Pesud patroli maritim, PTTA dan Kapal Permukaan Tanpa Awak.
- f) Meningkatkan kemampuan peperangan amfibi dan anti amfibi serta pertahanan pantai melalui modernisasi material tempur dan persenjataan Korps Marinir.
- g) Meningkatkan kemampuan dukungan pangkalan dengan memprioritaskan pembangunan Faslabuh, Fasharkan dan Fasduklog seiring dengan rencana pengadaan kapal perang dengan dimensi dan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

- bobot besar seperti kapal selam, kapal frigate, Kapal BRS, Kapal LPD, Kapal BCM dan Kapal AT.
- 12) Pembangunan kekuatan dan kemampuan sistem pertahanan udara nasional yang menerapkan pola pertahanan berlapis (*defence in depth*) meliputi:
- Modernisasi pesawat-pesawat tempur TNI AU yang dilengkapi rudal *air to air missile* (AAM) dan *Air to Ground* (AGM) berjarak jangkau lebih dari 100 km, dan platform lainnya untuk mendukung pertahanan udara nasional (pesawat AWAC&S, pesawat MRTT, pesawat helikopter SAR, pesawat Counter Insurgency (COIN) sebagai penindak ancaman *lowspeed* dan pesawat transpor)
  - Pembangunan peluru kendali darat ke udara, baik jarak sedang maupun jarak jauh serta rudal pertahanan ibu kota negara (Jakarta dan IKN) sesuai dengan konsep pertahanan yang telah direncanakan oleh TNI AU.
  - Pembangunan radar GCI dan radar pasif sebagai sensor pertahanan udara yang terintegrasi menuju konsep NCW TNI AU, serta pembangunan hanud titik berupa pengadaan alutsista hanud titik dan pengembangan organisasi Denhanud TNI AU.
  - Pembangunan organisasi, sarpras, alutsista, dan pihak yang dibutuhkan untuk pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AU.
- g. Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik.
- Melanjutkan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan sebagai berikut.
  - Melanjutkan pembahasan Undang-Undang bidang pertahanan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Tahun 2020 – 2024, yang meliputi:
    - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
    - Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.
    - Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
  - Mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai usul inisiatif Pemerintah.
  - Melanjutkan pembahasan RPP, Rperpres, Rpermehan, dan

piranti lunak lainnya yang menjadi amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Negara.

- d) Melanjutkan proses penyelesaian RPP atau Perpres antara lain : RPP tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemhan dan Polri, RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan

Wilayah Pertahanan Negara, Perpres tentang Pengamanan Objek Vital Nasional Strategis dan Objek Vital Nasional, serta Rperpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

- e) Melanjutkan pembahasan RPP, Rperpres, Rpermehan dan peraturan setingkat Eselon I yang menjadi kebutuhan Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
- f) Melanjutkan proses penyelesaian Undang-Undang yang merupakan Ratifikasi dari Perjanjian Internasional bidang Pertahanan yang

Menhan RI Prabowo Subianto menyematkan tanda keikutsertaan pelatihan Kader Bela Negara bagi seluruh komponen masyarakat







Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

masuk dalam daftar kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional bidang Pertahanan.

- 2) Penguatan pengawasan pengelolaan anggaran dengan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, bebas korupsi, dan efisiensi melalui pola pendampingan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka mempertahankan opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  - 3) Melanjutkan tata kelola pertahanan melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), penguatan Reformasi Birokrasi, dan percepatan realisasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kemhan dan TNI.
  - 4) Reformasi anggaran pertahanan sesuai dengan rancangan pengembangan kekuatan pertahanan, dalam rangka pencapaian tujuan strategis pertahanan negara dengan memedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan, serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara.
- h. Terwujudnya kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara.
- 1) Melanjutkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dalam rangka meningkatkan jumlah kader Bela Negara.
  - 2) Peningkatan peran serta Kementerian/Lembaga (K/L), TNI, Polri, Pemda dan komponen bangsa lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).

- i. Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.
  - 1) Melaksanakan penataan dan pembinaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) serta sarana prasarana nasional pendukung pertahanan.
  - 2) Meningkatkan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemda, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pelayanan keveteranan RI.
- j. Terwujudnya Komponen Cadangan pertahanan negara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi.
  - 1) Terbentuknya 25000 anggota Komponen Cadangan Matra Darat,

Komponen Cadangan Matra Laut, serta Matra Udara yang disesuaikan dengan kebutuhan matra guna memperkuat Komponen Utama.

- 2) Terwujudnya Sistem Informasi Sumber Daya Pertahanan.
- k. Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.
  - 1) Melanjutkan promosi, kerjasama dan implementasi Kebijakan Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Offset (IDKLO) untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan.
  - 2) Melanjutkan penugasan industri pertahanan untuk mengembangkan hasil penelitian dan pengembangan menjadi produk Alpalhankam untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara.

- 3) Melanjutkan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait untuk peningkatan pemakaian Alpalhankam produk industri pertahanan nasional.
- I. Terwujudnya ruang, alat, dan kondisi juang (RAK Juang) yang tangguh untuk mendukung Pertahanan Negara melalui
  - 1) Mewujudkan tata ruang wilayah pertahanan darat, laut, dan udara.
  - 2) Mewujudkan kesiapan SDM, SDA/buatan, serta sarana dan prasarana untuk mendukung pertahanan negara.
  - 3) Mengelola kondisi juang bagi kepentingan pertahanan negara.
- m. Terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut
  - 1) Penyiapan kawasan sebagai mandala pertahanan dalam satu kesatuan Tri Matra Terpadu untuk melaksanakan peperangan secara mandiri pada mandala luar, mandala utama, dan mandala dalam untuk menyelenggarakan perang berlarut.
  - 2) Penyiapan wilayah pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi dan sarana prasarana nasional, guna mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI.
  - 3) Mewujudkan kemampuan komando dan pengendalian yang efektif serta, peningkatan sarana transportasi penghubung antarpulau bagi seluruh kompartemen.
- n. Terwujudnya depo-depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi.
  - Pembangunan sistem logistik terdesentralisasi dan terintegrasi di wilayah Kodam, Lantamal dan Lanud untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan pulau-pulau besar, dengan fokus pembangunan depo munisi kaliber besar (MKB) dan munisi kaliber kecil (MKK).
- o. Terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis
  - 1) Penempatan rudal diselat-selat strategis yang merupakan choke points sesuai dengan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III.
  - 2) Memperkuat coastal missile defence system dan coastal surveillance system untuk melaksanakan pengendalian selat-selat strategis sesuai dengan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III.
  - 3) Meningkatkan pengawasan dan pengintaian lalu lintas kapal-kapal dan pesawat udara di selat-selat strategis, terutama pascapenerapan TSS (*Traffic Separation Scheme*) di Selat Sunda dan Selat Lombok.
- p. Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara
  - Mewujudkan sinkronisasi penataan ruang wilayah Pertahanan berupa: Ruang Wilayah Pertahanan (RWP), Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP), dan Kawasan Strategis Nasional bagi kepentingan pertahanan dengan tata ruang wilayah provinsi, Kabupaten/Kota. \*\*\*



# **PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN**

**Sebagai Amanat PP No. 3 Tahun 2021 dan UU No. 23 Tahun 2019  
Tentang PSDN**

Oleh : Kolonel. Adm Agus Setyo Hartono, S.A.P  
Analis Kebijakan Madya Bidang TIK Biro Humas Setjen Kemhan



**P**emerintah berencana membentuk Komponen Cadangan Pertahanan Negara, dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada tahap awal akan merekrut 25.000 masyarakat. Pada tahap awal ini, anggaran yang dialokasikan untuk pembentukan Komponen Cadangan adalah sebesar Rp. 1 Triliun.

Kementerian Pertahanan melalui Ditjen Potensi Pertahanan mengumpulkan aspirasi dari masyarakat mengenai proses penyusunan dan urgensi PP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2019 yang salah satunya memuat mengenai pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara dan menyusunnya dalam penjelasan sebagai berikut di bawah ini.

#### Proses penyusunan

Proses penyusunan UU Nomor 23 Tahun 2019 tidak terburu-buru, UU ini sudah diwacanakan sejak beberapa Tahun lalu dengan adanya konsep RUU Komponen Cadangan dan RUU Komponen Pendukung sebagai amanah dari UUD Negara RI Tahun 1945 dan melengkapi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU PSDN untuk Hanneg merupakan simplifikasi RUU Bela negara , RUU Komponen Pendukung dan RUU Komponen Cadangan. Pemerintah menjalankan amanah UUD 1945 khususnya pasal 30 yaitu memberikan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha Pertahanan Negara. Usaha Pertahanan Negara tersebut dilaksanakan dengan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Keikutsertaan rakyat sebagai kekuatan pendukung sesuai ayat 5 pasal 30 UUD 45 diatur dengan UU, maka lahirlah UU Nomor 3 Tahun 2019. Dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung inilah, maka rakyat

diberikan hak untuk menjadi Komponen Cadangan atau Komponen Pendukung dan berkewajiban bersama-sama dengan TNI sebagai kekuatan utama, mempertahankan negara dari segala ancaman.

#### Urgensi pembentukan Komponen Cadangan.

Pembangunan dan pengadaan Alutsista sudah dianggarkan setiap Tahun Anggaran sesuai kemampuan negara , sedangkan untuk kesejahteraan sudah masuk dalam anggaran belanja pegawai yg prosentasenya paling besar dalam anggaran Kemhan TNI, untuk lebih meningkatkannya semua kembali kepada kemampuan keuangan negara.

Keberadaan Komponen Cadangan justru memungkinkan suatu negara mengurangi pengeluaran militer dimasa damai sambil mempertahankan kekuatan yang dipersiapkan untuk perang. Hal ini karena pada masa tidak aktif mereka kembali kepada profesi dan aktivitas semula, sehingga negara tidak perlu mengeluarkan biaya. Negara hanya perlu mengeluarkan anggaran selama anggota Komponen Cadangan mengikuti latihan dasar kemiliteran selama 3 bulan dan latihan penyegaran pada tahun berikutnya untuk memelihara keterampilan dan kesamaptaan. Di luar kegiatan tersebut, negara tidak perlu mengeluarkan anggaran, karena pembinaan Komponen Cadangan pada saat tidak aktif dilakukan oleh Instansi/Lembaga masing-masing. Oleh karena itu pembentukan Komponen Cadangan justru dapat menghemat pengeluaran anggaran negara dibidang pertahanan, disisi lain kesiapan negara yang mempunyai Komponen Cadangan akan selalu terjaga pada saat Komponen Utama perlu tambahan kekuatan.

#### Mobilisasi Komponen Cadangan

Norma HAM Internasional sangat menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia,dalam UU PSDN penerimaan Komponen Cadangan dilakukan atas dasar sukarela

tanpa ada paksaan, dalam pembentukan Komponen Cadangan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan HAM, pada saat calon Komponen Cadangan mendaftar dilakukan secara sukarela, setelah melalui proses seleksi menjalani latihan dasar militer selama 3 bulan dan setelah ditetapkan menjadi anggota Komponen Cadangan akan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai anggota Komponen Cadangan. Hak-hak dan kewajiban sebagai anggota Komponen Cadangan telah diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 UU Nomor 23 Tahun 2019.

Kewajiban melaksanakan mobilisasi tidak melanggar HAM, karena melaksanakan kewajiban telah diatur dalam Undang-Undang.

#### Lingkup ancaman yang membutuhkan Komponen Cadangan

Kekhawatiran dari koalisi masyarakat sipil tentang penggunaan Komponen Cadangan yang akan dibentuk pemerintah dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri seperti dalih untuk menghadapi ancaman bahan komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat kemungkinan terjadinya sangat kecil.

Pembentukan Komponen Cadangan dilakukan secara ketat melalui seleksi administrasi dan kompetensi dan dilanjutkan dengan latihan dasar kemiliteran. Penggunaan Komponen Cadangan dalam suatu operasi militer melalui keputusan politik pemnerintah yaitu presiden dengan persetujuan DPR. Jadi kekhawatiran penyalahgunaan komponen cadangan dalam suatu operasi yang dapat menimbulkan konflik horizontal kurang relevan. Hal ini karena Komponen Cadangan tidak berdiri sendiri, namun bergabung dengan Komponen Utama yang komando dan kendalinya berada di bawah Panglima TNI, sehingga tidak ada anggota komponen cadangan

yang melakukan kegiatan mandiri. Semua Komponen Cadangan bergerak atas perintah satuan TNI tempat anggota Komponen Cadangan berdinas. Penggunaan Komponen Cadangan adalah alternatif terakhir, apabila Komponen Utama perlu tambahan tenaga pengganti.

Perbedaan antara Komponen Cadangan dengan kelompok milisi sipil yang sebelumnya pernah ada.

Pembentukan Komponen Cadangan berbeda dengan pembentukan milisi seperti kelompok-kelompok Pam Swakarsa yang digunakan untuk menghadapi demonstrasi besar mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa, dan lain-lain. Dalam rangka membantu pengamanan, Pemerintah membentuk organisasi Pam Swakarsa pada Tahun 1998 dengan misi utama membantu TNI untuk menyukseksan Sidang Istimewa MPR pada November 1998. Pembentukan PAM Swakarsa dibentuk atas usulan Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto. PAM Swakarsa diisi oleh beberapa orang berlatar belakang organisasi paramiliter seperti Forum Umat Islam Penegak Keadilan dan Konstitusi (Furkon), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) dan Brigade Hizbulullah BKUI. Pembentukan PAM Swakarsa juga didukung oleh Gereja Protestan Indonesia (GPI). Perbedaan anggota Pam Swakarsa dengan Komponen Cadangan antara lain:

- a. Perekrutan tidak melalui seleksi administrasi dan kompetensi, namun berdasarkan keanggotaan ormas tertentu.
- b. Tidak melaksanakan Latihan dasar kemiliteran, sehingga tidak punya standar yang jelas.
- c. Penggunaannya tanpa keputusan politik pemerintah

Organisasi Pam swakarsa tidak ada ikatan operasional dengan TNI, sehingga dapat bergerak

sendiri.

#### Komponen Cadangan Tidak Ditujukan Untuk Menghadapi Masyarakat Sendiri.

Pembentukan Komponen Cadangan tidak ditujukan untuk kepentingan menghadapi kelompok masyarakat dalam negara sendiri, dengan alasan karena

1. Komponen Cadangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN dikerahkan pada saat mobilisasi bila negara dalam keadaan darurat yang ditimbulkan adanya ancaman. seperti invasi dan negara lain, sehingga Komponen Cadangan tidak bisa dijadikan milisi apalagi dibenturkan untuk menghadapi masyarakat.
2. UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah salah satunya mengatur tentang pengelolaan komponen bangsa (warga negara) untuk menghadapi suatu ancaman secara dini, terarah dan terencana yang membutuhkan proses waktu yang cukup panjang pada saat damai, setelah dilatih dan dibina kurang lebih tiga bulan Komponen Cadangan dikembalikan kepada status profesionalnya masing-masing, sewaktu-waktu bila negara dalam keadaan darurat/perang Komponen Cadangan dapat dimobilisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengertian Komponen Cadangan sesuai Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSON untuk pertahanan negara, Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional (SDM, SDA & SDB) yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna

memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

4. Dapat kita ketahui pengertian Milisi adalah sekelompok orang atau masyarakat secara berdiri sendiri untuk bertahan hidup dari serangan kelompok lain yang bersifat independen.

#### Pembentukan Komponen Cadangan Tidak Memiliki Kecenderungan Dimensi Politis atau Tidak Dapat Dimanfaatkan Secara Politis.

Pembentukan Komponen Cadangan yang dipaksakan pada saat ini punya kecenderungan dimensi politisnya daripada kepentingan pertahanan sangat tidak berdasar karena Komponen Cadangan digunakan tidak untuk kepentingan Politik, Komponen Cadangan digunakan untuk kepentingan pertahanan bila negara dalam keadaan darurat/perang sesuai Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2002, "Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung", jadi tidak ada kepentingan lain dalam pembentukan Komponen Cadangan selain untuk kepentingan pertahanan negara.

#### Posisi Komponen Cadangan Dalam Anggaran Pertahanan

Pembentukan Komponen Cadangan sudah tepat sasaran untuk menjaga pertahanan dan keamanan NKRI dari ancaman yang akan muncul sewaktu-waktu kepada negara kita dapat berupa invasi militer negara luar, dirilana sesuai Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Dimana apabila menghadapi Ancaman dari negara

luar hanya mengandalkan Komponen Utama (TNI), kemungkinan TNI belum sanggup untuk menghadapi serangan dari negara luar, misalnya teknologi negara Cina dan USA sudah menggunakan Kemampuan Antariksa (Luar angkasa) yang belum dimiliki negara kita.

Pembentukan Komponen Cadangan tidak menjadi beban baru bagi anggaran sektor pertahanan walaupun jumlahnya masih terbatas, karena untuk menciptakan pertahanan semesta (Komponen Cadangan) harus mempunyai waktu yang cukup panjang dimana negara kita memerlukan sifat kesemestaan sesuai dasar UU Nomor 3 Tahun 2002.

Sesuai Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2002 Sistem pertahanan semesta yang dapat digunakan apabila negara kita tidak cukup anggaran atau sesuatu hal seluruh warga negara dan sumber daya nasional dapat dilibatkan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, yang isinya sebagai berikut: "Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman".

**Pembentukan Komponen Cadangan dalam UU No 23 Tahun 2019 tentang PSDN dan PP-nya Telah Sesuai Dengan Amanat UUD 1945 dan UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.**

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggarannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan

pada kekuatan sendiri. Terkait dengan sumber pendanaan disarankan bahwa pada dasarnya ketika negara terjadi perang seluruh Sumber Daya Nasional di mobilisasi memerlukan partisipasi seluruh Sumber Daya dan Sumber Dana. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dalam pasal 103 ayat (3) disebutkan bahwa pengecualian untuk pernbentukan, penetapan, dan pembinaan Komponen Cadangan unsur warga negara hanya menggunakan Sumber Dana dari pemerintah yaitu APBN dan APBD.

#### **Penetapan SDA dan SDB serta Sarprasnas Komponen Cadangan Berpedoman Pada Penghormatan atas Hak Asasi Manusia**

Dalam penetapan SDA, SDB serta Sarprasnas sebagai Komponen Cadangan, Kementerian Pertahanan selalu dan berpedoman kepada penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak properti. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 54 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dinyatakan bahwa "Penetapan Komponen Cadangan unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dan diberitahukan kepada pemilik atau penegelola SDA, SDB, serta Sarprasnas. Kemudian dalam pasal 55 dijelaskan bahwa penetapan SDA, SDB, serta Sarprasnas sebagai komponen cadangan tidak menghilangkan hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan, mengelola, dan/atau menggunakan; dan/atau hak pengelola untuk mengelola dan/atau menggunakan, terhadap SDA, SDB, serta Sarprasnas.

Sesuai Pasal 72 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terkait dengan SDA, SDB, serta Sarprasnas milik swasta atau perseorangan pada saat mobilisasi diperlakukan sebagai milik negara dan diberikan rawatan kedinasan, selanjutnya pada saat demobilisasi SDA, SDB, serta Sarprasnas milik pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta dan perseorangan yang telah selesai dimobilisasi wajib dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui demobilisasi dengan diberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

#### Pemberlakuan Hukum Militer Kepada Komponen Cadangan Hanya Berlaku Ketika Menjadi Kombatan

Penetapan anggota Komponen Cadangan adalah setelah dinyatakan lulus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Dalam pasal 44 ayat (1) disebutkan bahwa masa aktif komponen cadangan merupakan masa pengabdian komponen cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat mobilisasi. Pada masa aktif tersebut anggota komponen cadangan diberlakukan hukum militer, hal ini karena anggota komponen cadangan pada saat mobilisasi berstatus sebagai kombatan, maka terhadap mereka berlaku hukum militer yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Komponen cadangan pada masa tidak aktif diberlakukan dan tunduk kepada peradilan umum.

Pada dasarnya kita semua mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi dan menghormati supermasi hukum. Tetapi ketika KUHPM itu masih berlaku dan masih dijadikan sebagai acuan hukum bagi miltir, maka pada saat komponen cadangan masa aktif yang statusnya sebagai kombatan, maka tunduk kepada hukum militer sebagaimana diberlakukan kepada anggota militer Ketika sangsi tentang ketentuan hukum bagi militer sebagaimana tercantum didalam

KUHPM sudah direvisi, maka komponen cadangan akan mengikuti sebagaimana aturan yang diterapkan untuk anggota militer tersebut.

**Pembentukan Komponen Cadangan Adalah Upaya Pemerintah Menanggulangi Ancaman dengan Mempersiapkan Secara Dini dengan Sistem Pertahanan Negara.**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam BAB III tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara dicantumkan sebagai berikut:

- a. Pasal 6 "Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.
- b. Pasal 7 ayat (1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud pasal 6 diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.
- c. Pasal 7 ayat (2) Sistem Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.
- d. Pasal 7 ayat (3) Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
- e. Pasal 8 ayat (1) Komponen Cadangan, terdiri atas Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana

Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

- f. Pasal 8 ayat (2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
- g. Pasal 8 ayat (3) Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Undang-Undang.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan berkewajiban untuk mempersiapkan secara dini sistem pertahanan negara karena tantangan dimasa depan berupa potensi ancaman militer dan non militer masih mungkin terjadi untuk Indonesia, disebabkan secara geografis Indonesia adalah gerbang bagi kawasan Asia Pasifik, yang akhir-akhir ini tingkat konflik cenderung meningkat, maka untuk menghadapi perkembangan ancaman tersebut pemerintah menata ulang kembali sistem pertahanan negara. Amanat dari Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 pasal 8 ayat (3) tentang Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung untuk diatur dalam sebuah Undang-Undang.

Sebagai informasi untuk lebih memiliki pemahaman yang sama diantara kita semua tentang pertahanan negara bahwa setelah kurang lebih 17 Tahun terjadi kekosongan dalam pengaturan Sumber Daya Nasional (Warga Negara, SDA, SDB, dan Sarprasnas) untuk diberdayakan dalam rangka sistem pertahanan semesta yang dengan sesuai amanat undang-undang tersebut, maka pemerintah memandang perlu untuk mengatur tata kelola pertahanan negara dengan

keterlibatan Sumber Daya Nasional tersebut melalui Pembentukan Komponen Cadangan dan Penataan Komponen Pendukung yang saat ini diatur melalui Undang-Undang nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Warga Negara, SDA, SDB, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer yang bertujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen utama.\*\*\*

Oleh : Budiono (Reporter Biro Humas Setjen Kemhan)

# PEMERINTAH TERBITKAN

## *Sejarah dalam upaya Pembangunan*



Sumber foto : bradsknutson.com

**D**alam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya.

Bangsa Indonesia memiliki cara sendiri dalam membangun sistem Pertahanan Negaranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh Warga Negara, Wilayah, dan Sumber Daya Nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan

# PP NOMOR 3 TAHUN 2021

## Sistem Pertahanan Rakyat Semesta

wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman.

Konsep Pertahanan Negara yang bersifat semesta tersebut lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia yang diawali pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa mengisi kemerdekaan sampai sekarang. Kesemestaan yang dibangun telah terbukti mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari kaum kolonialis padamasa revolusi perang kemerdekaan.

Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa Indonesia sudah mempunyai gagasan dan mewariskannya untuk generasi penerus bangsa bagaimana menjaga dan membela Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Sistem Pertahanan Rakyat Semesta merupakan hasil rancang bangun para pendiri bangsa Indonesia, yang dituangkan dalam sistem hukum, sistem perundang – undangan yang tentunya merupakan sumber hukum tertinggi yakni Undang Undang Dasar 1945.

Pertama, pada Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Dan pada Pasal 30 ayat (1) berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bela

negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia.

Lalu, Pasal 30 ayat (1) berbunyi "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung".

Sementara itu, dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga diamanatkan dan ditegaskan kembali, bahwa hakikat Pertahanan Negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggarannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Disebutkan, pada Undang-Undang tersebut, bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara, yang terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

### Tahun bersejarah membangun Sishanta

Tahun 2021 ini, menjadi tahun yang sangat bersejarah utamanya bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Dikatakan sebagai tahun bersejarah,



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

karena Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Untuk Pertahanan Negara. PP tersebut ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 2021 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara. Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dipersiapkan

secara dini untuk menghadapi Ancaman.

Lantas apa saja ruang lingkup yang diatur dalam dalam PP Nomor 3 Tahun 2021 tersebut. Berikut uraian dari lima ruang lingkup yang tertuang pada pada pasal 2 meliputi: Pertama, Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN); Kedua, Pembinaan dan Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Pengabdian Sesuai Dengan Profesi; Ketiga, Pengelolaan Komponen Pendukung; Keempat, Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan; dan Kelima, Mobilisasi dan Demobilisasi.

#### Penyelenggaraan PKBN

Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan,

dan/atau pelatihan kepada Warga Negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. Penyelenggaraan PKBN merupakan pelaksanaan dari pendidikan kewarganegaraan.

Kesadaran bela negara itu penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara dan sejalan dengan Program Revolusi Mental yang dicanangkan pemerintah sekaligus membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan pertahanan nasional yang tangguh. Karena kesadaran bela negara setiap warga negara yang diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara merupakan *soft power* bangsa bahkan akan memberikan *deterrent effect* bagi negara lain yang ingin mencoba mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Untuk itu, Penyelenggaraan PKBN juga diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan PKBN dilaksanakan dalam

lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan, yang dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait dan dapat bekerja sama dengan kepala daerah dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan PKBN lingkup pendidikan dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional, dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Penyelenggaraan PKBN lingkup pendidikan juga dilaksanakan melalui penyusunan pedoman PKBN, sosialisasi dan diseminasi, pemantauan dan evaluasi. Selain itu Pelaksanaan PKBN terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk penyelenggaraan PKBN di lingkup masyarakat dilaksanakan oleh Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

agama. Penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat dilaksanakan melalui penyusunan pedoman PKBN, sosialisasi dan diseminasi, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta pemantauan dan evaluasi. Penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat ditujukan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kader organisasi masyarakat, kader organisasi komunitas, kader organisasi profesi, kader partai politik serta kelompok masyarakat lainnya.

Selanjutnya untuk penyelenggaraan PKBN lingkup pekerjaan dilaksanakan oleh Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diklat diselenggarakan secara mandiri atau terintegrasi dengan pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, atau pendidikan dan pelatihan lain.

#### *Pembinaan dan Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Pengabdian Sesuai Dengan Profesi*

Pembinaan kepada Warga Negara dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesi dilaksanakan untuk menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dengan dimensi ancaman. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dengan dimensi ancaman se, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian sesuai tugas dan fungsinya menyusun pedoman pembinaan dalam pengabdian sesuai dengan profesi.

Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian wajib memberikan pembinaan Warga Negara dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesi yang dapat dilaksanakan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, simulasi dan/atau Diklat. Dalam melaksanakan pembinaan tersebut, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non



kementerian dapat bekerja sama dengan organisasi profesi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk kerja sama sebagaimana yang dimaksud meliputi bidang: pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; peningkatan standardisasi kompetensi; pertukaran informasi dan data; bantuan teknik dan/atau keahlian; dan/atau



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

bidang lain yang terkait pengabdian sesuai dengan profesi dalam menghadapi ancaman non militer.

#### Pengelolaan Komponen Pendukung

Salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara dalam Bela Negara adalah menjadi Komponen Pendukung yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan

kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan dalam menghadapi ancaman militer, non militer dan ancaman hibrida.

Sebagai contoh, dalam pembangunan sumber daya manusia Komponen Pendukung Pertahanan Negara dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia dibidang teknologi.

Sementara itu dalam PP Nomor 3 Tahun 2021, yang termasuk kedalam komponen pendukung terdiri atas Warga negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan dan Sarana dan Prasarana Nasional (Sarana dan prasarana Darat, Laut, Udara, Siber dan antariksa dan sarana prasarana lainnya)

Disamping itu dalam Peraturan Perundangan ini disebutkan bahwa Pengelolaan Komponen Pendukung dikelola melalui kegiatan penataan dan pembinaan. Kegiatan penataan dan pembinaan ini diselenggarakan dalam sistem tata kelola pertahanan Negara yang demokrasi, menjunjung prinsip keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memperhatikan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penataan dan pembinaan Komponen Pendukung bidang sarana dan prasarana dilaksanakan dengan meningkatkan industri nasional menjadi

industri pertahanan yang dapat ditetapkan sebagai Komponen Cadangan.

Penataan Komponen Pendukung dilaksanakan melalui tahapan persiapan (pendataan, pemilihan, pemilihan dan verifikasi) dan penetapan yang dimuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan yang menjadi tanggung jawab Menteri. Penataan Komponen Pendukung oleh Kementerian bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan pembinaan Komponen Pendukung merupakan kegiatan peningkatan kualitas dan/atau kuantitas komponen pendukung melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan/atau simulasi dalam usaha pertahanan negara dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait. Didalam pelaksanaan pembinaan Komponen



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Pendukung, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Kementerian.

### ***Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan Komponen Cadangan***

Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Warga Negara serta pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara.

Adapun pembangunan Komponen Cadangan diperlukan sebagai upaya untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan melibatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam pertahanan negara, sesuai amanah UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Dalam PP Nomor 3 Tahun 2021 mengatur tentang Pengelolaan Komponen Cadangan, yang meliputi pembentukan dan penetapan, pembinaan, penggunaan, dan pengembalian. Berikut tampilan dari isi PP Nomor 3 Tahun 2021 disebutkan Komponen Cadangan merupakan sumber daya nasional yang telah di siapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama, demikian buniy Pasal 1 angka 9. Adapun yang dimaksud dengan Komponen Utama ini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kemudian dalam PP ini juga kembali memperluas penjelasan tentang komponen cadangan, yang tertera dalam Pasal 48 disebutkan Komponen cadangan meliputi warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana nasional.

Sementara itu pada pasal 49 di jelaskan, pembentukan komponen cadangan dari unsur warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dikelompokan menjadi komponen cadangan matra

darat, komponen cadangan matra laut dan komponen cadangan matra udara.

Adapun pembentukan komponen cadangan dalam PP 3 / 2021 di jabarkan menjadi tahapan pendaftaran, seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan. Untuk pendaftaran Komponen Cadangan dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pengumuman dan pelamaran.

Sedangkan untuk tahapan seleksi sendiri meliputi seleksi administratif dan kompetensi yang terdiri dari proses uji kesehatan, kemampuan, pengetahuan/wawasan dan sikap calon Komponen Cadangan.

Calon komponen cadangan setelah dinyatakan lulus seleksi kompetensi, maka wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliter selama tiga bulan, demikian di sebutkan dalam Pasal 54 PP 3/2021 ini. Pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksudkan dalam PP 3/2021 dilaksanakan pada lembaga pendidikan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kesatuan Tentara Nasional Indonesia.

Pada pasal 56, menjelaskan selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, calon Komponen Cadangan berhak memperoleh uang saku, perlengkapan perserorangan lapangan, rawatan kesehatan dan pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Besaran uang saku sesuai ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usulan Menteri. Sedangkan perlengkapan perseorangan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas pakaian dinas lapangan, sepatu lapangan, topi lapangan dan ransel tempur. "Rawatan kesehatan dan pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nantinya, calon yang dinyatakan lulus pelatihan dasar kemiliteran ditetapkan dan diangkat sebagai Komponen Cadangan oleh Menteri terkait. Selanjutnya, Komponen Cadangan dilantik dan mengucapkan sumpah/janji. Mereka juga akan di beri surat keputusan pengangkatan sebagai Komponen Cadangan dan tanda kelulusan pelatihan dasar kemiliteran.

Sebagaimana bunyi Pasal 58, Komponen Cadangan yang telah dilantik diberikan pangkat. Pemberian pangkat mengacu pada penggolongan pangkat TNI. "Pangkat Komponen Cadangan hanya di gunakan pada masa aktif Komponen Cadangan," bunyi Pasal 58 Ayat (3) PP 3/2021.

#### *Mobilisasi dan Demobilisasi.*

Dalam PP Nomor 3 Tahun 2021 juga mengatur bahwa Presiden berwenang memobilisasi warga

negara dalam keadaan darurat militer atau perang. "Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan Mobilisasi," demikian bunyi Pasal 87 PP 3/2021.

Pernyataan Mobilisasi tersebut ditetapkan oleh Presiden serta harus mendapat persetujuan dari DPR. Setelah mendapat persetujuan, maka Presiden harus mengumumkan pernyataan mobilisasi secara terbuka. Mobilisasi dikenakan terhadap Komponen Cadangan yang dilaksanakan melalui pemanggilan/pemberitahuan secara lisan dan tertulis.

Sementara itu, mobilisasi Komponen Cadangan dari unsur sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional dilaksanakan melalui pemberitahuan secara lisan dan tertulis kepada pemilik dan /atau pengelola. "Komponen



Sumber foto : [www.antara.co.id](http://www.antara.co.id)

Cadangan yang telah memenuhi pemanggilan dan pemberitahuan Mobilisasi diserahkan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk ditugaskan dan digunakan dalam Mobilisasi," demikian disebutkan Pasal 90 Ayat 5 PP 3 / 2021. Selain itu Komponen Cadangan ditugaskan dan digunakan dalam Mobilisasi di bawah komando dan kendali Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Sementara itu jika dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang sudah dapat diatasi, Presiden dapat menyatakan Demobilisasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Demobilisasi merupakan tindakan penghentian pengerahan dan penggunaan Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional setelah melaksanakan tugas Mobilisasi. Demobilisasi diselenggarakan secara bertahap dengan mengutamakan pemulihan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

## Penutup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara mendeklasifikasi pengaturan lebih lanjut kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), Pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, penataan dan pembinaan Komponen Pendukung, pembentukan Komponen Cadangan, masa pengabdian Komponen Cadangan, pemberhentian Komponen Cadangan, penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi Komponen Cadangan, pembinaan Komponen Cadangan serta Mobilisasi dan Demobilisasi.

Dengan telah diterbitkannya peraturan atau ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, maka kedepan diharapkan pelaksanaan PSDN untuk Pertahanan Negara secara lebih rinci dan operasional akan dapat terselenggara lebih terarah,

terpadu, dan berkelanjutan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.\*\*\*

## Referensi

- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
- <https://www.inews.id/news/nasional/jokowi-teken-pp-nomor-32021-warga-bisa-jadi-komponen-cadangan-pertahanan-negara>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/06422051/pp-3-2021-dan-3-poin-perluasan-peran-rakyat-dalam-upaya-pertahanan-negara?page=all#:~:text=Dalam%20PP%20Nomor%203%20Tahun,keadaan%20darurat%20militer%20atau%20perang.&text=Adapun%20mobilisasi%20tersebut%20dikenakan%20terhadap,pemanggilan%20secara%20lisan%20dan%20tertulis>.

**A**da yang menarik dari Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (Rapim TNI) 2021 di GOR Ahmad Yani Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/2). Rapim TNI 2021 mengambil tema 'TNI Kuat, Solid, Profesional, Dicintai Rakyat, Siap Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihian Ekonomi Nasional, serta Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan NKRI', yang dilaksanakan melalui tatap muka (offline) dan video conference (online).

Rapat ini dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI M Herindra, dan seluruh jajaran pimpinan TNI tiga matra.

Yang berbeda dari Rapim TNI tahun-tahun sebelumnya, di sini Menhan Prabowo Subianto menyampaikan tentang rencana modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Prabowo Subianto dengan gamblang memaparkan tentang rencana program utama pembangunan kekuatan TNI periode 2021-2024.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Achmad Riad membenarkan jika dalam pembekalan, Menhan menekankan pentingnya reengineering, perbaikan, dan refurbish berbagai alutsista untuk menyempurnakan kekuatan TNI. Selain itu, kata dia, Menhan juga menyinggung tentang dasar pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) bisa dimasukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.



# MODERNISASI ALUTSISTA BESAR-BESARAN DI TIGA MATRA

Oleh: Erik Purnama Putra  
Wartawan Republika



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Helikopter Sikorsky BLACK HAWK

Sumber foto: [www.lockheedmartin.com](http://www.lockheedmartin.com)

Rencana awal, pembentukan Komcad mencapai 25 ribu prajurit, yang setara dengan 35 satuan militer batalyon. "Dia menyampaikan beberapa hal terkait sistem pertahanan rakyat semesta terkait masalah UU 23 tahun 2019, terkait pengelolaan SDM," kata Mayjen TNI Achmad Riad di lokasi acara.

Dalam materi yang disampaikan Menhan di Rapim TNI 2021 yang didapat penulis, Menhan menargetkan belanja alutsista besar-besaran, termasuk pembangunan sarana dan prasarana, serta pembelian seragam terkini (*integrated personal protection set*). Untuk TNI AD, misalnya ada program modernisasi senjata perorangan, kelompok, regu, peleton, kompi, hingga batalyon. Selain itu, ada

pembelian senapan serbu, senjata lawan tank sejenis Gustav, rudal Stinger, hingga senapan runduk.

Untuk pembelian alutsista utama, meliputi 32 unit Helikopter Sikorsky UH-60 *Blackhawk* dengan teknologi autopilot, empat unit V22 Osprey, tiga unit UAV system, hingga perbaikan sarana termasuk angkutan dan alat komunikasi, serta barak siaga batalyon setiap Komponen Cadangan (Komcad).

Dalam daftar pengadaan alutsista TNI AL, memuat rencana pembelian lima kapal selam Scorpene, empat kapal selam ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) 214, dua kapal selam tipe 310, hingga pembuatan kapal selam autonomous tanpa awak, yang masih

kapal selam diesel listrik konvensional Scorpene

Sumber foto: [www.boombastis.com](http://www.boombastis.com)

tahap uji coba dan jika berhasil bakal diproduksi hingga 50 unit. Selain itu, ada pengadaan 16 frigate 140 meter, kapal *multirole full combat* (perang antikapal selam), pembangunan pangkalan Angkatan Laut baru, dua *ground coastal missile defence system*, dan tiga unit *UAV system*.

Adapun untuk pengadaan di TNI AU, meliputi modernisasi semua pesawat tempur bisa dengan cara refurbish, pengadaan 36 unit *Dassault Rafale*, 15 unit *Boeing F-15 EX*, dan 15 unit *Hercules C 130J*. Ada juga rencana pembelian dua unit *multi role tanker transport (MRTT)*, 30 radar *ground-controlled interception (GCI)*, dan tiga unit *UAV system*.

Tentu saja, tidak semua pengadaan secara detail ditulis di sini. Hanya saja, melihat deretan alutsista yang diincar TNI membuat sebagian kalangan bertanya-tanya apakah bisa target itu terpenuhi? Hal itu memang harus diakui, pengadaan alutsista di tiga matra tersebut menjadi perbincangan di beberapa kalangan hingga menarik untuk diulas.

Apalagi, Menhan dalam Rapim TNI berharap, setidaknya hingga 2024 atau masa akhir pengabdiannya, daftar pengadaan bisa terpenuhi di angka 98 persen. Target ambisius, namun sangat dinantikan TNI. Untuk bisa membeli semua alutsista yang masuk dalam daftar, Kemhan telah menyiapkan road map dengan mengandalkan pinjaman luar negeri

Pesawat Tempur Dassault Rafale



Sumber foto: id.wikipedia.org

tahun 2020-2024 sebesar 21 miliar dolar AS atau sekitar Rp 299,83 triliun.

Belum lagi, Menhan Prabowo Subianto sudah menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) dengan Menhan Prancis Florence Parly dan Menhan AS Mark Esper saat lawatan ke kedua negara tersebut pada 2020. Apalagi, saat Menhan Prabowo Subianto bertemu Parly di Paris dua kali, berikutnya media setempat memberitakan jika pemerintah Prancis menyetujui penjualan beberapa alutsista sekaligus kerja sama yang diklaim menguntungkan kedua negara tersebut. Sehingga persoalannya, kini tinggal di pembayaran, sebelum barang dikirim ke Indonesia.

Yang patut diingat, Menhan Prabowo pernah menekankan, pertahanan adalah investasi, bukan beban. Menurut dia, negara memiliki pertahanan kuat akan aman dan damai. Jika sebuah negara aman dan iklimnya damai maka menjamin ekonomi baik. Hal itu akan menarik investor untuk datang menanamkan modalnya di negara tersebut.

“Kita butuh negara yang aman dan stabil, untuk negara aman dan stabil kita perlu pertahanan yang kuat untuk menjaga keutuhan wilayah kita dan kedaulatan kita,” kata mantan Panglima Kostrad tersebut saat berbicara di Rapim Kemhan 2020.

Menhan Prabowo Subianto mengajak para pengambil kebijakan di tingkat nasional memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya modernisasi TNI dan investasi dalam bidang pertahanan. Karena kekuatan pertahanan negara berbanding lurus dengan investasi yang akan masuk ke negara tersebut. Atas dasar itu, Prabowo Subianto ingin sistem pertahanan ke depan bertumpu pada sumber daya nasional agar Indonesia menjadi negara yang kuat.

Menhan Prabowo menekankan agar semua pihak dapat saling meningkatkan kerja sama yang erat dalam rangka tercapainya pembangunan postur kekuatan pertahanan negara. Di sini, kekuatan pertahanan negara tidak semata hadirnya alutsista baru, melainkan juga bersatunya kekuatan rakyat Indonesia menghadapi potensi ancaman yang muncul. Karena itu, pendiri bangsa ini dalam menyusun pertahanan negara tertuang dalam UUD 1945, yaitu sistem pertahanan rakyat semesta.

#### Alutsista terkini

Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa pernah menyinggung keinginan TNI AD untuk membeli helikopter serbu dan angkut terkini. Memang, saat ini, TNI AD memiliki helikopter angkut MI-17 buatan Rusia. Meski kapasitas angkutnya sudah cukup besar bisa memuat 30-35 personel, Jenderal TNI Andika Perkasa menganggap TNI AD perlu helikopter angkut lainnya sebagai alternatif.

"Bukan hanya Helikopter Osprey saja. Dalam (daftar alutsista) yang kami sempat usulkan ada helikopter AW juga dan *Blackhawk* juga," kata Andika kepada wartawan di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklatad, Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan, 26 Oktober 2020.

Menurut Kasad, Jenderal TNI Andika Perkasa, kebutuhan helikopter TNI AD sesuai dengan karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara

kepulauan. Hanya saja, ia memahami, situasi keuangan negara belum pulih akibat pandemi Covid-19. Karena itu, pihaknya tidak memaksakan pengajuan alutsista yang dilakukan TNI AD kepada pemerintah.

"Helikopter angkut tadi, seharusnya kami punya yang lebih besar. Helikopter serang misalnya Apache, kami seharusnya punya lebih banyak, tidak hanya delapan saja," kata mantan Komandan Paspampres tersebut.

Rencana pengadaan alutsista besar-besaran itu juga dibenarkan Kasau, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Dalam konferensi pers di sela Rapim TNI AU, Kamis (18/2), Kasau menyinggung TNI AU yang bakal membeli pesawat tempur generasi 4.5, yaitu *Dassault Rafale* buatan Prancis dan *Boeing F-15 EX* buatan Amerika Serikat (AS) untuk rencana strategis hingga 2024.

Selain itu, menurut, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, TNI AU juga mengincar pesawat berupa *multi role tanker transport* dan pesawat angkut *Hercules* seri terbaru C-130 J, pesawat berkemampuan *airborne early warning*, pesawat tempur tanpa awak (UCAV) CH-4, radar GCI 3, dan berbagai alutsista lainnya.

"Dari berbagai upaya tersebut, kini telah mulai menampakkan titik terang. Mulai tahun ini hingga 2024, kita segera merealisasikan akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap," kata Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di gedung IG Dewanto, Mabesau, Cilangkap.

Menurut dia, rencana pengadaan alutsista TNI AU telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dari kondisi global maupun kapasitas negara. "Meski memiliki pedoman postur, renstra (rencana strategis), dan *minimum essential force*, namun implementasinya sangat bergantung pada berbagai faktor dan kondisi yang terus berubah secara dinamis," kata Kasau, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.



Sumber foto : DISPENAL

Tidak mengherankan, karena perubahan keputusan di level pimpinan TNI, Sukhoi Su-35 yang sudah lama digadang-gadang untuk dibeli, malah tidak masuk dalam daftar pengadaan hingga 2024. Hanya saja, hal itu tidak masalah. Lantaran TNI AU sudah memasukkan pesawat tempur canggih Rafale dan F-15 EX sebagai pengantinya.

Khusus pesawat tempur tersebut nantinya digunakan sebagai pengganti F-5 Tiger yang sudah dikandangkan (*grounded*) sejak 2016 akibat sering kecelakaan. Sudah lima tahun berlalu, pesawat pengganti belum datang. Sehingga diharapkan, baik Rafale maupun F-15 EX bisa segera datang untuk memperkuat armada TNI AU.

Menurut Kasau, seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan TNI AU, telah menganalisis dan membahas rencana penyelesaian masalah pengadaan alutsista tersebut. Pihaknya menargetkan, modernisasi seluruh pesawat tempur dimulai pada 2021.

Mantan Komandan Lanud Halim Perdanakusuma tersebut menjelaskan, proses pengadaan alutsista modern bertujuan untuk memperkuat kekuatan TNI di udara serta menjaga kedaulatan negara. Selain itu, pengadaan alutsista juga memiliki kontribusi upaya diplomasi pertahanan dengan negara lain yang bernilai strategis terhadap konstelasi politik global.

"Esensi terpenting dari penambahan alutsista bukanlah pada penambahan jumlah platformnya. Namun, yang jauh lebih esensial adalah pada peningkatan kemampuan secara signifikan yang dapat kita berdayagunakan dalam menjaga kedaulatan negara di udara," kata Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Karena itu, fokus TNI AU tidak semata-mata pada pembelian pesawat tempur dan sejenisnya, melainkan juga pembinaan kemampuan personel dan pemeliharaan alutsista agar tetap berada di level tertinggi. "Kita harus memastikan kesiapan personel dan satuan dalam mengoperasikan dan memelihara berbagai alutsista matra udara, serta melaksanakan berbagai tugas TNI Angkatan Udara secara profesional dan dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Kasau.

Sementara itu, beberapa alutsista yang ingin diboyong TNI AL, meliputi lima unit kapal selam Scorpene dan kapal selam beberapa jenis, termasuk enam unit kapal cepat rudal (KCR) bahan komposit 52 meter kecepatan tinggi, dan tiga KCR buatan dalam negeri 60 meter. Khusus untuk kapal selam Scorpene, kepastian itu juga sudah pernah dilaporkan Janes, situs khusus militer pada 2 Desember 2020. Dalam ulasannya, TNI AL sudah tertarik membeli tipe Scorpene 1000 (50 meter) sejak 2016.

"2021 harus lebih baik dari 2020. Lebih banyak kapal yang beroperasi di laut, lebih banyak pesawat yang terbang, lebih banyak pasukan dan kendaraan tempur yang diopersikan dan kita (TNI AL) harus lebih tanggap dan lebih cepat hadir di garis depan, lebih tangkas dalam menuntaskan tugas," ujar Laksamana TNI Yudo Margono saat Rapim TNI AL 2021 di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, 18 Februari 2021.

Terbaru, TNI AL diperkuat dua kapal perang Republik Indonesia (KRI) jenis angkut tank (AT), yang diberi nama KRI Teluk Weda-526 dan KRI Teluk Wondama-527. Peresmian dua KRI AT-8 dan AT-9 tersebut dilakukan oleh Laksamana TNI Yudo

Margono di galangan PT Bandar Abadi Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu (3/3).

Hadir pula Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabarahanan) Kemhan, Marsda TNI Yusuf Jauhari, mewakili Sekretaris Jenderal Kemhan, Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto dan Komisaris PT Bandar Abadi Stanly Rojali yang ikut menekan tombol sirine tanda peresmian dua KRI tersebut.

Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan, TNI AL terus memodernisasi alutsista guna memenuhi target dalam *Minimum Essential force (MEF)* III sampai tahun 2024. Karena itu, TNI AL terus mendatangkan alutsista baru hingga beberapa tahun ke depan. "Saya berharap agar kehadiran kedua kapal ini dapat meningkatkan performa pelaksanaan tugas-tugas TNI Angkatan Laut," kata Kasal. \*\*\*



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Rabu (17/2), memimpin acara Entry Meeting (Taklimat Awal) Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2020 pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, oleh BPK RI di Kemhan.



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2021, Selasa (16/2) di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap.



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Rumah Sakit dr. Suyoto, yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan pasien Covid-19, Kamis (14/1) melaksanakan vaksinasi pertama bagi 25 tenaga kesehatan yang bekerja di RS dr. Suyoto, Bintaro Jakarta Selatan..



Sekjen Kemhan RI Marsdyo TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., mengawali mendapatkan vaksinasi Covid-19 bagi pegawai Kemhan RI, hari pertama Senin (8/3) di Gedung Urip Sumohardjo, Kemhan, Jakarta. Vaksinasi ini berlangsung dari tanggal 8 sampai dengan 29 Maret 2021 diikuti oleh seluruh pegawai Kemhan..



Direktur Kerjasama Internasional Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan) Brigjen TNI J. Binsar PS, S.E., M.Han mengikuti pertemuan ASEAN Defence Senior Officials' Meeting Working Group (ADSOM WG), Selasa (2/2), di Kemhan



Kapuslapbinkuhan Kemhan Laksma TNI Agus Supriadi, S. Sos., pimpin pelaksanaan Rekonsiliasi Terpadu (Badan Perencanaan, Logistik, dan Keuangan) Tahunan Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2020 Unaudited, Selasa (9/2).



Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI M. Herindra bersama Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury melaksanakan Rapat Kerja BUMN Industri Pertahanan (Indhan) 2021 di PT Len Industri (Persero), Bandung (5/3), dilanjutkan dengan peninjauan langsung fasilitas produksi PT Len Industri (Persero).



Kepala Pusat Alpalhan Baranahan Kemhan Marsma TNI Asfan Jauhari, S.A.P., M.Si, Sabtu (27/2), meresmikan peluncuran Kapal Angkut Tank (AT-8) H-355 untuk TNI AL yang diberi nama KRI Teluk Weda-526, dan diproduksi oleh PT. Bandar Abadi Ship Builders and Dry Docks di Batam.



Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat NTT yang memilih untuk tetap menjadi warga negara Indonesia setelah jajak pendapat referendum Timor Timur pada tahun 1999 yang disampaikan dalam sambutannya oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Dadang Hendrayudha pada Kamis (5/3), dan melanjutkan pemberian penghargaan kepada 11.845 Warga Negara Indonesia di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pernah berperan aktif dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

# REKRUTMEN KOMPONEN CADANGAN

MATRA DARAT T.A 2021

Kementerian Pertahanan akan membuka pendaftaran program latihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi masyarakat Indonesia. Komponen ini akan memperkuat komponen utama pertahanan jika negara dalam keadaan darurat atau bahaya.



RENCANA PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN ONLINE

**MEI 2021**



LAMA PELATIHAN  
DASAR MILITER  
**3 BULAN**

## HAK CALON KOMCAD :

- ⌚ Uang saku
- elmet Perlengkapan perseorangan lapangan
- ✚ Perawatan kesehatan
- 👤 Jaminan kecelakaan kerja dan kematian
- badge Tunjangan operasional saat mobilisasi

## HAK ANGGOTA KOMCAD :

- ⌚ Uang saku
- elmet Perlengkapan perseorangan lapangan
- ✚ Perawatan kesehatan
- 👤 Jaminan kecelakaan kerja dan kematian
- badge Tunjangan operasional saat mobilisasi
- 🏆 Penghargaan

## PERSYARATAN:

- Laki-laki
- Usia 18-35 Tahun
- Sehat Jasmani & Rohani

## PROSES SELEKSI:

- Pendaftaran Online di: [www.kemhan.go.id/pothan](http://www.kemhan.go.id/pothan)
- Pendaftaran secara fisik
- Pemanggilan Latsarmil
- Seleksi





MINISTRY OF DEFENCE OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA

ENGLISH

ISSN 1693-0231



WIRA  
MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN



# General Policy of State Defense Year 2020-2024

EDITION 1 2021



[www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)



Kementerian Pertahanan  
Republik Indonesia



kemhanri



@Kemhan\_RI



Kemhan RI



## EDITORIAL

### Advisors:

Secretary of MoD  
Air Marshal TNI Donny Ermawan T., M.D.S.

### Editor in Chief:

Head of Public Relation Bureau of the Secretariat  
Defence of MoD  
Air Commodore TNI Penny Radjendra, S.T.,  
M.Sc., M.Sc.

### Managing Editors :

Colonel Hadi Prayitno  
Colonel Joko Riyanto, S.Sos, M.M

### Editors:

M. Adi Wibowo, S.Sos, M.Si.,  
Lt.Col Arif Nursaid, S.Sos, M.Sc  
Lt.Col Ir. Susanto, M.Si,  
Major Bondy Mulyatmo, S.Sos, M.M

### Reporters:

Budiono, S.Si

### Ghraphic Designers:

Imam Rosyadi / Adi Setiawan

### Fotografers:

Acep Sutawijaya / Sasi Indah P

### Distributions & Sirkulations:

Captain Lindu Baliano  
Mandiri Triadi, S.Sos, M.M

### Published by:

Public Relation Bureau of the Secretariat  
Defence of MoD - Merdeka Barat Street No. 13-  
14, Jakarta -Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

Dear WIRA readers,

Praise be to the presence of Almighty God, because with His permission, Wira Kemhan Magazine greets WIRA readers again through edition one in 2021. In this edition, the editorial team will present some information and articles that are worthy of being listened to by readers. WIRA.



The information we provide is related to the activities of the Ministry of Defense leadership which are summarized in the Leadership Focus rubric. Besides that in this edition, we also present all the defense news.

There is an article that the editorial team presents regarding some of General Policy of State Defense Year 2020-2024, State Defense Policy Year 2021, Establishment of Reserve Components as Mandate of Government Regulation No. 3 of 2021 and Law No. 23 of 2019 concerning PSDN, Government Issues the Regulation Number 3 Year 2021 Forms of Historical Efforts to Develop the Total People's Defense System, and Massive Main Weapon System Modernization For the Tri-Service.

Meanwhile, in the Lens Focus Column, the editorial staff provides brief information regarding the tasks given by photos with captions of the Ministry of Defense leadership .

With humility, we hope that the information and articles that we present in edition one in 2021 of WIRA Magazine can add insight and knowledge as well as benefits for loyal WIRA readers wherever they are and on duty.

To enrich this WIRA magazine article, we always expect the participation of readers to send writing, whether in the form of articles, opinions, information, feedback or criticism and suggestions, via email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). WIRA Magazine can also be accessed in the online network on the page [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

Happy reading....!!!

Head of Public Relations Bureau,

Air Commodore TNI Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc.



# Contents

## Main Focus>>

- # Minister of Defense Delivers State Defense Policy in 2021, among others, Continuing the Handling of Covid 19

6-9



Defense Minister Prabowo Subianto presented the State Defense Implementation Policy in 2021 as a guideline for the implementation of future activities. The country's main defense policy in 2021 includes continuing the handling of the covid 19 pandemic. The Main Policy of State Defense in 2021 was delivered by the Minister of Defense at the 2nd day of the Ministry of Defense Leadership Meeting (Rapim Kemhan) held at the Kemhan office, Jakarta, Wednesday (13/1).

- # Strong Defense and Security Independence Realizes a Resilient Indonesia

10-15

## Leaders Focus>>

16-35

- # Indian Ocean Nation Defense Cooperation Is Critical in Facing Future Challenges
- # Deputy Minister of Defense Working Visit to The Chief of Staff of The Navy
- # Rapim UO Kemhan Year 2021 as a Forum for Evaluation and Delivery of Leadership Policy
- # Secretary General of MoD Conducts Work Visit to Pusrehab Kemhan And Rs dr. Suyoto
- # Secretary General of MoD Visit to Cengkareng Hospital For Comparative Study of Hospital Development dr. Suyoto
- # Minister of Defense Lead Entry Meeting Financial Report Examination Kemhan/TNI FY. 2020
- # Signing of Inspectorate General of The MoD FY. 2021 Performance Agreement
- # Unhan and the British Embassy Conducted a Short Course on Managing Defense in a Wider Security Context (MDWSC)
- # The Handover of the Head of Public Relations Bureau Secretary General Ministry of Defense



## Article>>

36-41

### # General Policy of State Defense Year 2020-2024

(Writer : Colonel. Agung Karyanto, S.Sos., M.Si)



In general, the general policy of state defense (Jakum Hanneg) consists of two main parts; the torso part consists of 7 articles and the contents of the policy in the form of attachments that describe the main points of state defense policy in 2020-2024.

42-55

### # STATE DEFENSE POLICY YEAR 2021

56-63

### # Establishment of Reserve Components as Mandate of Government Regulation No.3 of 2021 and Law No. 23 of 2019 Concerning PSDN (Writer : Colonel. Agus Setyo Hartono, S.A.P)

64-73

### # Government Issues the Regulation Number 3 Year 2021 Forms of Historical Efforts to Develop the Total People's Defense System (Writer : Budiono)

74-81

### # Massive Main Weapon System Modernization For the Tri-Service (Writer : Erik Purnama Putra)

## Lens Focus>>

82-84



Defense Minister Prabowo Subianto presented the State Defense Implementation Policy in 2021 as a guideline for the implementation of future activities.



# MINISTER OF DEFENSE DELIVERS STATE DEFENSE POLICY IN 2021, AMONG OTHERS, CONTINUING THE HANDLING OF COVID 19



Defense Minister Prabowo Subianto presented the State Defense Implementation Policy in 2021 as a guideline for the implementation of future activities. The country's main defense policy in 2021 includes continuing the handling of the covid 19 pandemic. The Main Policy of State Defense in 2021 was delivered by the Minister of Defense at the 2nd day of the Ministry of Defense Leadership Meeting (*Rapim Kemhan*) held at the Ministry of Defense (Kemhan) office, Jakarta, Wednesday (13/1). Rapim was attended by the Chief of Army Staff, General TNI Andika Perkasa who also represented the TNI Commander in Chief, the Chief of Staff of the Navy, Admiral TNI Yudo Margono, Chief of Staff of the Air Force, Air Chief Marshal TNI Fadjar Prasetyo and Secretary General of the Indonesia Mindef Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, as well as several officials in the Kemhan and TNI settings.

The Minister of Defense revealed that, in the Budget Allocation of Kemhan and TNI In Fiscal Year 2021, among others, in addition to supporting national priority projects, maintenance and procurement of TNI Defense Equipment in Fiscal Year 2021 and the welfare of TNI soldiers and civil servants, also allocated to anticipate the continued handling of the Covid-19 pandemic.



Photo Source : Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Furthermore, the Minister said that the dynamics of strategic environmental development have created complex hazards, challenges and risks. The development of the strategic environment always brings changes to the complexity of threats and challenges to the defense of the country. "The complexity of the threat needs to be perceptibly understood by all elements of the country's defense. Therefore, the Ministry of Defense continues to develop the country's defense strategy and policy as well as its implementation", said the Minister of Defense.

Kemhan continues to formulate a national defense policy predicting threats, national defense doctrine, geographical conditions of the Country of Indonesia as well as state policies in support of the national interest. On the basis of these four aspects, some of the main policies of defense of the country in 2021 include; First, Continuing the handling of the Covid-19 pandemic, through increasing defense capacity in the form of infrastructure and health services of Kemhan Hospital and TNI. Second, The Preparation of Human Resources of State Defense through the establishment of undergraduate program Defense University (Unhan).

Third, Strengthening the function of defense resource development and the development of national logistics reserves. Fourth, Continuing the development of the TNI posture for the fulfillment of basic forces through the modernization of defense equipment for the Army, the Navy and the Air Force, as well as personnel development by applying the principle of right sizing and proportional grows policy adapted to the development of TNI units.

Fifth, the establishment of reserve components of the Army, Navy and the Air Force that are adapted to the needs of each service to strengthen the main components. Sixth, Strengthening defense and security cooperation, especially with ASEAN countries and the South Pacific region.

Seventh, strengthening defense in strategic strait areas by strengthening coastal missile defence system and coastal surveillance system. Eighth, the development of the national defense industry through increased promotion of cooperation and implementing trade return policies, local content and offsets to improve industrial capabilities.

And finally, the Ninth, the development of defense areas based on large islands independently, with the preparation of food reserves, water, energy and other national infrastructure facilities to realize the center of defense logistics centers scattered throughout the Republic of Indonesia.

Meanwhile, Head of Public Relations Bureau Secretariat General Indonesia MoD (Karo Humas Setjen Kemhan) Brigadier General I.E. Djoko Purwanto explained, the implementation of Rapim Kemhan in the year 2021 was carried out simply and limited invitations while still applying health protocols. Rapim Kemhan Agenda 2021 day 2, among others presents a number of resource persons directly and virtually, among others, the Minister of Political Law and Security, Minister of Finance, Minister of PPN / The head of Bappenas, Chairman of the CPC and Minister of Environment and Fisheries.

Rapim Kemhan activities ended with the submission of guidance documents - guidelines in the implementation of future state defense by the Minister of Defense to each unit organization in this case received by the Commander in Chief of the TNI represented Chief of Army Staff, and Secretary General of the Ministry of Defense.

The Guidelines for the implementation of the state defense include Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 on the general policy of national defense 2020 - 2024, Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 3 of 2021 concerning The Implementation Regulation of Law No. 23 of 2019 on The Management of National Resources for State Defense, State Defense Policy year 2021 and Budget Mandate Fiscal Year 2021.

Karo Humas Setjen Kemhan further explained, through the implementation of Rapim Kemhan Year 2021 is expected to realize synergy and closer coordination of all elements of the country's defense for the smooth and successful tasks ahead. Rapim Kemhan Year 2021 takes the theme "Strong Defense and Security Independence, Realizing a Resilient Indonesia".

The theme means that all components of the nation must unite to uphold the sovereignty of the country, territorial integrity and the safety of all nations in order to face various threats, disturbances, obstacles and challenges in the future. By staying united, defense and security will certainly be stronger and Indonesia will be more resilient.\*\*\*

# "Strong Defense and Realizes a Resilient Indonesia"

**A**s a form of readiness in carrying out tasks in 2021, the Ministry of Defense held a Meeting of The Ministry of Defense Leaders (*Rapim Kemhan*) in 2021 at the Ministry of Defense office, Jakarta.

The implementation of Rapim Kemhan has an important meaning as a forum to convey the country's defense policy that will be a guideline in the implementation of State Defense year 2021. Through this Rapim, it is also expected that the synergy and closer coordination of all elements of the country's defense for the smooth and successful tasks ahead.

Since the atmosphere of the Covid-19 pandemic, Rapim Kemhan Year 2021 is implemented simply and limited invitations with face-to-face and virtual methods, and still pay attention to strict health protocols and guided by government policies on restrictions on community activities or tightening large-scale social restrictions (PSBB).

The theme of Rapim Kemhan Year 2021 is "Strong Defense and Security Independence, Realizing a Resilient Indonesia". Rapim was officially opened by Defense Minister Prabowo Subianto and held for two days, on January 11, 2021 and January 13, 2021. Some of the emphasis and attention conveyed by the Minister of Defense at Rapim Kemhan 2021 to all Kemhan ranks on the occasion are as follows; to improve cooperation, collaboration, coordination and synergy to ensure the implementation of the work program in 2021 in a good and effective

manner, carrying out evaluations and improvements throughout the Kemhan task force.

The agenda of the 1st day of Rapim Kemhan Year 2021 includes, the delivery of achievements and work that has been carried out by Kemhan as a reflection of a year of performance in the field of implementation of state defense policy in the Advanced Indonesia Cabinet.

The Reflection/Evaluation of Activities of all Kemhan Task Force in Fiscal Year 2020 was delivered by Inspectorate General Kemhan Lt. Gen. TNI Ida Bagus Purwakarsa S.I.P., M.M., and Exposure to The Implementation of Defense Development in aspects of Human Resources and Technology by the Rector of Defense University, Vice Admiral TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR. Furthermore, the presentation of the projections and national defense policy in 2021 by Director General Defense Strategy of MoD Maj. Gen. TNI Dr. rer. Pol. Rodon Pedrasan, M.A.

While the Agenda Rapim Kemhan Year 2021 day 2 presents a number of resource persons both directly and virtually, among others the Minister of Political Law and Security, Minister of Finance, Minister of PPN / The Head of Bappenas, Chairman of the CPC and Minister of Environment and Fisheries.

The second day was Rapim was attended by the Chief of Army Staff General TNI Andika Perkasa who also represented the TNI Commander in Chief, the Chief of Staff of the Navy, Admiral TNI Yudo Margono, Chief of Staff of the Air Force, Air Chief

# Security Independence, lient Indonesia”



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Marshal TNI Fadjar Prasetyo and Secretary General of the Indonesia MoD, Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, as well as several officials in the Kemhan and TNI settings.

The Agenda of Rapim Kemhan year 2021 ended with the submission of guidance documents - guidelines in the implementation of future state defense by the Minister of Defense to each Organization Unit in this case received received by the Commander in Chief of the TNI represented Chief of Army Staff, and Secretary General of the Ministry of Defense.

The guidelines for the implementation of the country's defense include Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 8 on the general policy of national defense 2020 - 2024, Government

Regulation of the Republic of Indonesia No. 3 of 2021 concerning the Implementation Regulation of Law No. 23 of 2019 on The Management of National Resources for State Defense. State Defense Policy of 2021 and Budget Mandate of Fiscal Year 2021.

The Minister of Defense when delivering his opening remarks revealed that the task of Kemhan is to conduct affairs in the field of defense to assist the President of the Republic of Indonesia in organizing the government of the country. The defense of the state aims to safeguard and protect the sovereignty of the state, the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia as well as the safety of all nations from all forms of threats. As such, all efforts to administer the country's defense should refer to that goal. The defense of the country serves to realize and defend the entire territory of



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

the Republic of Indonesia as a single defense unit.

Indonesia's national defense system is a universal people's defense system that relies on all the power components of its resources to defend the sovereignty of the country. In line with that, the theme taken at Rapim Kemhan Year 2021 is "Strong Defense and Security Independence, Realizing a Resilient Indonesia", which means that all components of the nation must unite to uphold the sovereignty of the country, territorial integrity and the safety of all nations in order to face various threats, disruptions, obstacles and challenges in the future. By staying united, defense and security will certainly be stronger and Indonesia more resilient", said the Minister.

Furthermore, The Minister said that the dynamics of strategic environmental development have created

a complex spectrum of threats, challenges and risks. The development of the strategic environment also continues to bring changes to the complexity of threats and challenges to the defense of the country. The complexity of the threat needs to be understood and understood by all elements of the country's defense.

After all, Kemhan continues to develop the country's defense strategy and policy as well as its implementation. Kemhan continues to formulate the country's defense policy in accordance with the prediction of threats, the doctrine of national defense, the geographical condition of the Indonesian state as well as the state policy in supporting the national interest.

On the basis of these four aspects, some of



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

the main policies of national defense in 2021 include Continuing the handling of the Covid-19 pandemic, Preparation of State Defense Human Resources, Strengthening the function of defense resource development and development of national logistics reserves, Continuing the development of the TNI posture for the fulfillment of basic forces, Establishment of spare components, Strengthening defense and security cooperation, Strengthening defense in strategic strait areas, Development of national defense industry and development of defense areas.

As for the Kemhan priority program as stated in the national medium-term development plan in 2020-2024, including, the mental revolution of Pancasila ideology, the development of Kalimantan region and maintaining national security stability.

To realize these priority programs, among others by seeking the management of national resources for the defense of the country. It aims to transform national resources through the defense of the state, the formation of reserve components and the arrangement of supporting components. Kemhan Continues Handling Covid-19

From nine basic national defense policies in 2021 that have been delivered by the Minister of Defense in Rapim Kemhan 2021, one of the first is to continue handling the Covid-19 pandemic.

Kemhan policy in continuing the handling of Covid-19 is in line with the policy of the President of the Republic of Indonesia, where the government will continue the programs that have been implemented properly in 2020 to be carried out in 2021. President Joko Widodo stressed that the program of handling the Covid-19 pandemic and the provision of social

assistance (bansos) will continue.

As is known, in 2020 the whole world including Indonesia experienced the coronavirus pandemic (Covid-19). Not only does it cause a health crisis, it also causes an economic crisis. Entering the beginning of 2021 it seems that the pandemic will not be finished yet. Therefore, Kemhan needs efforts to control the case of Covid-19.

"In addition to supporting national priority projects, maintenance and defense procurement of the TNI in the Fiscal Year 2021 and the welfare of

TNI soldiers and civil servants in the Allocation of Budget Kemhan and TNI Fiscal Year 2021 are also allocated in anticipation of the continued handling of the Covid-19 pandemic", said the Minister. The Minister further revealed that Kemhan's efforts in participating in the handling of Covid-19, namely through increasing defense capacity in the form of infrastructure facilities and health services of Kemhan Hospital and TNI.\*\*\*



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Deputy Minister of Defense of The Republic of Indonesia Lt. Gen. M. Herindra, M.A., M.Sc., Present for video conference Indian Ocean Region (IOR) Defence Minister Conclave.



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

**D**eputy Minister of Defense of the Republic of Indonesia Lt. Gen. TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Thursday (4/2) representing the Minister of Defense of the Republic of Indonesia became the keynote speaker in the Indian Ocean Region (IOR) Defence Minister Conclave followed by 26 friendly countries, in a video conference in Kemhan, Jakarta. The Minister of Foreign Affairs in his written remarks read by Deputy Minister of Defense of the Republic of Indonesia (Wamenhan RI) emphasized that this

meeting is very important as an effort to improve cooperation in maintaining peace and security among countries in the Indian Ocean region, for the common good, especially because of the increasing complexity of challenges and threats that occur in the Indo-Pacific region today and in the future.

"Establishing close cooperation and contributing positively to regional security stability through defense and security cooperation, is very important, and the IOR Defence Minister Conclave forum

# INDIAN OCEAN NATION DEFENSE COOPERATION IS CRITICAL IN FACING FUTURE CHALLENGES

is a strategic forum to discuss regional defense cooperation", said the Minister. The Indian Ocean is the third largest ocean and is among the most important marine lines of communication in the world, and an important route for international trade and transportation. In addition, countries in the Indian Ocean Region are home to about 2.7 billion people or about 35% of the world's population with abundant cultural diversity, natural resources and economic potential and geopolitical significance. Another thing conveyed by the Minister of Foreign

Affairs is about the covid-19 pandemic that shakes the economic capabilities of countries in the region and must be faced together. Therefore, the improvement of the welfare of countries in the region, is highly dependent on regional peace and security. The virtual forum was attended by Director General Defense Strategy of MoD Maj. Gen TNI Dr. rer. Pol. Rodon Pedrason, M.A., and Director Defense International Cooperation Directorate General Defense Strategy of MoD (*Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan*) Brigadier General J. Binsar Parluhutan, S\*\*\*

Deputy Minister of Defense (Wamenhan) Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., conducted a working visit to the Chief of Naval Staff (Kasal) Admiral TNI Yudo Margono, S.E., M.M.,



# DEPUTY MINISTER OF DEFENSE WORKING VISIT TO THE CHIEF OF STAFF OF THE NAVY



Deputy Minister of Defense (Wamenhan) Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., conducted a working visit to The Chief of Staff of The Navy (Kasal) Admiral TNI Yudo Margono, S.E., M.M., Monday (8/2) at the Headquarters of the Navy, Cilangkap, East Jakarta.

This working visit is a friendship and introduction as Wamenhan, after being appointed by President Joko Widodo in December 2020. Through this working visit, Wamenhan hopes to further strengthen cooperation between state agencies, facilitate communication and unite vision and perception.

Welcoming the working visit, Kasal conveyed his congratulations to Muhammad Herindra, M.A., for his appointment as Deputy Minister of Defense.

Also present accompanied Wamenhan in a working visit to Mabesal, Director General of Defense Planning MoD (*Dirjen Renhan Kemhan*), Maj. Gen.TNI Budi Prijono and Director General of Defense Power MoD (*Dirjen Kuathan Kemhan*), Air Vice Marshal TNI N. Ponang Djawoto.

Meanwhile, Chief of Navy Staff was accompanied by Deputy Chief of Navy Staff, Vice Admiral TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., and Assistance of Planning and Budget Kasal, Rear Admiral TNI Muhammad Ali, S.E., M.M.\*\*\*

Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

# RAPIM UO KEMHAN YEAR EVALUATION AND DELI

Secretary General of the Ministry of Defense, Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto M.D.S opens he Ministry of Defense of the Republic of Indonesia held a Meeting of leaders of the Kemhan Organizational Unit in 2021



Photo Source : Public Relation Bere

# 2021 AS A FORUM FOR OF VERY LEADERSHIP POLICY



The Ministry of Defense of the Republic of Indonesia held a Meeting of leaders of the Kemhan Organizational Unit in 2021 which was opened and led by the Secretary General of the Ministry of Defense, Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto M.D.S accompanied by Inspector General of the Ministry of Defense, Lt. Gen. TNI Ida Bagus Purwalaksana S.I.P., M.M., and Rector Defense University, Vice Admiral TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR, CIQaR, Wednesday (27/1) in Urip S Meeting Room, Kemhan, Jakarta.

In his opening remarks, the Secretary General of MoD explained that Rapim UO Kemhan in 2021, is expected to be a forum for the evaluation of programs and budgets of UO Kemhan Year 2020 as well as the delivery of leadership policies in 2021.

This year's Rapim UO Kemhan theme "Building Characterful Performance to Support Strong Defense and Security Independence", is intended to invite all decision-making officials in the Kemhan environment to participate in building the performance of organizations and employees to continue to be professional and characterful in carrying out the task of organizing state defense.

The Secretary General of MoD also explained that Kemhan continues to improve the development program of state defense human resources to all TNI employees and soldiers in order to create a work culture and improve professionalism and work discipline, so that Kemhan's performance will be better.

Some of the emphasis of the Secretary General of Kemhan to the leaders of the Kemhan work group unit include; avoiding the implementation of activities with the use of budgets that will result in budget waste, and

Photo: Bureau of the Secretariat General of MoD

the need for breakthroughs as an effort to carry out tasks and functions to the maximum, faced with the Covid-19 Pandemic which until now has not given any indication of imminent end. Furthermore, the Secretary General also emphasized efforts to complete various programs and activities that cannot be implemented in 2020 as a result of the policy of refocusing and reallocating the budget.

The Secretary General also expects that in 2021 all program and budget activities can run in accordance with the established plan and implementation of the Planning and Budgeting System Design (RSPP) in accordance with the provisions so that the management of future planning and budgeting becomes better.

In rapim UO Kemhan was also conveyed attention to the performance of UO Kemhan Year 2020 by Inspectorate General (Irjen) Kemhan, the delivery of work programs and budgets UO Kemhan Year 2021 by the Head of Planning and Finance Bureau Secretariat General MoD (Karorenku Setjen Kemhan) Brigadier General TNI Amad Sugiyono, S.E., M.M., as well as the delivery of performance improvement and management governance in Kemhan by the Head of Governance Bureau (Karo Ortala) Setjen Kemhan

Brigadier General TNI Antonius Bambang Budi Wibowo. Director of Health of Directorate General of Defense Power, Commodore TNI Dr. Arie Zakaria, Sp.OT, Sp.KL also gave an exposure to the current situation of the Covid-19 pandemic and the steps taken by the Ministry of Defense.

The speakers in rapim UO Kemhan this time were from the Director General of Budget for Coordinating Minister for Politics, Law and Security (Polhukam) and The Budget Section of the State Treasurer of the Ministry of Finance Dr Dwi Pujiastuti Handayani, M.Si., which was held by video conference, discussing the implementation of 5 (five) presidential instructions on the covid-19 vaccine 100% free to the public.

Furthermore, in rapim UO Kemhan was carried out the submission of PPPA UO Kemhan Year 2021 and in stages Performance Agreement (PK) from Echelon IV to Echelon III, Echelon III to Echelon II, Echelon II to Echelon I, and Echelon I to the Secretary General of Kemhan. The submission and acceptance of PPPA and Performance Agreement (PK) was carried out symbolically from representatives of Satker Kemhan. Present as participants in rapim UO Kemhan echelon I and II officials in the Kemhan, TNI HQ / Force, and Official KKIP \*\*\*



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat Defence of MoD

Secretary General of the Ministry of Defense Air Marshall TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S conducted a Working Visit to MoD Rehabilitation Center and Dr. Hospital. Suyoto and greeted directly by Kapusrehab Kemhan Brigadier General TNI dr. Nana Sarnadi, Sp. OG., M.M.R.S,



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

# SECRETARY GENERAL OF MOD CONDUCTS WORK VISIT TO PUSREHAB KEMHAN AND RS DR. SUYOTO

**S**ecretary General of the Ministry of Defense Air Marshall TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S conducted a Working Visit to MoD Rehabilitation Center and Dr. Hospital. Suyoto and greeted directly by The Head of MoD Rehabilitation Center (*Kapusrehab Kemhan*) Brigadier General TNI dr. Nana Sarnadi, Sp. OG., M.M.R.S, Tuesday (19/1) at the Hall Pusrehab Kemhan Jakarta.

Based on regulation of the minister of defense no 14 of 2019 concerning the organization and working system of the Ministry of Defense, the Rehabilitation Center hereinafter referred to as Pusrehab is under and responsible to the Minister through the Secretary General.

Head of Rehabilitation Center of the Ministry of Defense BG dr. Nana Sarnadi, Sp. OG., M.M.R.S in his presentation delivered the Work Program of the Rehabilitation Center of the Ministry of Defense in accordance with the Ministry of Defense Decree Number: Kep/365/M/IX/2019 dated September 11, 2019, which is organizing The Rehabilitation of

Medical Plenary Return To Combat for People with Disabilities TNI Personnel and organizing Integrated Return To Duty Rehabilitation for People with Disabilities.

Furthermore, Kapusrehab Kemhan said that Social Rehabilitation is an effort to restore the psychic and social disabilities in order to restore confidence and be able to carry out social functions in people's lives.

Kapusrehab also delivered the Integrated Rehabilitation Participants Return To Duty Force XLV Wave II Year TA. 2020 amounted to 30 people consisting of Army 24 People, Navy 4 People and Air Force 2 People while Participants Completed Medical Rehabilitation Return To Combat Force I TA. 2020 numbered 10 people from the Army.

At the end of the Working Visit, the Secretary General of Kemhan conducted a review to several places, such as the Isolation room of patients affected by Covid 19, *Barak Remaja RS dr. Suyoto*, a visit to students with disabilities and review the therapy room at dr. Suyoto Hospital.\*\*\*



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Secretary General of the Ministry of Defense Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., conducted a working visit to the Regional General Hospital (RSUD) Cengkareng,



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

# SECRETARY GENERAL OF MOD VISIT TO CENGKARENG HOSPITAL FOR COMPARATIVE STUDY OF HOSPITAL DEVELOPMENT DR. SUYOTO

**S**ecretary General of the Ministry of Defense, Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., conducted a working visit to the Regional General Hospital (RSUD) Cengkareng, Tuesday (2/2) at Jalan Kamal Raya Bumi Cengkareng Indah, West Jakarta.

This visit is intended in the framework of comparative studies, sharing and sharing experiences with cengkareng hospital related to the planned improvement and development of dr. Suyoto Pusrehab Kemhan Hospital.

The visit of the Secretary General of Kemhan who was also accompanied by several Kemhan officials was welcomed and received by the Director General of RSUD Cengkareng drg. Bambang Suheri, MAP.

The visit was preceded by a speech by the Director of RSUD Cengkareng who also explained the profile of the Director General of RSUD Cengkareng, the speech of the Secretary General of Kemhan, followed by a question and answer and ended with a review of hospital facilities in Cengkareng Hospital.

"The purpose of our visit is essentially we want to get an overview, knowledge from the Director and Staff related to Cengkareng Hospital", said Secretary General kemhan in his speech when received by the Director and the ranks of Cengkareng Hospital.

Secretary General of Kemhan further explained, Kemhan plans to develop and improve dr. Suyoto Pusrehab Kemhan Hospital located in Bintaro, South Jakarta. In addition to functioning as a hospital, and also as a medical Rehabilitation Center, in the future dr Suyoto Hospital is expected to also serve as an Educational Hospital

"There is information Cengkareng Hospital is also so, then it does not hurt if we review as a reference Kemhan in the improvement of the Hospital dr. Suyoto. In addition, through this visit is also expected to get information, knowledge related to the handling of Covid-19", added the Secretary General of Kemhan.

Meanwhile, welcoming the visit, The Director of Rsud Cengkareng expressed his appreciation for the visit of the Secretary General of Kemhan and his ranks. Kemhan's visit is an honor for the entire ranks of Cengkareng Hospital.\*\*\*

Secretary General of the Ministry of Defense Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., conducted a working visit to the Regional General Hospital (RSUD) Cengkareng.



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat Defence of MoD

# MINISTER OF DEFENSE LEAD ENTRY MEETING FINANCIAL REPORT EXAMINATION KEMHAN/TNI FY. 2020

Minister of Defense (Menhan) Prabowo Subianto, Lead the Entry Meeting (Initial Briefing) on the Implementation of Examination of the Ministry of Defense's Financial Report 2020



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

**M**inister of Defense (Menhan) Prabowo Subianto, Wednesday (17/2), lead the Entry Meeting (Initial Briefing) on the Implementation of Examination of the Ministry of Defense's Financial Report 2020 at the Organizational Unit (UO) Kemhan, TNI HQ, Army, Navy, and the Air Force, by Audit Board (BPK) RI in Kemhan, Jakarta. In this event, Member I of the Audit Board of Finance (BPK)/Head of State Financial Examination I Dr. Hendra Susanto, S.T., M. Eng., M.H., CSFA., CfrA, submitted a Letter of Duty and Report of Audit Board (BPK) RI examination results to the Minister.

In his speech, the Minister emphasized to The Head and Sub Head of organizational units both in the setting of UO Kemhan, TNI HQ, Army, Navy, and the Air Force, to prepare the data and documents required by the Audit Team BPK RI, so that the Audit Team can assess that the institution Kemhan / TNI has in accordance with the criteria for the preparation of financial statements. The Minister hopes that the results of activities during 2020, which are faced with refocusing and budget reallocation, can be presented in transparent and accountable financial statements, so as to improve the quality of the Kemhan and TNI Financial Statements in 2020 and can maintain the predicate of Unqualified Opinion (WTP) as received by Kemhan and TNI against the financial statements of Fiscal Year 2019.

In accordance with the mandate of Law No. 15 of 2006 BPK RI is tasked with carrying out an examination of all financial statements of the Ministry / Institution including the Financial Report Kemhan / TNI. The purpose of this examination is to see the extent to which the preparation of financial statements is prepared faced with four criteria, namely, compliance with Government Accounting Standards (SAP), Adequacy of Disclosure, Compliance with Laws and Regulations, and Internal Control System.

After the implementation of this entry meeting, the Audit Team BPK RI will continue the inspection

activities until May 27, 2021 at each UO. In addition, the Audit Team of BPK RI as the audit function and the ranks of UO Kemhan, TNI HQ, Army, Navy, and the Air Force, can synergize shoulder to shoulder in order to realize transparent and accountable financial management and accountability. Therefore, the Minister of Defense advised officials in the UO environment to be cooperative in presenting supporting data and information needed and coordinating and conducting strict reconciliation from the smallest work unit to the echelon level, to minimize the occurrence of data differences and find the best solution in solving them.

Present in the Preliminary Briefing on the Implementation of Examination of the Financial Report Kemhan Year 2020 UO Kemhan, TNI HQ, and the Tri- Services this Chief of Army Staff, General TNI Andika Perkasa, S.E., M.A., M.Sc., M.P.P., Chief of Navy Staff, Admiral TNI Yudho Margono S.E., M.M., and Chief of Air Force Staff, Air Chief Marshal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., Deputy Ministry of Defense Let. Gen TNI M. Herindra, Secretary General of Kemhan, Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto., M.D.S, Inspectorate General Kemhan, Lt. Gen. TNI Ida Bagus Purwakarsana S.I.P., M.M., Rector Defense University, Vice Admiral TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., Inspectorate General TNI Lt. Gen. (Mar) TNI Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr. (Han), and Echelon I Kemhan officials.

Meanwhile, Member I of the Audit Board of Finance (BPK)/Head of State Financial Examination I Dr. Hendra Susanto, S.T., M. Eng., M.H., CSFA., CfrA, who was present accompanied by The Chief Auditor of KN I BPK Novy Gregory Antonius Pelenkuh, in his speech explained, that the initial briefing or entry meeting is one form of communication between the examiner and the entity, in order to create similar perceptions to support the smooth implementation of financial reporting checks.

"Hopefully, Kemhan and TNI will further improve their performance in the management of the State's finances. BPK hopes that the support of data and

information needed by the audit team, therefore active and effective communication between the Audit Team and entities in various choices of communication media, is very important in order for the implementation of the examination to run smoothly," said Hendra Susanto.

While the Chairman of the BPK Audit Team, also emphasized some attention in the UO financial report in 2020, because the Financial Report Kemhan / TNI is very important for the Central Government Financial Report as a whole, considering the large budget amount so that it becomes a barometer of the success of the Central Government Financial Report as a whole. It is also emphasized, that the WTP Opinion that has been received by Kemhan / TNI in the last 3 years is a manifestation of the hard work of Kemhan and UO included in it.

On this occasion, the Head of State Financial Examination I BPK also explained that the Ministry of Defense has played an active role in supporting efforts to handle the Covid-19 pandemic by the Government. The support is provided by allocating resources owned including 110 hospitals in the TNI environment, the use of KRI, aircraft, and land vehicles owned by the TNI. In addition, the Ministry of Defense realized the budget for the preparation and recruitment, technical guidance and assignment of 300 volunteers of the State Defense Support Component (*Komduk Hanneg*) in the Health Sector.

This shows the efforts of the Ministry of Defense to play a role in helping the government meet the needs of health workers (general practitioners, dentists, nurses, midwives and other medical personnel) who are needed for the handling of Covid-19.\*\*\*

Secretary General of Kemhan, Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto., M.D.S, and Inspectorate General of MoD Lt. Gen. TNI Ida Bagus Purwalaksana S.I.P., M.M., after Ceremony.



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD



Photo Source : Public Relation Bureau

**S**ecretary of Inspectorate General of the Ministry of Defense (*Ses Itjen Kemhan*) BG. Dwi Mastono, S.E., M.M. lead the signing ceremony of the Itjen Kemhan Performance Agreement 2021 in the Meeting Room of the Second Floor of Gatot Subroto Building of the Ministry of Defense, Jakarta, Friday (8/1). The signing of the Itjen Kemhan Performance

Agreement in 2021 was carried out by Echelon II, III and IV officials in the Itjen Kemhan environment with the theme "Realizing Effective, Transparent and Accountable Government Management and Results Oriented".

In his speech, *Ses Itjen Kemhan* said that in order to realize effective, transparent and accountable



# SIGNING OF INSPECTORATE GENERAL OF THE MOD FY. 2021 PERFORMANCE AGREEMENT

government management and results-oriented, on January 8, 2021, Itjen Kemhan implemented the signing of performance agreements in the Itjen Kemhan environment, which will be signed by structural officials ranging from echelon I to IV officials.

"The signing of this performance agreement is a follow-up to the implementation of the Regulation of the Minister of Administrative And Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia number 53 of 2014 concerning technical guidance on performance agreements, performance reporting and revised procedures for performance reports of government agencies".

Furthermore, Ses Itjen said the purpose of drafting this performance agreement is first as a tangible manifestation of the commitment between the trustee and the trustee to improve the integrity, accountability, transparency, and performance of the apparatus.

The second creates performance benchmarks as the basis for evaluating the performance of apparatus, thirdly as the basis for assessing the success / failure of achievement of organizational goals and objectives and as the basis for awarding and sanctioning. Fourth as the basis for the trustee to monitor, evaluate and supervise the development / progress of the performance of the trustee and fifth as the basis for setting employee performance targets". \*\*\*

# Unhan and the British Embassy Managing Defense in a Wider

Defense University (*Universitas Pertahanan/Unhan*) in collaboration with the British Embassy conducted a Short Course on Managing Defense in a Wider Security Context (MDWSC) TA. 2021, for five days, 1 to 5 February 2021. Located at Mandarin Hotel Jakarta online. Monday, (1/2). The opening of the course was greeted by Ambassador of the United Kingdom Owen Jenkins, and Keynote Speaker of the Minister of Defense H. Prabowo Subianto represented by Deputy Minister of Defense of the Republic of Indonesia Muhammad Herindra accompanied by Rector Unhan Vice Admiral TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR, CIQaR., IPU and First Secretary of Defense and Security of the British Embassy Christian Ayres.

This short course presented several speakers, including on the first and second day by Dr Gemma Colantes Celador with the topic Conceptualising Security at the Global, Regional and National levels and Lt Col Darren Hughes with the topic The Strategic Context and the topic Policy Formulation, Implementation and Review (to include the political direction of defence and security) and the topic Strategy and Strategy Development (Lecture) (part of the political direction of defence and security).

Entering the third day Lt Col Darren Hughes again appeared to discuss the topic of Strategic Communications and Dr John McCormack the topic of Operationalising Strategy (to include defence management/challenges and performance measurement). While on the fourth day Dr Gemma Collantes Celador presented the topic of discussion about governance of the Security Sector and Dr

John McCormack with the topic risk management. Meanwhile, on the fifth day presented speaker Dr Gemma Collantes Celador on the topic of Civil-Military, Civil-Security Relations (to include relative roles).

In the Keynote Speaker of the Minister of Foreign Affairs read by the Deputy Minister of Defense of the Republic of Indonesia delivered a short course managing defense in a Wider Security Context (MDWSC) a program of bilateral cooperation between the Ministry of Defense and the Ministry of Defense of the United Kingdom, which in this case is represented by the Office of the United Kingdom Of Defense Attaché in Jakarta.

This shows that the good relations between the two Ministries of Defense are very closely established, based on the principle of mutual respect and mutual benefit to each activity carried out jointly.

The short course on managing defence in a wider security context (MDWSC) is to increase the capacity of TNI officers and security-related apparatus as well as enhance cooperation between the Indonesian Ministry of Defense, the Ministry of Defense of the United Kingdom, the University of Defense and Cranfield University.

This short course is also a form of cooperation between Unhan and Cranfield University followed by 50 participants of the course including from Kemhan, Unhan, Mabes TNI and Angkatan, Ministries / Institutions, among others, kemenpolhukam, Kemenlu, Kemendagri, Kemendikbud, Kemen KKP, BIN, BNN, BSSN, BNPT, BNPP, BNPB, Bakamla,

# Conducted a Short Course on Security Context (MDWSC)



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

BPPT, Wantanas, Lemhanas, Lemdiklat Polri, LIPI, Pemprov DKI,

Unhan official who was present at the opening was Vice Chancellor I (*Wakil Rektor / Warek I*) Unhan Maj. Gen. TNI Dr. Jonni Mahroza, S.I.P., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR, Vice Chancellor III (*Wakil Rektor / Warek III*) Unhan Rear Admiral TNI Benny Rijanto Rudy

S., M.B.A., Dean of FMP Unhan Commodore TNI Dr. Kasih Prihantoro, S.E., M.M., M.Tr.(Han), Wadek FKN Unhan Commodore TNI Dr. Endro Legowo, S.E. , M.A.P and Wadek FMP, Air Commodore TNI Anton Iman Santosa, S.E., MMgtStud., M.Si (Han), CIQaR and concurrently as chairman of the committee.\*\*\*



Secretary General of the Ministry of Defense Air Marshal TNI Donny Ermawan, T. M.D.S. Signing minutes book of hand over Head of Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense.

Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

## THE HANDOVER OF THE HEAD OF PUBLIC RELATIONS BUREAU SECRETARY GENERAL MINISTRY OF DEFENSE

**P**osition of Head of Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense (*Karo Humas Setjen Kemhan*), Friday (5/3), at the Kemhan Office, Jakarta was officially handed over from BG. I.E. Djoko Purwanto, S.E., M.M., to Air Commodore TNI Penny Radjendra, S.T., M. Sc., M.Sc. The handover ceremony was led directly by the Secretary General of the Ministry of Defense (*Sekjen Kemhan*), Air Marshal TNI Donny Ermawan, T. M.D.S.

The new Public Relations officer of the Secretariat General of the Ministry of Defense Air Commodore TNI Penny Radjendra, S.T., M. Sc., M.Sc., previously served as the Head Defense Strategic Information

Center Defense Strategic Installation Agency of the Ministry of Defense (*Kepala Pusat Informasi Strategi Pertahanan Badan Instalasi Strategis Pertahanan/ Kapusinfostrahan Bainstrahan Kemhan*) Meanwhile, BG I.E. Djoko Purwanto, S.E., M.M., assumed his new position as *Kapusinfostrahan Bainstrahan Kemhan*

At the same time, also held the Inauguration and the handing over the Head of Legislation Bureau (*Karo Turdang*) Secretariat General MoD. BG. Jamaruba Silaban was appointed as a Permanent Lecturer of Unhan.

While his successor was Colonel. Muhammad Idris, who previously served as Director of Design

and Harmonization I Legislation Bureau Secretariat General Kemhan then appointed as the Head of Legislation Bureau Secretariat General Kemhan.

The handover which was held simply in the Office of the Secretary General of Kemhan, marked by the signing of the Handover Event News attended by Karo PEG Setjen Kemhan and Karo UUM Setjen Kemhan. In addition, sertijab activities also remain attentive to the provisions of the Health Protocol in the midst of the Covid-19 pandemic.

The handover of this position contains important significance in the implementation of the main tasks and functions of the Kemhan organization. This activity in addition to the section and series of personnel development in the Kemhan environment is also intended to ensure the continuity of the process of organizing the duties and functions of the state defense.

In terms of personnel development, the shift in position provides diverse and tiered assignment lessons and experiences as a provision for the successful implementation of Kemhan policies and main tasks.

#### *Farewell Ceremony*

After following the handover of office in front of the Secretary General of Kemhan, Air Commodore TNI Penny Radjendra, S.T., M. Sc., M.Sc., as the new Karohumas accompanied, BG I.E. TNI Djoko Purwanto, S.E., M.M., conducted a farewell ceremony with the Staff of the Public Relations Bureau Secretariat General Kemhan. Wrapped in a warm family atmosphere, the two officials conveyed each other's impressions and messages or remarks to the Staff of the Relations Bureau Secretariat General Kemhan.

On the occasion of the separation, Brig. Gen. TN II E. Djoko Purwanto, S.E., M.M., expressed his gratitude for all forms of cooperation from all members of the Birohumas that have been implemented during his tenure karohumas Setjen Kemhan.

Meanwhile, as the new Karohumas, Air Commodore TNI Penny Radjendra, S.T., M. Sc., M.Sc., expects support, participation and cooperation from echelon III and echelon IV officials to all citizens of the Public Relations Bureau in supporting the implementation of future tasks.\*\*\*



Photo Source : Public Relation Bereau of the Secretariat General of MoD



# GENERAL POLICY OF STATE DEFENSE YEAR 2020-2024

36

By : Colonel. Agung Karyanto, S.Sos., M.Si.

*Head of The Sub Directorate Formulation of Basic National Defense Policies of Directorate Strategic Policy  
Of Directorate General Defense Strategy of MoD*

**P**resident has set the General Policy of State Defense (*Jakum Hanneg*) Year 2020-2024 through Presidential Regulation No. 8 of 2021. This policy has been long awaited, especially by the Ministry / Institution as a stakeholder in the field of defense. Although it seems too late, since it was only ratified in early 2021, but with the presence of the General Policy of State Defense Year 2020-2024 provides a fresh wind for the legal certainty of sustainability in the implementation of state defense.

Several policies as a derivative of the general policy of state defense had been delayed with the establishment of Jakum Hanneg, including the policy of state administration and policies in the strategic planning of state defense. Furthermore, these policies are used as a reference, especially for the Ministry of Defense and TNI in formulating policy programs on military defense and other ministries / institutions in formulating nonmilitary defense policies.

In general, the general policy of state defense (*Jakum Hanneg*) consists of two main parts; the torso part consists of 7 articles and the contents of the policy in the form of attachments that describe the main points of state defense policy in 2020-2024. The discussion on the appendix consists of: analysis of strategic environmental developments that produce threat predictions for the next five years, the foundation of Jakum Hanneg consists of historical, juridical, and conceptual foundations, and ends with a core discussion of the subject matter of national defense policy, both military and non-military defense.

From the sub-discussion aspect of Jakum Hanneg 2020-2024 implies that Jakum Hanneg 2020-2024 is formulated taking into account several factors like prediction of the country's defense threats to be faced; the geographical condition of Indonesia indicated by the pouring of geopolitics and geostrategy as one of the foundations; the doctrine of the defense of the state through historical foundations; and the

direction and political policies of the country in the form of national goals and national interests. Aspects of strategic environmental development are explained starting from the development of the global, regional, and national environment.

Analysis of the development of the strategic environment presents the challenge of predicting threats divided into two forms of threats such as actual and potential threats. The actual threat is defined as a current growing threat and is likely to continue for the foreseeable future. Meanwhile, a potential threat is defined as a threat that has not yet occurred but can occur at any time and in certain situations becomes an actual threat.

Some of the actual threats for the next five years include: border violations/foreign intervention, separatism and armed insurgency, piracy, and hostage-taking of Indonesian citizens, terrorism and radicalism, cyber threats, intelligence or espionage threats, psychological warfare threats, biological weapons attacks, natural and environmental disasters, theft of natural wealth, disease outbreaks, drug trafficking and abuse, and the impact of the industrial revolution 4.0. The threats are considered potential in the form of conventional war or open conflict (foreign invasion), the threat of nuclear weapons, economic crisis, pandemic threat, and foreign immigrants.

From some of the threats that are predicted to occur in the future give an idea that nonmilitary threats become threats that actually dominate. Nevertheless, the military threat in the form of open conflict (foreign invasion) which is categorized as a potential threat becomes an emphasis because of the impact of the cyclical threat to the sovereignty, integrity, and safety of the nation.

Some of the foundations which are used in Jakum Hanneg consist of historical, juridical, and conceptual foundations. The historical foundation is related to the history of the nation's struggle against imperialism and colonialism. In the struggle

to find the culmination point that resulted in the independence of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The point of success of the struggle began since the emergence of awareness of unity and unity of the nation and included all people in the struggle. It was this historicity that underpinned the doctrine of the defense of the state, the Universal People's Defense and Security System (Sishankamrata).

Two legal regulations that serve as the basis of the juridical Jakum Hanneg, are the 1945 Constitution and Law No. 3 of 2002 on State Defense. Both assert from the legal aspects related to Sishankamrata. While the conceptual foundation consists of: the implementation of state defense; geopolitics and geostrategy; national goals; and national interests. These four conceptual foundations provide an idea that the geographical aspects and political policy direction of the country in the form of national goals and interests are a concern and direction that will be achieved in Jakum Hanneg.

One thing that significantly distinguishes Jakum Hanneg 2020-2024 compared to the previous Jakum Hanneg. In addition to policy material, lies in the design in the discussion of the general policy of state defense. The design of Jakum Hanneg in previous years, the main policy of the general defense of the country was written in one sub-discussion. Meanwhile, in Jakum Hanneg 2020-2024, the main points of defense policy of the country are divided into two, namely the general policy of military defense and the main policy of nonmilitary defense.

This design is designed to answer previous implementation problems in Jakum Hanneg. Referring to the results of the strategic defence review of Jakum Hanneg 2015-2019 conducted by the Ministry of Defense, among others concluded that the main problem of implementation of Jakum Hanneg 2015-2019 lies in the vagueness of the implementation of policy programs, especially for ministries / institutions outside the field of defense in organizing nonmilitary defense. Therefore, strictly the implementation of nonmilitary defense becomes a separate sub-chapter in the content of Jakum

## Hanneg 2020-2024

In general, the main points of national defense policy, both military defense and nonmilitary defense are divided into six policies, consisting of: development policy, capability development, deployment, legislation, budget, and supervision. For nonmilitary defense policy, one policy is added related to the nonmilitary defense organizing policy. Military defense policy which includes the Main Components, Reserve Components, and Supporting Components is directed at the establishment of modern state defense, professional TNI, the adoption and innovation of the main tool technology of weapons systems (alutsista), increasing the independence of the defense industry, as well as encouraging budgeting and defense spending into defense investments. Meanwhile, nonmilitary defense policy is directed at the utilization of national resources to improve nonmilitary defense capabilities.

Defense development policy on military defense is emphasized in the field of national character building, posture, institutional, defense area, technology and defense industry, as well as international cooperation. Some interesting things to look at on the policy of military defense development, including the development of posture. One of the policies of military defense posture development is implemented through the fulfillment of the main strength of the TNI and the modernization of the main tools of the TNI weapons system to strengthen strategic and tactical weaponry for the tri-services.

This is a challenge for defense development, especially faced with the availability of budgets. Similarly, the policy of building the defense industry in order to realize an advanced, strong, independent, and competitive defense industry. Several studies have been conducted on defense industry policy, including the obligation to use local defense equipment from the country and involve the defense industry in every purchase of defense equipment from abroad. The results found that defense industry policy is poorly implemented. Therefore, it takes the commitment of all stakeholders to implement these



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

policies.

For nonmilitary defense development policy, like military defense development policy consists of the policy of building the character, posture, institutional, cooperation, and defense industry of the nation.

Some nonmilitary defense development policies differ from military defense development, including the development of defense technology and defense areas, both of which are not regulated in nonmilitary defense. In addition, the development of nonmilitary defense cooperation is directed to cooperation between ministries / institutions in organizing nonmilitary defense, while the development of military defense cooperation is aimed at building cooperation with countries in the world.

The policy of fostering military and nonmilitary defense capabilities is intended to ensure the implementation of the country's defense system, both in order to build the capabilities of the TNI, spare components, and supporting components as

well as ministries / institutions in utilizing all national resources.

One thing that needs to be observed in the policy of building the capability, in this case is the emergence of policy of building the capability for reserve and supporting components. This is a challenge in the field of defense, because until now backup components and supporting components have not materialized, although laws and government regulations governing the formation of backup components and the arrangement of supporting components have been published.

The deployment policy and the use of military defense in this case the TNI as the main component is intended to face military threats, nonmilitary, hybrid, support world peace, and efforts to save Indonesian citizens who are abroad, as well as in helping friendly countries that support the national interest.

One policy that is interesting on the policy of deployment and use of the TNI is, the inclusion

of the deployment and the use of the TNI to save Indonesian citizens who are abroad. This is a policy breakthrough to overshadow the tasks of the TNI that have been implemented but there are no provisions governing it. The policy of using and utilizing national resources in nonmilitary defense is aimed at the utilization of national resources managed by ministries / institutions and local governments in the face of nonmilitary threats.

In accordance with the President's policy in the field of law, the country's defense policy on regulatory policy, both military and nonmilitary defense is emphasized in an effort to comprehend the spirit of deregulation and debureaucratization in all ministries / institutions, and local governments. The policy of the budget field, directed at the fulfillment of the needs of state defense management, both military and nonmilitary defense effectively and efficiently. This is in response to the condition of the country that still has limited ability in generating revenue to finance the administration and development.

The phenomenon of budget abuse that is still a scourge in the development of the nation including the development of state defense becomes a reference in directing the policy of the field of supervision. Some policies in the field of military and nonmilitary defense supervision include emphasizing efforts to ensure transparency, accountability of budget management, strengthening bureaucratic reforms, and the realization of integrity zones towards corruption-free areas.

These policies are expected to reduce budget abuse and as a challenge for defense stakeholders to become the driving force in freeing corruption in the country.

In addition to the points of national defense policy outlined above, there is one policy related to the implementation of nonmilitary defense. This policy is a new breakthrough and phenomenal enough to optimize synergy between ministries and institutions in planning and implementing nonmilitary defense policies. The policy in governing and controlling is



the key to the answer to the problem of nonmilitary defense implementation so far such as the findings in the strategic defence review of the implementation of Jakum Hanneg 2015-2019 which states that the implementation of nonmilitary defense has not been running optimally due to the lack of clarity of ministries / institutions that act as the main elements and supporting elements in dealing with nonmilitary threats.

Nonmilitary defense implementation policy regulates and appoints as well as provide descriptions related to the duties and functions of ministries / institutions as the main elements and supporting elements according to the dimensions and types of nonmilitary threats. Thus, there is no longer overlap and point to each other between ministries / institutions in facing and dealing with nonmilitary



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

threats. The dimensions and types of nonmilitary threats have been expressly stated in the policy of nonmilitary defense implementation.

One example of the implementation of nonmilitary defense implementation policy that is currently underway and implemented by the Ministry / Institution is in facing the threat of the covid-19 pandemic. Jakum Hanneg 2020-2024 stated that the threat of pandemic / infectious disease outbreak is one type of nonmilitary threat with public safety. In facing the threat put the Ministry of Health and the National Disaster Management Agency (BNPB) as the main elements, supported by several ministries, including the Ministry of Social Affairs, Ministry of Transportation, TNI, Police, and several other relevant Ministries / Institutions.

The entire contents of the general defense policy of the country in 2020-2024 that has been outlined above become a challenge as well as a hope for all stakeholders in organizing the defense of the country. Referring to Merilee S. Grindle's policy implementation theory states that implementation failure is caused by two variables, it is called policy content variables and environmental variables (Merilee S. Grindle, Politics and Policy Implementation in the Third World, Princeton University Press, 1980). Related to this theory, the General Policy of State Defense Year 2020-2024 which contents have been outlined above will not be implemented properly without the support of environmental variables, including compliance and response from policy implementers.\*\*\*



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

## STATE DEFENSE POLICY YEAR 2021



tate Defense policy year 2021 is a follow-up to the year 2020 country's defense policy which became one vision and mission in the description of the policy of organizing the country's defense in 2020 - 2024.

The vision and mission of the country's defense in the year 2020 to 2024 is implemented by setting up the strategic goals and objectives as described in the previous chapter. To achieve the five-year strategic objectives, the state defense policy is set in the form of policy objectives that will be implemented annually based on the evaluation and direction of the state defense policy in 2020.

### Policy Objectives

- a. Maintained state sovereignty in the land, the sea, and the air including in the border areas
  - 1) Continuing acceleration in realizing the determination of land boundaries, sea boundary, as well as Air Defence Identification Zone (ADIZ) and Air Defence Identification System (ADIS) to protect the sovereignty and sovereign rights of Indonesian air through the synergy of cooperation and the coordination with the relevant Ministries/Institutions.
  - 2) Optimization of interoperability and improvement of infrastructure facilities in the form of satellite-based remote monitoring and sensing vehicles in the defense areas, especially in the border areas and outer small islands. Monitoring and sensing using radar and PTTA/drone to obtain data and information in real time and connect with control centres in an effort to improve early detection and early warning.
  - 3) Strengthening Indonesia's position as

a regional power in accordance with the concept of ASEAN centrality, increasing defense cooperation by prioritizing neighbouring countries that are directly adjacent, countries in the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and Indo-Pacific regions as well as countries that have defense cooperation with Indonesia in the national interest. Strengthening maritime security cooperation through joint exercises and continuous coordinated patrols in order to strengthen the security architecture of regional areas, especially in the North Natuna Sea which is directly adjacent to the South China Sea, and in the Sulu Waters, Malacca Strait, Indian Ocean, and Pacific Ocean.

- 4) Reorganizing Flight Information Region (FIR) above Batam, Tanjung Pinang, and Natuna.
- b. Protecting the integrity of the region from all forms of threats directly or indirectly, both from within and outside the country.
  - 1) Build early vigilance in anticipating, preventing, countering, and cracking down on all forms of threats.
  - 2) Enhance cooperation among intelligence agencies for the defense of the country.
- c. The protection of the safety of all nations in all regions of the Republic of Indonesia from all forms of threats, both from within and outside the country.
  - 1) Increased readiness and professionalism of the TNI for the handling of terrorism, radicalism, separatism, latent communist hazards, natural disasters, humanitarian

assistance, and other world peace and emergency mission tasks, including chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives (CBRN-E) threats.

- 2) Handling the Covid-19 pandemic and other biological threats through the improvement of defense capacity in the form of infrastructure and health services of Kemhan and TNI Hospitals include: fulfilment of health tools and materials 111 Kemhan and TNI Hospitals, preparation of supporting components in the field of health, and preparation of field hospitals, as well as the construction of high computing facilities based on technology

research, such as artificial intelligence and data science, the construction of early warning system monitoring platforms , including biological threats, infrastructure facilities of pharmaceutical institutions in the ranks of the TNI as a research centre for medicines.

- 3) Preparation of human resources (HR) defense of the country through the establishment of undergraduate programs Faculty of Military Medicine, Military Pharmacy, Military Sciences, and Military Techniques, strengthening the Graduate and Postgraduate education system, as well as strengthening the Information

The Ministry of Defense provides routine rapid test services to Indonesian Veterans



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Academy System (Academic Information System) and Smart Campus Infrastructure (Smart Campus Infrastructure).

- 4) Strengthening the function of fostering defense resources and building national logistics reserves to help handling economic impacts, the Covid-19 pandemic, and chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives (CBRN-E) threats through early vigilance systems, as well as security and security systems.
- d. Increasing defense diplomacy relations through bilateral and multilateral cooperation in the field of defense.
  - 1) Strengthening defense and security cooperation with ASEAN and other countries in order to create a mutual trust, build defense and professionalization capabilities of the TNI, strengthen defense industry, as well as support the diplomacy and foreign policy.
  - 2) Strengthen defense cooperation in the South Pacific region and other relevant countries in order to build support for Papua's integrity as an integral part of the Republic of Indonesia.
  - 3) Continuing the delivery of professional world peacekeeping forces supported by adequate equipment and infrastructure in order to be able to send one Brigade of peacekeepers every year to the U.N. mission area, as well as maintain Indonesia's position as the top ten sending countries to the UN peacekeeping mission.
- e. Integrated Military and Nonmilitary Defense

in the National State Defense System.

- 1) Build military and nonmilitary defense synergy to support the realization of Total Defense System (Sishankamrata)
- 2) The realization of the arrangement and management of an integrated military defense system in the East Kalimantan region that will be the location of the new capital of the country, by predicting the possibility of rapidly changing threats.
- 3) Improving the capabilities of cyber technology as a fundamental element along with the improvement and development of cyber threats, by promoting integration between military cyber forces and nonmilitary cyber capabilities.
- f. The realization of a strong TNI posture in overcoming threats.
  - 1) Continuing the development of TNI posture in accordance with the staging, through the fulfilment of basic forces so that an effective antidote force is formed. The development of TNI personnel applies the principle of right sizing and proportional growth policy in accordance with the development of TNI Unit.
  - 2) Strengthening the Integrated TNI Unit (STT) of the outer islands in Natuna, Yamdena/Selaru, and Merauke equipped with sensors integrated into the Command-and-Control Centre TNI and the Armed Forces.
  - 3) Strengthening the capacity of intelligence agencies for the defense of the country, in order to improve the capability of early detection, early

warning and early prevention through cooperation and cohesion between ministries and agencies to prevent various threats that have an impact on national interests and security.

- 4) Increasing the strength and capability of Joint Regional Defense Command (Kogabwilhan) I, II, and III which are focused on being able to carry out effective control and effective occupation as a form of presence in all regions of the Unitary State of the Republic of Indonesia; and the Maritime Information Center (Pusinfomar) TNI that in charge of maintaining and improving maritime security through communication, coordination and collaboration together in the field of information collection, provision, and exchange, both operational and national and international maritime information center.
- 5) Increasing the strength and capability of the Special Operations Command (Koopssus) TNI that in charge of conducting special operations and activities to support the implementation of special operations that require high speed and success in order to save the national interest, both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia.
- 6) Strengthening joint TNI exercises to improve interoperability capabilities supported by one network centric warfare system by utilizing satellite technology to face modern warfare.
- 7) Professional improvement of soldiers through the improvement of 10 (ten) educational components in each Education and Training Centres



of Kemhan and TNI as well as the intensity and quality of training in a tiered and sustainable manner by focusing on the concept of joint operations.

Kegiatan latihan gabungan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Terorisme Satgultor TNI TA. 2020



Photo Source : kabar21news.com

- 8) Improved soldier welfare includes: increased income, housing, education, and health services of soldiers and their family members as well as the retirement guarantees.
- 9) Institutional formation of Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRN-E) as Central Executive Agency at the level of TNI HQ.

- 10) The development of The Army is carried out through:
- The addition of regional command units, combat battalions, both infantry, cavalry, field artillery, air defense artillery, combat engineers, and Army Aviation units and supporting elements are adapted to the area of the Unitary of the Republic of Indonesia as well as rely on the defense of major islands.
  - Modernization of the weaponry of infantry battalions, cavalry, field artillery, air defense artillery, and Army Aviation as well as the renewal of individual weapons so that old weapons can be used for spare components during active service.
  - Rematerialization of group weapons consisting of Automatic Rifles (SO), Submachine Guns (SMR), Medium Machine Guns (SMS) and Heavy Machine Guns (SMB) and mortars, as well as the fulfilment of basic supplies of Small Calibre Munitions (MKK) and Large Calibre Munitions (MKB).
  - Placement of air defense missiles in Kalimantan, Sumatra, and Java.
- 11) The development of The Navy is carried out through:
- Continuing the program of upgrading navy warships in the form of: frigate ships, corvette ships, missile speedboats and patrol vessels armed with missiles at least 150 km in the form of: surface to surface missile (SSM), anti-air or surface to air missile (SAM) long-range and medium-range missiles as force weapons and SAM short-range as self defense according to basic supplies and submarines armed with missiles and torpedoes.
  - Implementing fulfilment and capability improvement program, MidLife Modernization (MLM) of defense equipment selected through assessment (cost and benefit analysis) to produce defense equipment with operational readiness and high combat capability.
  - Improving the capability of submarine warfare (AKS) through the procurement of AKS aircraft accompanied by the development of tactical concepts and doctrines of aircraft and surface ship cooperation in AKS action;
  - Improving the capability of electronic warfare and mine warfare with the procurement of electronic warfare equipment on ships, aircraft, and bases as well as the procurement of mine counter measures as well as modern mine warfare equipment capable of strengthening strategic choke points control strategies.
  - Building maritime observation and reconnaissance (ISR) capabilities covering domains,

air, surfaces, and underwater by modernizing persistent and mobile observation systems including maritime patrol vessels, PTTA and Unmanned Surface Vessels.

- f) Enhancing amphibious and anti-amphibious warfare capabilities as well as coastal defense through modernization of Marine Corps combat materials and weaponry.
- g) Improving base support capabilities by prioritizing the construction of Port Facilities

(Faslabuh), Maintenance and Repair facilities (Fasharkan) and Logistic Support Facilities (Fasduklog) in line with the plan of procurement of warships with large dimensions and weights such as submarines, frigates, BRS ships, LPD ships, BCM ships and AT vessels.

12) The development of the strength and capability of the national air defense system that applies a layered defense pattern (defence in depth) includes:

- a) Modernization of The Air Force fighter aircraft equipped with



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec Defence of MoD



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec Defence of MoD



Photo Source : Public Relation Bureau of the Sec Defence of MoD

- air-to-air missile (AAM) and Air to Ground (AGM) within reach of more than 100 km, and other platforms to support national air defense (AWAC&S aircraft, MRTT aircraft, SAR helicopters, Counter Insurgency (COIN) aircraft as low-speed threat suppressors and transport aircraft).
- b) Development of ground-to-air missiles, both medium and long range as well as missile defense of the nation's capital (Jakarta and IKN) in accordance with the concept of defense that has been planned by the Air Force.
  - c) The development of GCI radar and passive radar as air defense sensors that are integrated into the concept of NCW Air Force, as well as the construction of air defense point in the form of defense procurement of air defense point and development of the organization of Air Force Air Defence Detachment.
  - d) Development of organizations, facilities, defense equipment, and parties that needed for the development of the strength and capabilities of the Air Force.
- g. The realization of good governance of the country's defense system.
- 1) Continuing the preparation of legislation in the field of defense as follows.
    - a) Continuing the discussion of the Law on the field of defense included in the National Legislation Program (Prolegnas) Draft Law Year 2020 - 2024, which includes:
      - (1) The Draft Law on Amendments to Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Army.
      - (2) Draft Law on The Management of National Air Space.
      - (3) Draft Law on amendments to Law No. 16 of 2012 on Defense Industry.
    - b) Propose a Draft Law on Amendments to Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army as a proposed government initiative.
    - c) Continuing the discussion of Government Regulation Draft (RPP), Presidential Regulation Draft (Rperpres), the regulation draft of the minister of defense (Rpermehan), and other software that became the mandate of Law No. 23 of 2019 on National Resource Management for State Defense.
    - d) Continuing the process of completing RPP or Rperpres, among others: RPP on Amendments to Government Regulation No. 102 of 2015 concerning Social Insurance of TNI Soldiers, Members of The National Police, and ASN in the Kemhan and Polri, RPP on Amendments to PP No. 68 of 2014 concerning The

Arrangement of State Defense Areas, Rperpres on Securing Strategic National Vital Objects and National Vital Objects, and Rperpres on TNI's Task in Combating Acts of Terrorism.

- e) Continuing the discussion of government regulation draft, Rperpres, Rpermehan and Echelon I-level regulations that become the needs of the organization units in Kemhan and TNI
- f) Continuing the process of completing the Act which is the Ratification of the International Treaty on Defense

which is included in the open cumulative list of Ratification of international treaties in the field of Defense.

- 2) Strengthening supervision of budget management with the application of principles of accountability, transparency, corruption-free, and efficiency through mentoring, supervision, and examination patterns in order to maintain the opinion of Unqualified Fair assessment (WTP).
- 3) Continuing defense governance through the implementation of internal control system (SPI), strengthening bureaucratic reform, and accelerating the realization of Integrity Zone

Minister of Defense Prabowo Subianto pinned a sign of participation in the State Defense Cadre training for all components of society





Photo Source :



- (ZI) towards Corruption-Free Areas (WBK) in Kemhan and TNI.
- 4) Reform of the defense budget in accordance with the draft development of defense forces, in order to achieve the strategic objectives of the country's defense by praying for the priorities and objectives of the field of defense, as well as the tasks.
  - h. The realization of State Defense Awareness for all citizens.
    - 1) Continuing the implementation of the National Action Plan for The Development of State Defense Awareness (PKBN) in order to increase the number of Bela Negara cadres.
    - 2) Increasing the participation of the Ministry / Institution (K / L), TNI, Police, Local Government and other components of the nation in implementing the policy of Fostering State Defense Awareness (PKBN).
    - i. The realization of the state defense supporting components that are established in all regions of Indonesia..
      - 1) Implementing the arrangement and construction of Human Resources, Natural and Artificial Resources (SDAB) as well as national infrastructure supporting defense.
      - 2) Increasing cooperation with ministries / institutions, local governments, private parties and other related parties in the ministry of keveteranan RI.
    - j. Realization of state defense reserve components that are ready to be mobilized and demobilized.



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

- 1) The formation of 25000 members of Army Reserved Components, Navy Reserved Components, as well as the Air Force that tailored to the needs of each service to strengthen the Main Components.
- 2) Realization of Defense Resource Information System.
- k. The realization of a strong, independent, and competitive national defense industry to support the country's defense needs.
  - 1) Continuing the promotion, cooperation and implementation of the Local And Offset Trade Return Policy (IDKLO) to improve the capabilities of the defense industry.
  - 2) Continuing the assignment of the defense industry to develop the results of research and development into Alpalhankam products to meet the country's defense needs.
- 3) Continuing the coordination with ministries / institutions and related agencies to increase the use of defense equipment for national defense industry products.
  - I. The realization of space, tools, and fighting conditions (RAK Juang) to support the State Defense through
    - 1) Realizing the spatial layout of land, sea, and air defense areas.
    - 2) Realizing the readiness of human resources, natural/artificial resources, as well as facilities and infrastructure to support the defense of the country.
    - 3) Managing fighting conditions for the defense of the country.
  - m. The realization of a defense area that rests on large islands independently and able to carry out protracted war

- 1) Preparation of the area as a defense mandala in a unified Tri Matra Terpadu to carry out the war independently on the outer mandala, the main mandala, and the inner mandala to organize a protracted war.
- 2) Preparation of defense areas of major islands independently with the preparation of food reserves, water, energy and national infrastructure facilities, in order to realize defense logistics centers scattered throughout the Republic of Indonesia.
- 3) Realizing effective command and control capabilities as well as, the improvement of inter-island connecting transportation facilities for all compartments.
- n. The realization of decentralized defense logistics depots.
  - Development of decentralized and integrated logistics systems in Military Area Command (Kodam), Naval Base Lantamal and Air Force Base (Lanud) areas to support the implementation of defense of large islands, with a focus on the construction of large-calibre munition depots (MKB) and small-calibre munitions (MKK).
- o. Realization of defense strengthening in strategic strait areas
  - 1) Placement of missiles in strategic straits that are choke points in accordance with the sea flow of the Indonesian archipelago (ALKI) I, II, and III.
  - 2) Strengthen coastal missile defence system and coastal surveillance system to carry out strategic strait control in accordance with the sea flow of The Indonesian Archipelago (ALKI) I, II, and III.
  - 3) Increase surveillance and reconnaissance of the traffic of ships and aircraft in strategic straits, especially after the deployment of TSS (Traffic Separation Scheme) in the Sunda Strait and Lombok Strait.
- p. The realization of the synergy of the structuring of the state defense area.
  - Realizing the synchronization of the spatial arrangement of defense areas in the form of: Defense Area Space (RWP), Detailed Plan of Defense Areas (RRWP), and National Strategic Areas for defense interests with the spatial layout of the province, District / City.\*\*\*



# **ESTABLISHMENT OF RESERVE COMPONENTS**

**as Mandate of Government Regulation No.3 of 2021 and Law No.  
23 of 2019 concerning PSDN**

By : Colonel. Agus Setyo Hartono, S.A.P

Intermediate Policy Analyst of Information and communication technology Public Relations Bureau of  
the Secretariat General of the Ministry of Defense



**T**he government plans to form a State Defense Reserve Component, with the passing of Government Regulation (PP) Number 3 of 2021 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for State Defense (UU PSDN), the Ministry of Defense (Kemhan) will recruit 25,000 citizens at an early stage. At this initial stage, the budget allocated for the formation of the Reserve Component is Rp. 1 trillion.

The Ministry of Defense through the Directorate General of Defense Potential collects aspirations from the public regarding the drafting process and urgency of Government Regulation Number 3 of 2021 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2019, one of which contains the formation of the State Defense Reserves Component and compiles it in the following explanation below.

#### The drafting process

The process of drafting Law Number 23 of 2019 is not rushed, this Law has been discussed since several years ago with the concept of the Reserve Components Bill and the Supporting Components Bill as mandates of the 1945 Indonesian Constitution and complements Law Number 3 of 2002 concerning State Defense. The PSDN Law for State Defense is a simulation of the State Defense Bill, the Supporting Components Bill and the Reserve Components Bill.

The government carries out the mandate of the 1945 Constitution, especially article 30, which is to give citizens the rights and obligations to participate in the efforts of State Defense. The State Defense Effort is carried out with the TNI as the main force and the people as the supporting force. The participation of the people as a supporting force in

accordance with paragraph 5 article 30 of the 1945 Constitution is regulated by Law, thus Law Number 3 of 2019 was born. With the people as this supporting force, the people are given the right to become a Reserved Component or Supporting Component and are obliged together with the TNI as the main force, to defend the country from all threats.

#### The Urgency of Forming the Reserve Component

The development and procurement of Main Weapon System have been budgeted every fiscal year according to the state's capacity, while for welfare it has been included in the personnel expenditure budget which has the largest percentage in the budget of the Ministry of Defense of the TNI, to further increase it all back to the state's financial capacity.

The existence of a Reserve Component actually allows a country to reduce military spending in peacetime while maintaining the strength that is prepared for war. This is because during their inactive period they return to their original profession and activities, so that the state does not have to pay for it. The state only needs to spend a budget as long as the Reserve Component members take 3 months of basic military training and refresher exercises the following year to maintain their skills and abilities. Apart from these activities, the state does not need to spend a budget, because the development of the Reserve Component when it is inactive is carried out by the respective Agencies/Institutions. Therefore, the formation of the Reserve Component can actually save the state budget expenditures in the defense sector, on the other hand the readiness of the state which has the Reserve Component will always be maintained when the Main Component needs additional strength.

## Mobilization of Reserve Components

International human rights norms highly uphold human rights, in the PSDN Law the acceptance of the Reserve Component is carried out on a voluntary basis without any coercion, in the formation of the Reserve Component it is carried out with due regard to human rights, the Reserve Component candidate registration is done voluntarily. After they are going through a selection process and undergone basic military training for 3 months and commissioned to be a member of the Reserve Component, they will get the rights and obligations as a member of the Reserve Component. The rights and obligations as members of the Reserve Component are regulated in article 41 and article 42 of Law Number 23 of 2019. The obligation to carry out mobilization does not violate human rights, because it carries out the mandate stipulated in the Law.

### Scope of threats requiring a Reserved Component

The concern of the civil society coalition regarding the use of the Reserve Component that will be formed by the government can be used to deal with domestic security threats such as the pretext of dealing with the threat of communism, terrorism, and domestic conflicts having the potential to create horizontal conflicts in the community, the possibility of their occurrence is very small.

Moreover, the formation of the Reserve Component is carried out strictly through administrative and competency selection and is followed by basic military training. The use of the Reserved Component in a military operation through a political decision by the government, namely the president with the approval of the DPR. So the concern about the misuse of reserve components in an operation that can lead to horizontal conflicts is

less relevant. This is because the Reserve Component does not stand alone, but joins the Main Component whose command and control is under the TNI Commander, so that no reserve component member carries out independent activities. All Reserve Components move on the orders of the TNI unit where members of the Reserve Component serve. The use of spare components is the last alternative, if the main components need additional replacement power.

### The Differences Between the Reserve Component and Previous Civilian Militia Groups

The formation of the Reserve Component was different from the formation of militias such as the Pam Swakarsa groups which were used to face large student demonstrations against the Special Meeting, and others. In order to assist in security, the Government formed the Pam Swakarsa organization in 1998 with the main mission of assisting the TNI to make the MPR Special Meeting succeed in November 1998. The formation of PAM Swakarsa was formed at the suggestion of the then ABRI Commander, General Wiranto. PAM Swakarsa is filled by several people with backgrounds in paramilitary organizations such as the Forum for the Islamic Community for Upholding Justice and the Constitution (Furkon), the Indonesian Committee for Islamic World Solidarity (KISDI) and the BKUI Hezbollah Brigade, the establishment of PAM Swakarsa is also supported by the Indonesia Protestant Church (GPI). The differences between Pam Swakarsa and Reserve Components are:

- a. Recruitment does not go through administrative and competency selection, but is based on membership of certain mass organizations.
- b. Did not carry out basic military training, so they do not have clear standards.

c. Its use is without a government political decision

The independent Pam organization has no operational ties with the TNI, so it can move on its own.

#### **The Reserve Components Are Not Intended To Deal With The Community Itself**

The formation of the Reserve Component was not intended for the benefit of dealing with community groups within their own country, for such reasons:

1. The Reserve Component based on Law Number 23 Year 2019 concerning PSDN is deployed at the time of mobilization if the state is in a state of emergency resulting from a threat such as invasions from other countries, so that the Reserve Component could not be turned into a militia, let alone confronted against the people.
2. Law Number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for National Defense is one of which regulates the management of the nation's components (citizens) to face a threat in an early, targeted and planned manner that requires a fairly long process of time in times of peace, after being trained and developed for approximately three months, the Reserve Component is returned to its respective professional status, at any time if the state is in a state of emergency/war, the Reserve Component can be mobilized in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. Definition of Reserve Components in accordance with Article 1 of Law Number 23 of 2019 concerning PSDN for national defense,

Reserve Components are National Resources (HR, SDA & SDB) which have been prepared to be deployed through mobilization to enlarge and strengthen the strength and capabilities of the Main Components.

4. We can know that the definition of militia is a group of people or society independently to survive the attacks of other independent groups.

#### **The Formation of Reserved Components Does Not Have a Political Dimensional Tendency or Cannot be Politically Exploited.**

The establishment of the Reserve Component that is currently enforced has a political dimension rather than defense interests which has no platform because the Reserve Component is not used for political purposes, the Reserve Component is used for defense purposes when the state is in a state of emergency/war in accordance with Article 7 Paragraph (2) Law Number 3 In 2002, "The national defense system in facing military threats placed the Indonesian National Army as the Main Component supported by the Reserved and Supporting Components", so there was no other interest in the formation of the Reserved Component other than for the benefit of national defense.

#### **Position of Reserve Components in The Defense Budget**

The formation of the Reserve Component is right on target to protect the defense and security of the Republic of Indonesia from threats that will arise at any time to our country, which can be in the form of foreign military invasion, which is in accordance with Article 30 Paragraph (1) of the 1945 Constitution

"Every citizen has the right and is obliged to participate, as well as in national defense and security efforts". When facing threats from foreign countries only rely on the Main Component (TNI), it is possible that the TNI is not yet able to face attacks from foreign countries, for example the technology of China and the USA has used the Space Capability (Outer Space) that our country does not yet have.

The formation of the Reserve Component is not a new burden for the defense sector budget even though the amount is still limited, because to create universal defense (the Reserve Component) must have enough time in which our country requires universal characteristics in accordance with Law Number 3 of 2002.

Moreover, in accordance with Article 1 of Law no. 3 of 2002 A universal defense system that can be used if our country has insufficient budget or something that all citizens and national resources can be involved to uphold the country's sovereignty, territorial integrity, and the safety of the entire nation from all threats, which contains the following: "State defense system is a defense system that is universal in nature involving all citizens, territories and other national resources, and is prepared early by the government and is carried out in a total, integrated, directed, and continuous manner to uphold state sovereignty, territorial integrity and the safety of all nation of all threats".

**The Formation of The Reserve Component in Law No. 23 of 2019 Concerning PSDN and its PP is in Accordance With The Mandate of The 1945 Constitution and Law No. 3 of 2002 Concerning The State Defense.**

The essence of state defense is all defense efforts that are universal in nature, the implementation of which is based on awareness of the rights and obligations of citizens as well as confidence in their own strength. With regard to funding sources, it is presented that basically when the country is in war, all National Resources are mobilized requiring the participation of all Resources and Funding Resources. In accordance with government regulation number 3 of 2021 concerning implementing regulations of Law number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for National Defense in article 103 paragraph (3) it is stated that the exception for the formation, stipulation, and fostering of Reserved Components for citizen elements only uses The source of funds from the government is the APBN and APBD.

#### **Establishment of SDA and SDB As Well As National Infra Structure For Reserve Components Based on Respecting The Human Rights**

In establishing SDA, SDB and National Infra Structure (Sarprasnas) as Reserve Components, the Ministry of Defense always and is based on respecting the human rights and protection of property rights. This is as stated in article 54 paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4) of Law number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for National Defense, it is stated that "Determination of Reserve Components of Natural Resources, Resources Artificial and National Facilities and Infrastructure are carried out by the Minister of Defense in coordination with the Minister/Head of related institutions and notified to the owner or manager of SDA, SDB, and National Infra Structure (Sarprasnas). Then in article 55 it is explained that the determination of SDA, SDB, and National Infra

Structure (Sarprasnas) as a reserve component does not diminish the rights of the owner. to transfer ownership rights, manage, and/or use; and/or the rights of managers to manage and/or use, SDA, SDB, and Sarprasnas.

In accordance with Article 72 of Law number 23 of 2019 concerning the Management of National Resources for State Defense related to SDA, SDB, and National Infra Structure (Sarprasnas) owned by private or individuals at the time of mobilization are treated as state property and given official care, then at the time of demobilization of SDA, SDB, and National Infra Structure (Sarprasnas) owned by the government and local governments, privately owned and individuals that have been mobilized must be returned to their original function and status through demobilization with compensation in accordance with the state's financial capacity.

#### **The Enforcement of Military Law on Reserved Components Only Applies When Becoming a Combatant**

The appointment of members of the Reserve Component is after they have passed the basic military training. Article 44 paragraph (1) states that the reserve component active period is the reserve component service period during refresher training and / or during mobilization. During the active period, members of the reserve component are subject to military law, this is because members of the reserve components at the time of their mobilization were combatants, so they apply military law which refers to the Military Criminal Code (KUHPM). During the period of inactivity, the reserve component is enforced and subject to general court.

Basically, we all have an obligation to uphold and respect the supremacy of the law. But when the KUHPM is still valid and is still used as a legal reference for the military, then when the active reserve component is a combatant, it is subject to military law as it applies to members of the military. When sanctions regarding legal provisions for the military as stated in the KUHPM have been revised, then the reserve components will follow the rules applied to these military members.

#### **The Formation of Reserved Components Is the Government's Effort to Overcome Threats by Early Preparation With The State Defense System**

In accordance with the mandate of Law number 3 of 2002 concerning State Defense in CHAPTER III concerning the Implementation of State Defense, it is stated as follows:

- a. Article 6 "National Defense is carried out through efforts to build and develop the capability, deterrence of the state and nation, as well as overcoming every threat.
- b. Article 7 paragraph (1) State defense, as referred to in article 6, shall be carried out by the government and prepared early by the state defense system.
- c. Article 7 paragraph (2) of the National Defense System in facing military threats places the Indonesian National Army as the main component supported by the Reserved Component and Supporting Components.
- d. Article 7 paragraph (3) of the State Defense System in facing non-military threats places

government agencies outside the field of defense as the main element, in accordance with the form and nature of the threats being faced and supported by other elements of the nation's power.

- e. Article 8 paragraph (1) Reserve Components, consisting of Citizens, Natural Resources, Artificial Resources, and National Facilities and Infrastructure which have been prepared to be deployed through mobilization in order to enlarge and strengthen the main components.
- f. Article 8 paragraph (2) Supporting components, consisting of citizens, natural resources, artificial resources, and national facilities and infrastructure that can directly or indirectly increase the strength and capability of the main components and reserve components.
- g. Article 8 paragraph (3) Reserved Components and Supporting Components as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be regulated by Law.

The government, in this case the Ministry of Defense, is obliged to prepare the national defense system early because future challenges in the form of potential military and non-military threats are still possible for Indonesia. This is due to the fact that geographically Indonesia is the gateway to the Asia Pacific region, which lately the level of conflict tends to be increasing, so to deal with the development of these threats the government has reorganized the national defense system. The mandate of Law number 3 of 2002 article 8 paragraph (3) concerning Reserve Components and Supporting Components to be regulated in a Law.

For more information in regards to have a better understanding among all of us about national defense after approximately 17 years there was a vacuum in the regulation of National Resources (Citizens, SDA, SDB, and National Infra Structure (Sarprasnas)) to be empowered in the framework of a universal defense system in accordance with the mandate of the law. In this law, the government considers it necessary to regulate national defense governance with the involvement of these National Resources through the Formation of Reserve Components and Arrangement of Supporting Components which are currently regulated through Law number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for National Defense.

The Reserve Component is one of the means and forms of participation of citizens, SDA, SDB, and National Facilities and Infrastructure in national defense efforts to face military threats aimed at enlarging and empowering the strength and capability of the TNI as the main component.\*\*\*

By: Budiono, S.Si

Reporter at the Public Relations Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense

# **GOVERNMENT ISSUES THE REGU**

## *Forms of Historical Efforts to Develop*



Photo Source: bradsknutson.com

In the life of a state, the aspect of defense is a very essential factor in ensuring the survival of the country. Without being able to defend itself against threats from abroad and/or from within the country, a country will not be able to maintain its existence.

The Indonesian nation has its own way of building its National Defense system, namely a total defense

system involving all Citizens, Territories and other National Resources, which is prepared early by the Government and carried out in a total, integrated, directed and sustainable manner to enforce State sovereignty, territorial integrity, and the safety of the entire nation from all threats.

Furthermore, the universal concept of State Defense was born from the long history of the

# LATION NUMBER 3 YEAR 2021

## *the Total People's Defense System*

struggle of the Indonesian people which began during the colonial period, the era of independence, the period sustaining the independence until now. The built universe has proven capable of seizing and defending independence from the colonialists during the revolutionary war for independence.

The Indonesian nation, which proclaimed its independence on August 17, 1945, is determined to defend, uphold and enforce its independence, as well as the sovereignty of the state and nation based on Pancasila and the 1945 Constitution. Our founding fathers had the vision and gave it to their successors on how to safeguard and defend the Republic of Indonesia, the country we all love.

The Total People's Defense System is the result of the design of the founders of the Indonesian nation, which is outlined in the legal system, the statutory system which becomes the highest source of law, namely the 1945 Constitution.

First, Article 27 paragraph ( 3 ) of the 1945 Constitution states, "Every citizen has the right and duty to participate in efforts to defend the state." And Article 30 paragraph ( 1 ) states that every citizen has the right and obligation to participate in the national defense and security efforts. From the two provisions it can be understood that defending the state is a constitutional right and obligation of the Indonesian citizens.

Then, Article 30 paragraph ( 1 ) states "State defense and security efforts are carried out through the Total People's Defense and Security System by the Indonesian National Armed Forces and the Indonesian National Police, as the main force, and the people, as a supporting force".

Meanwhile, Law Number 3 of 2002 concerning State Defense is also mandated and reaffirmed, the essence of State Defense is all defense efforts that are universal in nature, the implementation of which is based on awareness of the rights and obligations of citizens and confidence in their own strength.

It is stated, in this Law, the National Defense System is a comprehensive defense system involving all citizens, territories and other national resources, and is prepared early by the government and is carried out in a total, integrated, directed, and continuous manner for upholding state sovereignty, territorial integrity, and the safety of the entire nation from all threats. The national defense system involves all components of national defense, consisting of the main components, reserve components, and supporting components.

### **The Historic Year of Building Total People's Defense System**

The year 2021 is a very historic year, especially for the journey of the Indonesian nation in building the Total People's Defense System. It is said to be a historic year, because the Government has issued Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia Number 3 of 2021 concerning Implementation Regulations of Law Number 23 of 2019 regarding Management of National Resources (PSDN) for State Defense. The PP was signed by Indonesian President Joko Widodo on January 12, 2021 and promulgated on the same date by the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) Yasonna Laoly.

Furthermore, the management of National Resources for National Defense aims to transform



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Human Resources, Natural Resources and Artificial Resources, as well as National Facilities and Infrastructure into State Defense forces which are ready to be used for the benefit of State Defense. The management of National Resources for National Defense is prepared early to face the threats.

The scopes stipulated in the PP Number 3 of 2021 are described as a description of the five scopes contained in article 2 covering: First, the Implementation of State Defense Awareness Development (PKBN); Second, coaching and cooperation in the implementation of services in accordance with the profession; Third, Management of Supporting Components; Fourth, Formation, Determination, and Development of Reserve Components; and Fifth, Mobilization and Demobilization.

### PKBN Implementation

State Defense Awareness Management, hereinafter abbreviated as PKBN, means all efforts, actions and activities carried out in the framework of providing knowledge, education and/or training for citizens in order to develop attitudes and behavior and instill the basic values of State Defense. The implementation of PKBN is an implementation of civic education.

The awareness in defending the country is important to be implanted to all citizens and in line with the Programs of the Mental Revolution proclaimed by the Government to build deterrent power of the nation in facing the complexity of the threat in order to realize a solid national defense. Since the awareness in defending the country for every

citizen actualized within each role and profession is the soft power of the nation, it can become the deterrent effect to the state else who try to disrupt the country's sovereignty, territorial integrity and safety of the nation.

For this reason, the implementation of PKBN is also regulated in Government Regulation Number 3 of 2021 stating that the implementation of PKBN is carried out in the scope of education, society, and work, which is carried out by the Minister, ministers/ leaders of related institutions and can cooperate with regional heads and other parties in accordance with the provisions of the legislation.

The implementation of PKBN in the scope of education is carried out through the national education system, performed at every line, level, and type of education. The implementation of PKBN in the scope of education is also carried out through the preparation of PKBN guidelines, socialization

and dissemination, monitoring and evaluation. In addition, PKBN implementation is integrated into the national education system in accordance with the provisions of laws and regulations.

Meanwhile, the implementation of PKBN in the community is carried out by the Minister, the Minister who administers domestic government affairs, and the Minister who organizes government affairs in the religious sector. The implementation of PKBN in the community scope is done through the preparation of PKBN guidelines, socialization and dissemination, Education and Training (Diklat), as well as monitoring and evaluation. The implementation of PKBN in the community scope is aimed at religious leaders, community leaders, traditional leaders, cadres of community organizations, cadres of professional organizations, cadres of political parties and other community groups.



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Furthermore the conduct of PKBN at work space carried out by the Ministers. Those handling the government affairs in the field of employment, the minister conducting government affairs in the state apparatus, the Commander of the Indonesian Armed Forces, and/or the Chief of the Indonesian National Police. Training is held independently or integrated with technical education and training, functional education and training, leadership education and training, or other education and training.

#### **Management and Cooperation in the Implementation of Services in Accordance with Professions**

The management for citizens in carrying out their services based on the profession is performed to face non-military threats in accordance with the threat dimensions. In dealing with non-military threats based on the dimensions of the threat, the minister/head of non-ministerial government agencies according to their duties and functions formulates guideline for guidance in service according to their profession.

Ministers and leaders of non-ministerial government agencies are required to provide guidance in implementing devotion citizen in accordance with the profession can be implemented through the dissemination, technical assistance, simulation and/or training. In carrying out the development, ministers and leaders of non-ministerial government agencies can work together with a professional organization, which is carried out in accordance to the provisions of the legislation.

The forms of cooperation as intended include the following fields: education and training; research and development; increasing competency standardization; exchange of information and data; technical assistance and/or expertise; and/or other fields related to service in accordance with the profession in facing non-military threats.



#### **Supporting Component Management**

One of the platforms and forms of citizen participation in State Defense is to become a Supporting Component which can directly or indirectly be used to increase the strength and



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

capability of the Main and Reserved Components in facing military, non-military and hybrid threats.

For example, in the development of human resources, the Supporting Component for National Defense is carried out by increasing the capabilities

and expertise of human resources in the field of technology.

Meanwhile in PP No. 3 of 2021, which is included into the support component consists of citizens, Natural Resources, Resource Products and

## Services and National Infrastructure (Facilities and infrastructure Land, Sea, Air, Cyber and space and facilities and other infrastructure)

Besides that, in this Law, it is stated that the Management of Supporting Components is managed through structuring and coaching activities. These structuring and fostering activities are carried out in a democratic state defense governance system, upholding the principles of justice, respecting human rights, and paying attention to the environment in accordance with the provisions of laws and regulations.

Meanwhile, the structuring and fostering of the Supporting Components in the facilities and infrastructure sectors are done by increasing the national industry to become a defense industry which can be designated as a Reserve Component .

The arrangement of the Supporting Components is done through the stages of preparation (data collection, sorting, selection and verification) and stipulations contained in the defense resources information system which is the responsibility of the Minister. Supporting Component Arrangement by the Ministry in collaboration with the Ministry/ Institution and Local Government.

Meanwhile, the development of the Supporting Components is an activity to improve the quality and/ or quantity of the supporting components through socialization, technical guidance and/or simulation activities in national defense efforts carried out based on policies prepared and stipulated by the Minister in coordination with the ministers/leaders of related institutions. In the conduct of management Supporting Component, Ministry/Institution and Local Government in collaboration with the Ministry.



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

## Establishment, Determination and Development of Reserve Components

The Reserve Component is one of the means for participation of citizens and the use of Natural Resources, Artificial Resources, and National Facilities and Infrastructure in the efforts of State Defense.

Moreover, the development of the Reserved Component is needed as an effort to enlarge and strengthen the strength and capability of the Main Components in the defense and security system of the total people by involving all citizen as a supporting force in national defense, in accordance with the mandate of the 1945 Constitution and Law Number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for the State Defense.

In Government Regulation Number 3 of 2021 regulates the Management of Reserve Components, which includes the formation and determination, guidance, use and return. The following is a display of the contents of Government Regulation Number 3 of 2021, it is stated that the Reserve Component is a national resource that has been prepared to be mobilized through mobilization to enlarge and strengthen the strength and capability of the Main Component, said Article 1 point 9. As for what is meant by this Main Component is the Indonesian National Armed Forces (TNI).

Then in this PP, it also expands the description of the reserve components, which is stated in Article 48, it is stated that the reserve components include citizens, natural resources, artificial resources and national facilities and infrastructure.

Meanwhile, Article 49 explains, the formation of reserve components from citizen elements as referred to in Article 48 letter a are grouped into land element reserve components, marine reserve components and air component reserve components.

The formation of the reserve components in

PP 3/2021 is broken down into the stages of registration, selection and basic military training and commissioning. Registration for the Reserved Component is carried out through the stages of familiarization, announcement and application.

Whereas the selection stage itself includes administrative and competency selection which consists of a health test process, abilities, knowledge/insight and attitudes of candidates for the Reserve Component.

After being declared to have passed the competency selection, candidates for reserve components are required to attend basic military training for three months, as stated in Article 54 of PP 3/2021. Basic military training as intended in PP 3/2021 is carried out at educational institutions within the Indonesian National Armed Forces and/or the Indonesian National Armed Forces Units.

Article 56 explains that while participating in basic military training, candidates for the Reserve Component are entitled to receive allowance, individual field equipment, health care and protection for work accident insurance and death insurance.

The amount of allowance in accordance with paragraph (1) letter a is determined by the minister who administers government affairs in the financial sector upon the recommendation of the Minister. Meanwhile, individual field equipment as referred to in paragraph (1) letter b shall at least consist of field service clothes, field shoes, field hats and combat backpacks. "Health care and protection for work accident insurance and death insurance as referred to in paragraph (1) letter c and letter d are carried out in accordance with the provisions of laws and regulations.

Later, candidates who are declared to have passed basic military training are determined and appointed as Reserve Components by the relevant Minister. Subsequently, the Reserve Component was sworn in

and took an oath/promise. They will also be given a letter of appointment as a Reserve Component and a sign of graduation from basic military training.

As Article 58 states, Reserved Components appointed are given ranks. The assignment of ranks refers to the classification of the ranks of the TNI. "The rank of the Reserved Component is only used during the active period of the Reserved Component," reads Article 58 Paragraph (3) of PP 3/2021.

### Mobilization and Demobilization

PP No.3 of 2021 also regulates that the President has the authority to mobilize citizens in a state of military emergency or war. "In the event that all or part of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia is in a state of military emergency or a state of war, the President can declare Mobilization," states Article 87 of PP 3/2021.

The Mobilization Statement is stipulated by the President and must obtain approval from the DPR. After obtaining approval, the President must publicly announce a mobilization statement. Mobilization is imposed on the Reserve Component which is carried out through verbal and written summons/ notifications.

Meanwhile, the mobilization of the Reserve Component from elements of natural resources, artificial resources, and national facilities and infrastructure is carried out through verbal and written notification to the owner and/or manager. " Reserved Components who have fulfilled the summons and notifications of Mobilization are handed over to the Commander of the Indonesian National Armed Forces to be assigned and used in the Mobilization," states Article 90 Paragraph 5 PP 3/2021. In addition, the Reserve Components



Photo Source : [www.antara.co.id](http://www.antara.co.id)

are assigned and used in Mobilization under the command and control of the Commander in Chief of the Indonesian National Armed Forces.

Meanwhile, if in a state of military emergency or a state of war has been resolved, the President can declare Demobilization with the approval of the House of Representatives. Demobilization is an action to stop the mobilization and use of National Resources and National Facilities and Infrastructure after carrying out the mobilization task. Demobilization is carried out in stages with an emphasis on restoring the implementation of general government tasks and the socioeconomic life of the community.

### Closing

Based on Law Number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for State Defense, further regulation is delegated into Government Regulation Number 3 of 2021 concerning the implementation of State Defense Awareness Development (PKBN), guidance and cooperation in the implementation of services in accordance with the profession, arrangement and fostering Supporting Components, forming Reserve Components, serving the Reserve Components, dismissing the Reserve Components, determining Natural Resources, Artificial Resources, and National Facilities and Infrastructure into Reserved Components, fostering Reserve Components as well as Mobilization and Demobilization.

With the issuance of regulations or provisions of Government Regulation Number 3 of 2021 , it is hoped that in the future the implementation of the PSDN for State Defense in more detail and operation will be more directed, integrated, and sustainable to maintain state sovereignty, territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and safety. the whole nation from threats and disturbances to the integrity of the nation and state. \*\*\*

### Reference

Government Regulation Number 3 of 2021 concerning Implementation Regulations of Law Number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for National Defense.

<https://www.inews.id/news/nasional/jokowi-teken-pp-nomor-32021-warga-bisa-jadi-komponen-cadangan-pertahanan-negara>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/06422051/pp-3-2021-dan-3-poin-perluasan-peran-rakyat-dalam-upaya-pertahanan-negara?page=all#:~:text=Dalam%20PP%20Nomor%203%20Tahun,keadaan%20darurat%20militer%20atau%20operang.&text=Adapun%20mobilisasi%20tersebut%20dikenakan%20terhadap,pemanggilan%20secara%20lisan%20dan%20tertulis.>

**T**here is something interesting from the 2021 Indonesian National Armed Forces Commanders' Meeting (Rapim TNI) at the Ahmad Yani Sports Hall TNI Headquarters (Mabes TNI), Cilangkap, East Jakarta, Tuesday (16/2). The TNI Commanders meeting in 2021 took the theme 'TNI Strong, Solid, Professional, Loved by the People, Ready to Support the Acceleration of Handling Covid-19 and the National Economic Recovery, as well as Maintaining the National Unity for the Integrity of the Republic of Indonesia', carried out through face-to-face (offline) and video conferencing (online).

This meeting was attended by the Minister of Defense (Menhan) Lt. Gen. (Ret.) Prabowo Subianto Djojohadikusumo, TNI Commander in Chief (Panglima TNI), Air Chief Marshal TNI Hadi Tjahjanto, the Army Chief of Staff (Kasad) General TNI Andika Perkasa, the Navy Chief of Staff (Kasal) Admiral Yudo Margono, the Air Force Chief of staff (Kasau) Air Chief Marshal TNI Fajar Prasetyo, Deputy Minister of Defense (Wamenhan) Lt. Gen. TNI M Herindra, and all levels of the military commanders of the tri-service.

Furthermore, apart from the previous TNI Commanders Meeting, the Defense Minister Prabowo Subianto spoke about the plan to modernize the TNI's main weapon system (alutsista). Prabowo Subianto elaborated precisely on the plan of main program of the TNI posture development in the period of 2021-2024.

The head of the TNI Information Center (Kapuspen TNI), Maj . Gen. TNI Achmad Riad, confirmed that in the meeting, the Minister of Defense emphasized the importance of re engineering, repairing and refurbishing various defense equipment to enhance the strength of the TNI. In addition, he said, the Defense Minister also touched on the basis of the formation of Reserve Component (Komcad), which was put in the Government Regulation (PP) No. 3 of



# MASSIVE MAIN WEAPON SYSTEM MODERNIZATION FOR THE TRI-SERVICE

By: Erik Purnama Putra  
Republika Journalist



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Helikopter Sikorsky BLACK HAWK

Photo Source: [www.lockheedmartin.com](http://www.lockheedmartin.com)

2021 on Implementation Act (Act) No. 23 of 2019 on the Management of National Resources for National Defense.

The initial plan was for the formation of the Komcad to reach 25.000 soldiers, which is equivalent of 35 battalion military units. "He conveyed several things related to the total people's defense system related to the issue of Law 23 of 2019, concerning to the human resource management," said Maj . Gen. TNI Achmad Riad at the location of the event.

Moreover, in the material presented by the Minister of Defense at the 2021 TNI Commanders Meeting, which the author obtained, the Minister

of Defense is targeting a large-scale spending on defense equipment, including the construction of facilities and infrastructure, as well as the purchase of the latest uniforms (integrated personal protection set). For the Indonesian Army, for example, there is a weapons modernization program for individuals, groups, teams, platoons, companies, and battalions. In addition, there are purchases of assault rifles, weapons against tanks like Gustav, Stinger missiles, and sniper rifles.

For the purchase of major defense equipment, including 32 units of Sikorsky UH-60 Blackhawk helicopter with autopilot technology, four units of V22 Osprey, three units of the UAV system, to the

conventional electric diesel submarine Scorpene



Photo Source: www.boombastis.com

improvement of facilities including transportation and communication tools, as well as the barracks of standby battalions for each Reserve Component (Komcad).

In the list of procurement for the Indonesian Navy's defense equipment, it contains plans to purchase five Scorpene submarines, four ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) 214 submarines, two type 310 submarines, to the manufacture of unmanned autonomous submarines, which are still in the testing phase and if it is successful, they will produce up to 50 units. In addition, there is a 140 meter procurement of 16 frigates, multi-role full combat ship (anti-submarine warfare), the construction of new Navy

bases, two ground coastal defense missile system, and three units of UAV systems.

As for the procurement in the Indonesian Air Force, it includes modernizing all fighter aircraft by means of refurbishing, procuring 36 Dassault Rafale units, 15 units of Boeing F-15 EX, and 15 units of Hercules C 130J. There are also plans to purchase two multi-role tanker transport (MRTT) units, 30 ground-controlled interception (GCI) radars and three UAV systems.

Surely, not all procurement details are written here. It's just that, seeing the line of defense equipment that the TNI is planning makes some people wonder

Dassault Rafale Combat Aircraft



Photo Source: id.wikipedia.org

whether this target can be met. It must be admitted that the procurement of defense equipment for the tri-service has become a topic of conversation in several circles, so that it is interesting to review.

Moreover, the Minister of Defense hopes that at least by 2024 or the end of his service, the procurement list can be fulfilled at 98 percent. An ambitious target, but the TNI is eagerly awaiting it. To be able to buy all the defense equipment included in the list, the Ministry of Defense has prepared a road map by relying on foreign loans for 2020-2024 amounting to US \$ 21 billion or around Rp. 299.83 trillions.

Not to mention, the Defense Minister Prabowo Subianto has signed a cooperation agreement (MoU) with the French Defense Minister Florence Parly and US Defense Minister Mark Esper during a visit to the two countries in 2020. Moreover, when the Defense Minister Prabowo Subianto met Parly in Paris twice, the local media reported later that the French government approves the sale of several defense equipment as well as cooperation which is claimed to benefit the two countries. So the problem now is the payment before the goods are sent to Indonesia.

What should be remembered is that Defense Minister Prabowo once emphasized that defense is

an investment, not a burden. According to him, when the country has strong defenses, it will be safe and peaceful. If the country is safe and peaceful then the it will ensure the good economy. This will attract investors to come to invest in our country.

"We need a country that is safe and stable, for a safe and stable country we need strong defense to maintain the integrity of our territory and our sovereignty," said the former Kostrad Commander during his speech at the 2020 Kemhan Rapim.

The Defense Minister Prabowo Subianto invited policy makers at the national level to have the same understanding of the importance of TNI modernization and investment in the defense sector. Because the country's defense strength is directly proportional to the investment that will enter the country. On that basis, Prabowo Subianto wants the future defense system to rely on national resources so that Indonesia becomes a strong country.

Later on the Defense Minister Prabowo emphasized all parties can enhance close cooperation in order to achieve the development of the posture of the national defense force. Here, the national defense force is not only the presence of new defense equipment, but also the uniting power of the Indonesian people to face the potential threats that arise. Therefore, the founders of this nation in formulating national defense are stipulated in the 1945 Constitution, namely the total people's defense system.

### Latest Main Weapon System

The Army Chief of Staff, General TNI Andika Perkasa once touched on the desire of the Indonesian Army to purchase the latest assault and transport helicopters. Indeed, currently, the Indonesian Army has Russian-made MI-17 transport helicopters. Even though the transport capacity is large enough to accommodate 30-35 personnel, General TNI Andika

Perkasa considers that the Indonesian Army needs other transport helicopters as an alternative. "Not only helicopter Osprey alone. In (the list of defense equipment) that we could propose a helicopter AW also and Black Hawk," said Andika to the reporters at the Combat Training Center (Puslatpur) Kodiklatad, Balfour, East Ogan Komering Ulu (OKU), South Sumatra, 26 October 2020.

According to Kasad, General TNI Andika Perkasa, the need for TNI AD helicopters is in accordance with the characteristics of Indonesia's territory as an archipelago country. It's just that, he understands, the country's financial situation has not recovered due to the Covid-19 pandemic. Therefore, it does not impose the fulfillment of main weapon system proposed by the Army to the government. "The transport helicopters, we should have had bigger ones. The attack helicopters for example the Apache, we should have more, not just eight," said the former Paspampres Commander.

Moreover, the Air Force Chief of Staff, Air Chief Marshal TNI Fadjar Prasetyo, confirmed the plan to procure defense equipment on a large scale. In a press conference on the sidelines of the TNI AU Meeting on Thursday (18/2), Air Chief Marshal TNI Fadjar Prasetyo, mentioned that the Indonesian Air Force would buy the 4.5 generation fighter aircraft, namely the French-made Dassault Rafale and the Boeing F-15 EX made in the United States (US) for strategic plans until 2024.

In addition, according to Air Force Marshal Fadjar Prasetyo, the Indonesian Air Force is also eyeing aircraft in the form of multi-role tanker transport and the latest C-130 J Hercules transport aircraft, airborne early warning capable aircraft, CH-4 unmanned combat aircraft (UCAV), GCI 3 radar, and various other defense equipment.

"From these various efforts, now the bright spots have begun to appear. Starting from this year to



Photo Source : DISPENAL

2024, we will immediately realize the acquisition of various modern defense equipment in stages, "said Air Chief Marshal TNI Fadjar Prasetyo at the IG Dewanto building, Mabesau, Cilangkap. According to him, the plan to procure defense equipment for the Indonesian Air Force has undergone several changes, both in terms of global conditions and state capacity. "Even though it has posture guidelines, strategic plan, and minimum essential force, its implementation really depends on various factors and conditions that keep changing dynamically," said, Air Chief Marshal TNI Fadjar Prasetyo .

Not surprisingly, because of the change in the decision at the TNI leadership level, the Sukhoi Su-35, which had long been anticipated to be purchased, was not even included in the procurement list until 2024. It's just that it doesn't matter. Because the Indonesian Air Force has included the advanced Rafale fighter aircraft and the F-15 EX as replacements.

Especially for these fighters, they will be used as a replacement for the F-5 Tiger, which has been grounded since 2016 due to frequent accidents. It's been five years, the replacement plane hasn't arrived yet. So it is hoped that both the Rafale and the F-15

EX can come soon to strengthen the Indonesian Air Force Squadrons.

According to Kasau, all stakeholders, including the Ministry of Defense (Kemhan), TNI Headquarters, and the Air Force, have analyzed and discussed the plan to resolve the issue of the defense equipment procurement. His party is targeting the modernization of all fighter aircraft starting in 2021. The former Halim Perdanakusuma Air Base Commander explained that the modern defense equipment procurement process aims to strengthen the strength of the TNI in the air and protect the country's sovereignty. In addition, the procurement of defense equipment also contributes to defense diplomacy efforts with other countries of strategic value to the global political constellation.

"The most important essence of adding defense equipment is not increasing the number of platforms. However, what is far more essential is to significantly increase our capabilities that we can empower in maintaining the country's sovereignty in the air," said Air Chief Marshal TNI Fadjar Prasetyo.

Therefore, the focus of the Air Force not only on the purchase of fighter aircraft and the like, but also build up the capacity of personnel and maintenance of defense equipment in order to remain at the highest level. "We must ensure the readiness of personnel and units in operating and maintaining various defense equipment of the air force, as well as carrying out various tasks of the Indonesian Air Force professionally and with a full sense of responsibility," said Kasau.

Meanwhile, some of the defense equipment that the Indonesian Navy wants to carry out including five Scorpene submarines and several types of submarines, including six units of fast missile fast missile (KCR) composite material 52 meters high speed, and three domestically made 60 meter KCR. Especially for the Scorpene submarine, this certainty has also been reported by Janes, a special military site

on December 2, 2020. In its review, the Indonesian Navy has been interested in buying the Scorpene 1000 (50 meters) type since 2016.

"The year 2021 must be better than 2020. More ships operating at sea, more aircraft flying, more troops and combat vehicles being operated and we (TNI AL) must be more responsive and present faster on the front lines, more agile in Completing the task," said Admiral TNI Yudo Margono during the 2021 Navy Commanders Meeting at the Navy Headquarters Auditorium, Cilangkap, East Jakarta, February 18, 2021.

Most recently, the Indonesian Navy is strengthened by two Indonesian warships (KRI) of the tank transport type (AT), which were named KRI Teluk Weda-526 and KRI Teluk Wondama-527. The inauguration of the two KRI AT-8 and AT-9 was carried out by Admiral TNI Yudo Margono at the PT Bandar Abadi Batam shipyard, Riau Islands Province on Wednesday (3/3).

Also present were the Head of the Defense Facilities Agency (Kabaranahan) of the Ministry of Defense, Air Vice Marshall TNI Yusuf Jauhari, representing the Secretary General of the Ministry of Defense, Air Marshall TNI Donny Ermawan Taufanto and PT Bandar Abadi Commissioner Stanly Rojali who also pressed the siren button to mark the inauguration of the two KRIs.

Admiral TNI Yudo Margono explained, the Navy continues to modernize defense equipment to meet a target in a minimum essential force (MEF) III until 2024. Therefore, the Navy continues to bring in new weapons system until a few years into the future. "I hope that the presence of these vessels can improve the performance of the tasks of the Navy," said Kasal, Admiral TNI Yudo Margono.\*\*\*



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Minister of Defense (Menhan) Prabowo Subianto, Wednesday (17/2), lead the Entry Meeting (Initial Briefing) implementation of the Examination of the Financial Report of the Ministry of Defense in 2020 at the Organizational Unit (UO) Kemhan, TNI Hq. Army, Navy and the Air Force, by BPK RI in Kemhan.



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Defense Minister Prabowo Subianto gave a briefing to the participants of the TNI Leadership Meeting (Rapim) year 2021, Tuesday (16/2) at Ahmad Yani, TNI HQ Cilangkap.



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Dr. Suyoto Hospital., which is one of the Covid-19 patient referral hospitals, Thursday (14/1) carried out the first vaccination for 25 health workers working at dr. Suyoto Hospital, Bintaro, South Jakarta



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Secretary General of The Indonesian Ministry of Health Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., started getting Covid-19 vaccination for Kemhan RI employees, the first day of Monday (8/3) at Urip Sumohardjo Building, Kemhan, Jakarta. This vaccination lasts from March 8 to 29, 2021 followed by all Kemhan employees.

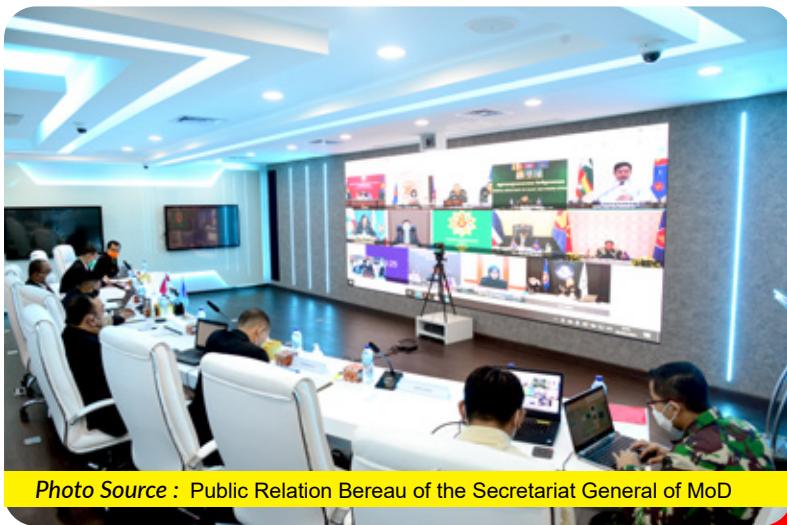


Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Director of International Cooperation of Defense Directorate General of Defense Strategy of the Ministry of Defense (Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan) BG J. TNI Binsar PS, S.E., M.Han attended the ASEAN Defence Senior Officials' Meeting Working Group (ADSOM WG), Tuesday (2/2), in Kemhan



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

The Head of Finance Report and Guidance Centre Kemhan, Commodore TNI Agus Supriadi, S. Sos., lead the implementation of Integrated Reconciliation (Planning, Logistics, and Finance Agency) Annual Kemhan and TNI Fiscal Year 2020 Unaudited, Tuesday (9/2).



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Deputy Minister of Defense (Wamenhan) Lt. Gen TNI M. Herindra together with Vice Minister of SOEs I Pahala Nugraha Mansury held a Working Meeting of BUMN Defense Industry (Indhan) 2021 at PT Len Industri (Persero), Bandung (5/3), followed by a direct review of production facilities of PT Len Industri (Persero).



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Head of Defense Equipment Centre Directorate of Defense Facilities Kemhan Air Commodore TNI Asfan Jauhari, S.A.P., M.Si, Saturday (27/2), inaugurated the launch of Tank Transport Ship (AT-8) H-355 for the Navy named KRI Teluk Weda-526, and produced by PT. Bandar Abadi Ship Builders and Dry Docks in Batam.



Photo Source : Public Relation Bureau of the Secretariat General of MoD

Defense Minister Prabowo Subianto expressed his appreciation to the people of NTT who chose to remain Indonesian citizens after the East Timor referendum poll in 1999 delivered in his speech by the Director General of Defense Potential Kemhan RI Maj. Gen. TNI Dadang Hendrayudha on Thursday (5/3), and continued to award to 11,845 Indonesian citizens in East Nusa Tenggara (NTT) who had played an active role in maintaining the integrity and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI).

# REKRUTMEN KOMPONEN CADANGAN

MATRA DARAT T.A 2021

Kementerian Pertahanan akan membuka pendaftaran program latihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi masyarakat Indonesia. Komponen ini akan memperkuat komponen utama pertahanan jika negara dalam keadaan darurat atau bahaya.



RENCANA PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN ONLINE

**MEI 2021**



LAMA PELATIHAN  
DASAR MILITER  
**3 BULAN**

## HAK CALON KOMCAD :

- ⌚ Uang saku
- elmet Perlengkapan perseorangan lapangan
- ✚ Perawatan kesehatan
- 👤 Jaminan kecelakaan kerja dan kematian
- badge Tunjangan operasional saat mobilisasi

## HAK ANGGOTA KOMCAD :

- ⌚ Uang saku
- elmet Perlengkapan perseorangan lapangan
- ✚ Perawatan kesehatan
- 👤 Jaminan kecelakaan kerja dan kematian
- badge Tunjangan operasional saat mobilisasi
- 🏆 Penghargaan

## PERSYARATAN:

- Laki-laki
- Usia 18-35 Tahun
- Sehat Jasmani & Rohani

## PROSES SELEKSI:

- Pendaftaran Online di: [www.kemhan.go.id/pothan](http://www.kemhan.go.id/pothan)
- Pendaftaran secara fisik
- Pemanggilan Latsarmil
- Seleksi

